



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
TAHUN 2016 – 2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2016 - 2036;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4749);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
27. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
28. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
35. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PerMen KP. Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019;
36. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
41. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

42. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
43. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016-2036.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merupakan pelaksana unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K Provinsi adalah rencana yang memuat kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat guna memantau rencana pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan RSWP-3-K.
7. Instansi/Lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan RSWP-3-K.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Timur merupakan komplemen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kalimantan Timur.
- (2) RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur mengintegrasikan kegiatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasar prinsip-prinsip manajemen.
- (3) RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan peranserta Masyarakat Adat dan/ atau Masyarakat Lokal maupun pemangku kepentingan lainnya.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

RSWP-3-K Provinsi ditetapkan dengan maksud :

- a. untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai tujuan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara menyeluruh;
- b. untuk memberikan kerangka dasar sebagai landasan bagi penyusunan Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Provinsi;
- c. sebagai norma, standar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur dalam rangka perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. sebagai strategi dasar dan keserasian dalam rangka pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan sebagai :

- a. upaya memulihkan dan menjamin hak serta kewajiban masyarakat mengelola sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan;
- b. upaya melindungi dan memperbaiki ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. upaya mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. upaya meminimalkan konflik pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dicapai keterpaduan dan keberlanjutan program pembangunan.

BAB IV  
VISI DAN MISI  
Pasal 5

- (1) Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi adalah “Terwujudnya pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang adil dan sejahtera.”
- (2) Misi dalam mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :
  - a. meningkatkan kualitas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kalimantan Timur;
  - b. mewujudkan kualitas sumberdaya manusia pesisir yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
  - c. meningkatkan perekonomian wilayah pesisir yang handal dengan partisipasi masyarakat pesisir yang seluas-luasnya;
  - d. mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di Kalimantan Timur;
  - e. mengembangkan kelembagaan, hukum dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, seimbang dan selaras;
  - f. mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan upaya-upaya rehabilitasi untuk mempertahankan kualitas lingkungan pesisir; dan
  - g. meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB V  
SISTEMATIKA  
Pasal 6

Sistematika RSWP-3-K Provinsi meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan RSWP-3-K Provinsi dalam tataran kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan definisi dan peristilahan.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM

Memuat deskripsi umum tentang keadaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi, sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir dan potensi dan permasalahan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. BAB III : KERANGKA STRATEGIS PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN

Memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran pokok RSWP-3-K Provinsi, isu-isu strategis, sasaran dan strategi kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi;serta target dan indikator.

d. BAB IV : KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN

Memuat langkah-langkah pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi. RSWP-3-K Provinsi merupakan acuan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur, serta menjadi acuan penyusunan RSWP-3-K Kabupaten/Kota. RSWP3-K Provinsi disusun dalam jangka waktu 20 tahun.

e. BAB V : PENUTUP

Memuat penjelasan bahwa RSWP-3-K Provinsi harus dilengkapi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumberdaya pesisir secara berkelanjutan.

BAB VI

ISI DAN URAIAN RSWP-3-K PROVINSI

Pasal 7

Isi beserta uraian RSWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMANTAUAN

Pasal 8

- (1) Pemantauan pelaksanaan RSWP-3-K Provinsi dilaksanakan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD dan atau lembaga/instansi terkait dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

RSWP-3-K Provinsi memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 April 2016

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. MEILIANA, SE, MM

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006



LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR     TAHUN 2016  
RENCANA STRATEGIS WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
TAHUN 2016-2036

---

**DOKUMEN FINAL**  
**RENCANA STRATEGIS**  
**WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RSWP-3-K)**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**SAMARINDA, 2015**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT maka **Dokumen Final Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034** ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Final ini diawali dengan bagian Pendahuluan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kedudukan RSWP-3-K dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan definisi dan peristilahan dan bagian Gambaran Umum Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang memuat deskripsi umum, kondisi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil, pola penggunaan lahan dan perairan, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat serta permasalahan utama pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya bagian utama dari Dokumen Final RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur adalah Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan yang memuat visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur, tujuan dan sasaran pokok RSWP-3-K serta isu-isu strategis, sasaran serta kebijakan yang dibutuhkan untuk pencapaian visi RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur. Bagian akhir dari dokumen final ini adalah Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan yang berisi langkah-langkah implementasi dan evaluasi serta pemantauan bagi pelaksanaan RSWP-3-K.

Akhirnya kami berharap semoga **Dokumen Final Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur** ini dapat menjadi pedoman utama dalam pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di provinsi ini.

Samarinda, Juni 2015

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.3. Ruang Lingkup .....	I-3
1.4. Kedudukan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur dalam Tataran KebijakanPerencanaan Pembangunan Daerah.....	I-4
1.5. Definisi dan Peristilahan .....	I-7
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	
2.1. Deskripsi Umum.....	II-1
2.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah.....	II-2
2.1.2. Iklim .....	II-3
2.1.3. Topografi.....	II-6
2.2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	II-7
2.2.1. Kondisi Sumberdaya Pesisir.....	II-7
2.2.2. Perkembangan Produksi Perikanan .....	II-33
2.2.3. Kondisi Perikanan Tangkap.....	II-34
2.2.4. PerikananBudidayaLaut.....	II-37
2.2.5. EksporHasilPerikanan.....	II-39
2.3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan.....	II-40
2.3.1. Kawasan Hutan .....	II-40
2.3.2. Pertambangan .....	II-42
2.3.2. Pertanian dan Perkebunan.....	II-42
2.3.4. Pariwisata .....	II-44
2.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir .....	II-49
2.4.1. Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan .....	II-49
2.4.2. ProdukDomestik Regional Bruto(PDRB) .....	II-54
2.4.3. Tipologi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur .....	II-58
2.4.4. Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir .....	II-62
2.5. Isu dan Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.....	II-74
<b>BAB III. KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN</b>	
3.1. Visi dan Misi .....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur.....	III-2
3.2.1. Tujuan Pokok.....	III-2
3.2.2. Sasaran Pokok .....	III-2
3.3. Isu-isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur.....	III-3
<b>BAB 4. KAIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN</b>	
4.1. Kaidah Pelaksanaan.....	IV-1
4.2. Pemantauan, Evaluasi dan Peninjauan Kembali.....	IV-3
4.3. Penetapan Rencana Strategis WP3K Propinsi Kalimantan Timur.....	IV-5

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang menyimpan potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlah). Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkannya sehingga muncul berbagai kebijakan dari berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya.

Sumberdaya pesisir meliputi pulau-pulau besar dan kecil (sekitar 17.500 pulau), dikelilingi ekosistem pesisir tropis, seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati dan non-hayati yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi kekayaan sumberdaya pesisir tersebut telah mengalami kerusakan. Sejak awal tahun 1990-an fenomena degradasi biogeofisik sumberdaya pesisir semakin meningkat dan meluas. Laju kerusakan sumberdaya pesisir telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, terutama pada ekosistem mangrove, terumbu karang dan estuari.

Secara faktual sebagian besar tingkat kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir masih menempati strata ekonomi yang paling rendah bila dibandingkan dengan masyarakat darat lainnya, sehingga kemiskinan ini malah menjadi pemicu eksploitasi lebih sumberdaya pesisir. Paradoksi pengelolaan wilayah pesisir dan lautan yang tidak efektif dan kemiskinan masyarakat tersebut harus segera diakhiri. Langkah ke arah itu dimulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu. Melalui sistem pengelolaan tersebut diharapkan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir yang mengelolanya.

Hirarki pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan amanat UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan UU No 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 terdiri dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K), Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP-3-K) dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RAPWP-3-K).

Sesuai dengan hirarki tersebut di atas maka RSWP-3-K merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pondasi bagi dokumen hirarki lainnya. RSWP-3-K memuat arah dan kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan visi, misi, tujuan dan strategi, serta sasaran dan strategi yang luas disamping target pelaksanaan dengan indikator yang tepat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang pemerintah daerah. Dokumen RSWP-3-K ini ditetapkan untuk waktu selama 20 tahun dan sekurang-kurangnya dapat ditinjau kembali selama 5 tahun sekali.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi acuan bagi penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman semua pihak terkait dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tentang pentingnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, efisien dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan upaya-upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di Provinsi Kalimantan Timur.
- c. Mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintahan, antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir yang bertanggung jawab.
- d. Memberikan panduan bagi instansi-instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, dunia usaha, masyarakat dan pihak-pihak lainnya tentang strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup wilayah perencanaan dalam penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur ini adalah meliputi wilayah pesisir di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pesisir yakni Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.

Secara definisi menurut UU No, 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RSWP-3-K) adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

Ruang lingkup materi dokumen Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Kedudukan RSWP-3-K dalam Rencana Pembangunan Daerah
- 1.5. Definisi dan Peristilahan

#### **II. Gambaran Umum Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

- 2.1. Deskripsi Umum
- 2.2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 2.3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan
- 2.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir
- 2.5. Permasalahan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#### **III. Kerangka Strategi Pengelolaan dan Pembangunan**

- 3.1. Visi dan Misi
- 3.2. Isu Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3.3. Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Strategi dan Arah Kebijakan
- 3.5. Target dan Indikator

#### **IV. Kaidah Pelaksanaan dan Pemantauan**

#### 1.4. Kedudukan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur dalam Tataran Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah

RSWP-3-K merupakan kebijakan publik yang dimaksudkan untuk memastikan upaya upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat menjadi arus utama dalam pembangunan. Dokumen ini memberikan arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan isu, tujuan, sasaran, dan strategi, serta target pelaksanaan dengan indikator pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tepat.

RSWP-3-K juga harus disusun dengan mengacu kepada beberapa landasan dan ditujukan untuk mendorong peran serta dan keterpaduan antar pemerintah, antar instansi, swasta, dan masyarakat dalam mengembangkan upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara komprehensif. Diharapkan dokumen yang telah disusun dapat menjadi acuan bagi semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa strategi harus dikembangkan sebagai panduan untuk menjabarkan program kedalam rencana-rencana kegiatan.

Sementara itu, strategi pelaksanaan rencana dirumuskan untuk mengarahkan implementasi rencana secara konsisten. Strategi adopsi dan pelembagaan dokumen dirumuskan dalam upaya memperluas status legalitas dokumen serta memantapkan kedudukan dan fungsi dokumen RSWP-3-K dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

Hal terpenting dari upaya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah terbangunnya komitmen semua instansi dan pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama dan komunikasi yang harmonis antar *stakeholders* sehingga keterpaduan pengelolaan di daerah dapat terwujud secara maksimal.

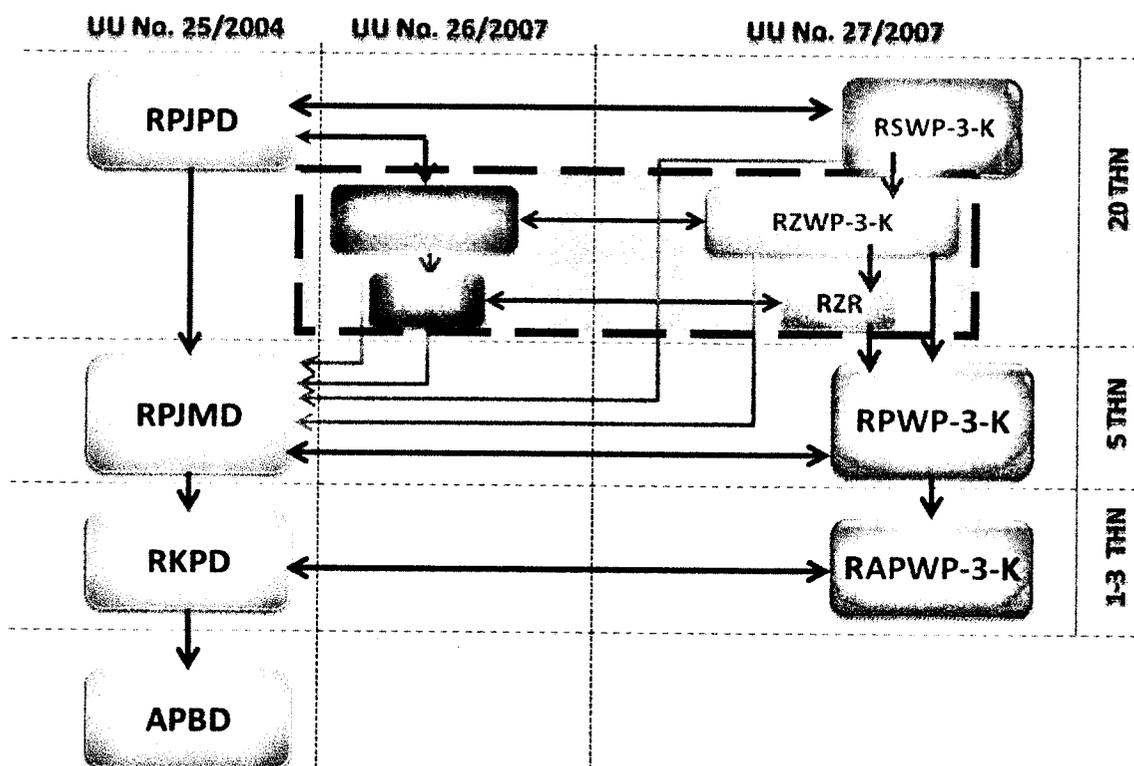
Dokumen RSWP-3-K terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat dilakukan melalui musrenberg, pada saat penyusunan RKPD, penyusunan/evaluasi RPJPD dan RPJMD.

Dokumen RSWP-3-K berfungsi sebagai instrumen yang akan dipakai sebagai referensi kebijakan dan program kegiatan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan beberapa tahun ke depan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dokumen RSWP-3-K haruslah : (a) sejalan dan menjadi bagian dari sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta (b) dilaksanakan secara konsisten oleh masing masing sektor, baik daerah maupun pusat.

Integrasi dokumen RSWP-3-K tersebut harus sejalan dengan sistem dan konsep perencanaan pembangunan yang ada (UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional) sebagaimana ilustrasi pada Gambar 1 di bawah ini. Dari gambar tersebut nampak bahwa adopsi dan pelebagaan dokumen tersebut dilakukan dengan menjadikan dokumen RSWP-3-K sebagai masukan dalam evaluasi RPJPD dan/atau penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Renstra SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), dan Renja SKPD.

Selengkapnya mengenai kedudukan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur dalam tataran kebijakan perencanaan pembangunan daerah disajikan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1.1. Kedudukan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Acuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- UU No. 7 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
- UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- f. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008;
- h. UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- i. UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- j. UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- k. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- l. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
- m. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- n. PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- o. PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- p. PP No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
- q. PP No 2 Tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup;
- r. PP No 15 Tahun 2010 tentang Peyelenggaraan Penataan Ruang;
- s. PP No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- t. PP No 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;
- u. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
- v. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- w. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.30/MEN/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- x. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.2/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- y. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER. 15 /MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
- z. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.34/PERMEN-KP/2014 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025.
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013.

### 1.5. Definisi dan Peristilahan

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi dan peristilahan yang digunakan dalam dokumen penyusunan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur:

- a. **Perencanaan** adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
- b. **Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. **Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.
- d. **Wilayah Pesisir** adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Secara operasional, batas ke arah darat ditentukan sebagai batas kecamatan pesisir ke arah laut adalah 12 mil untuk Provinsi dan 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota.
- e. **Pulau Kecil** adalah beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
- f. **Pulau-Pulau Kecil** adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
- g. **Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumberdaya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa

lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir.

- h. **Ekosistem** adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non-organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
- i. **Perairan Pesisir** adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
- j. **Kawasan** adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- k. **Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- l. **Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah rencana yang menentukan arah pembangunan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
- m. **Rencana Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
- n. **Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
- o. **Rencana Zonasi Rinci** adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam Rencana Zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan

serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

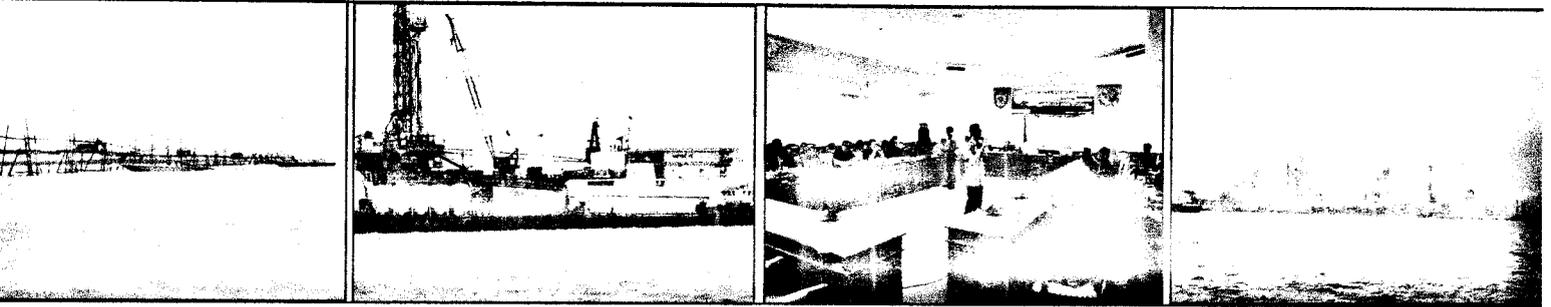
- p. **Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
- q. **Kawasan Konsevasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- r. **Sempadan Pantai** adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- s. **Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dengan kondisi semula.
- t. **Reklamasi** adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengringan lahan atau drainase.
- u. **Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil** adalah kemampuan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lain.
- v. **Mitigasi Bencana** adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik secara struktur atau fisik alami dan/ atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- w. **Pencemaran Pesisir** adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- x. **Pemangku Kepentingan Utama** adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan masyarakat pesisir.

- y. **Pemberdayaan Masyarakat** adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
- z. **Konsultasi Publik** adalah proses penggalan masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- aa. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- bb. **Satuan Kerja Perangkat Daerah** adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di provinsi, atau kabupaten/kota.
- cc. **Instansi Terkait** adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, unit pelaksana teknis, dan instansi vertikal yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- dd. **Masyarakat** adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ee. **Masyarakat Adat** adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
- ff. **Masyarakat Lokal** adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
- gg. **Masyarakat Tradisional** adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
- hh. **Kearifan Lokal** adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- ii. **Pemerintah Pusat**, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- jj. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

- kk. **Menteri** adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
- ll. **Direktur Jenderal** adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL



#### 2.1. Deskripsi Umum

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya alam yang besar dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor ke luar negeri, sehingga provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan hasil-hasil alam lainnya.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah atas dasar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pemekaran wilayah administrasi pemerintahan. Sebelum provinsi ini dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 14 Kabupaten/Kota masing-masing empat (4) Kota dan sepuluh (10) Kabupaten dengan 140 Kecamatan dan 1.445 Desa/Kelurahan.

Sepuluh Kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibukota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam dan Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale (pemekaran dari Kabupaten Bulungan disetujui pembentukannya pada sidang paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007). Selanjutnya empat Kota adalah Balikpapan ibukotanya Balikpapan, Samarinda ibukotanya Samarinda, Tarakan ibukotanya Tarakan dan Bontang ibukotanya Bontang.

Perkembangan selanjutnya dalam hal pemekaran wilayah yakni 1 Kota dan 3 Kabupaten berpisah menjadi Provinsi sendiri yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Provinsi Kalimantan Utara yang baru ini telah resmi disahkan rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2012, namun akan berdiri sepenuhnya mulai tahun 2015. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Timur pada Desember 2012 dengan 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung dan Laham.

Dari hasil pemekaran di atas maka Provinsi Kalimantan Timur saat ini memiliki 7 kabupaten dan 3 (tiga) kota.

#### 2.1.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 113° 49' 21.907"- 118° 59' 24.8803" BT dan 2° 36' 13.0141" LU - 2° 23' 39.06" LS. Posisi Kalimantan Timur sangat strategis sebagai jalur transportasi laut internasional karena berbatasan dengan wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kabupaten Bulungan dan Malinau, di sebelah Timur dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi, di sebelah Selatan dengan Kalimantan Selatan serta di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Sarawak (Malaysia).

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar ± 127.264,45 km<sup>2</sup> sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1. Wilayah terluas adalah Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah sekitar 25,05 persen dari luas jumlah provinsi. Wilayah dengan luas paling kecil adalah Kabupaten Bontang dengan luas wilayah sekitar 0,13 persen dari luas provinsi. Provinsi Kalimantan Timur dengan ibukota Samarinda terbagi atas 3 kota dan 7 kabupaten dengan 81 kecamatan dan 866 buah desa.

Tabel 2.1. Wilayah Admanistrasi Provinsi Kalimantan Timur Sebelum Pemekaran

Kabupaten/Kota	Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )
<b>Kabupaten</b>				
Paser	Tanah Grogot	8	106	10.936,38
Kutai Barat	Sendawar	15	229	30.943,79
Kutai Kartanegara	Tenggarong	18	203	26.326,00
Kutai Timur	Sangatta	11	109	31.884,59
Berau	Tanjung Redeb	11	89	22.521,71
Penajam Paser	Penajam	4	46	3.209,66

Kabupaten/Kota	Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )
Utara				
Mahakam Ulu	Ujoh Bilang	(Masih tergabung dengan kabupaten induk)		
<b>Kota</b>				
Balikpapan	Balikpapan	5	27	560,7
Samarinda	Samarinda	6	42	718,23
Bontang	Bontang	3	15	163,39
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>81</b>	<b>866</b>	<b>127.264,45</b>

Selanjutnya wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di 7 (tujuh) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Paser, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Bontang. Adapun jumlah kecamatan di kabupaten/kota pesisir adalah sebanyak 60, jumlah desa/kelurahan 595 dan luas daratannya sebesar 95.602,43 km<sup>2</sup>.

Wilayah pesisir terluas adalah Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah sekitar 33,35 persen dari luas wilayah pesisir provinsi. Wilayah pesisir dengan luas paling kecil adalah Kabupaten Bontang dengan luas wilayah sekitar 0,17 persen dari luas wilayah pesisir provinsi.

Selengkapnya mengenai luas wilayah di Kabupaten/Kota pesisir Provinsi Kalimantan Timur sesudah pemekaran disajikan pada Tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2. Luas Wilayah di Kabupaten/Kota Pesisir Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
<b>Kabupaten</b>			
Paser	Tanah Grogot	10.936,38	11,44
Kutai Kartanegara	Tenggarong	26.326,00	27,54
Kutai Timur	Sanggata	31.884,59	33,35
Berau	Tanjung Redeb	22.521,71	23,56
Penajam Paser Utara	Penajam	3.209,66	3,36
<b>Kota</b>			
Balikpapan	Balikpapan	560,7	0,59
Bontang	Bontang	163,39	0,17
<b>Pesisir Kalimantan Timur</b>		<b>95.602,43</b>	<b>100</b>

### 2.1.2. Iklim

Provinsi Kalimantan Timur beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah yang ada di Pulau Kalimantan pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan

April. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa, Provinsi Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat (November – April) dan angin Muson Timur (Mei – Oktober). Namun, dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim yang ada kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang.

Suhu udara di wilayah ini antara lain ditentukan oleh tinggi rendah tempat tersebut dari permukaan laut. Berdasarkan data dari stasiun meteorologi yang berjumlah 3 buah di Provinsi Kalimantan Timur diantaranya, stasiun meteorologi Samarinda, stasiun meteorologi Balikpapan dan stasiun meteorologi Tanjung Redeb, dapat diketahui rata-rata suhu udara selama satu tahun di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Rata-rata suhu terendah adalah 22,1oC dan tertinggi 35,1oC terjadi di Berau. Selain sebagai daerah tropis dengan hutan yang luas, di tahun 2012 rata-rata kelembaban udara Kalimantan Timur antara 82-89 persen. Kelembaban udara terendah diamati oleh stasiun meteorology Samarinda terjadi pada bulan September dengan kelembaban 72 persen. Sedangkan tertinggi terjadi di Berau pada bulan Januari dan Maret dengan kelembaban 91 persen.

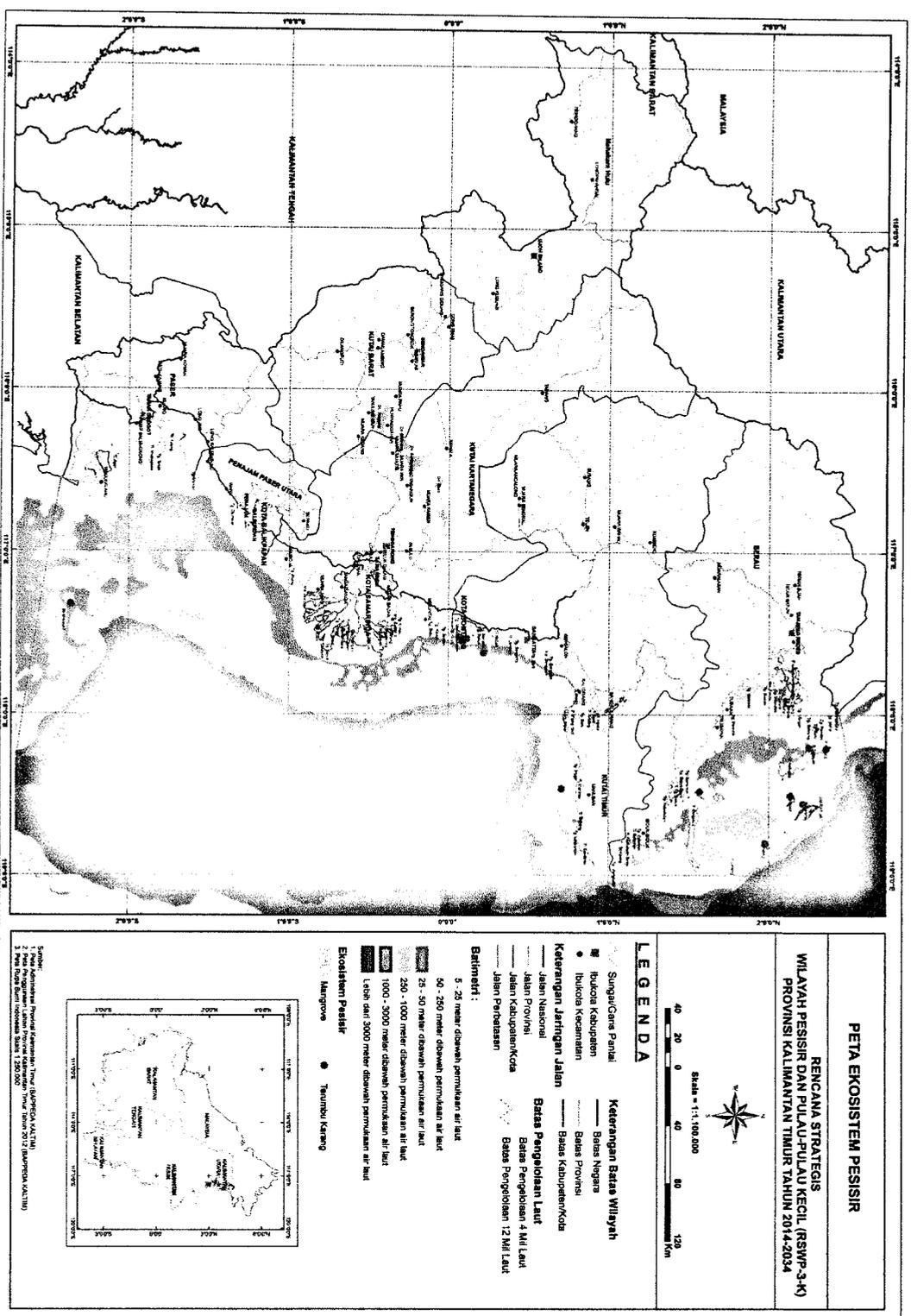
Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tabel 2.3 mengenai suhu rata-rata minimum dan maksimum, kelembaban udara, kecepatan angin, curah hujan, sinar matahari di stasiun pengamatan meteorologi pada tahun 2012.

Tabel 2.3. Rata-rata Beberapa Indikator Suhu dan Kelembaban di Kalimantan Timur

No.	Uraian	Stasiun	
		Samarinda	Balikpapan
1.	Suhu udara (° C)		
	Maksimum	24,6	22,9
	Minimum	32,3	33,5
2.	Kelembaban udara (%)	79	87
3.	Tekanan udara (mb)	1.010,0	1.010,2
4.	Kecepatan angin (knot)	3	5
5.	Curah hujan (mm)	202	234,7
6.	Penyinaran matahari	43	51

Sumber: Kaltim dalam Angka (2013)

Sebagai daerah yang beriklim tropis, dengan habitat hutan yang sangat luas, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai kelembaban udara relatif tinggi, rata-rata berkisar antara 79-80 persen. Kelembaban udara paling rendah dapat dipantau melalui Stasiun Meteorologi Samarinda. Keadaan angin di Kalimantan Timur pada tahun 2012 yang dipantau di beberapa stasiun pengamat, menunjukkan bahwa kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3 knot sampai 5 knot.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Kalimantan Timur dan Wilayah Pesisirnya

Curah hujan di daerah Provinsi Kalimantan Timur sangat beragam menurut stasiun pengamatan. Berdasarkan data yang didapat dari stasiun masing-masing stasiun meteorologi, kondisi curah hujan mengalami perubahan dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata curah hujan yang terjadi pada tahun 2012 sebesar 202 mm menurut catatan Stasiun Samarinda dan 234,7 mm berdasarkan Stasiun Balikpapan. Ini berarti pada tahun 2012 terjadi peningkatan curah hujan yang kemungkinan besar karena pengaruh pemanasan global. Berdasarkan data terakhir, penyinaran matahari pada tahun 2012 sebesar 43% sampai dengan 51%.

### 2.1.3. Topografi

Wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dari kemiringan landai hingga curam, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 1.000 meter dari permukaan laut (dpl) dengan kemiringan 0 - 40 persen. Di tinjau dari kemiringan lereng, sebagian besar (mencapai 40,62 persen) wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kelerengan > 40 persen. Sedangkan daerah dengan ketinggian lebih dari 100 meter dpl dan kelerengan > 40 persen berada di wilayah bagian tengah dan barat yang sebagian besar merupakan hulu sungai. Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelas lereng, meliputi:

- Lahan datar, memiliki kemiringan 0 - 2 persen dengan luas wilayah mencapai 2.093.677 ha.
- Lahan bergelombang, memiliki kemiringan 2 - 15 persen dengan luas wilayah mencapai 2.431.802 ha.
- Lahan curam, memiliki kemiringan 15 - 40 persen dengan luas wilayah mencapai 4.476.122 ha.
- Lahan sangat curam, memiliki kemiringan >40 persen dengan luas mencapai 10.842.516 ha.

Kondisi fisiografi Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh pegunungan dan dataran. Daerah pegunungan terdiri dari Pegunungan Iban, Muller, Meratus serta gunung-gunung dan bukit-bukit yang tersebar diantara ketiga pegunungan tersebut yang berada di bagian barat Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Kutai Barat hingga perbatasan Malaysia. Wilayah pantai, rawa pasang surut, daratan aluvial, jalur endapan dan sungai berada di kawasan pesisir timur, sedangkan wilayah dataran dan lembah aluvial umumnya mengikuti arah aliran sungai. Kabupaten/kota yang memiliki luas daratan yang paling besar adalah Kabupaten Malinau. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki luas lautan yang paling besar adalah Kabupaten Berau.

## 2.2. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

### 2.2.1. Kondisi Sumberdaya Pesisir

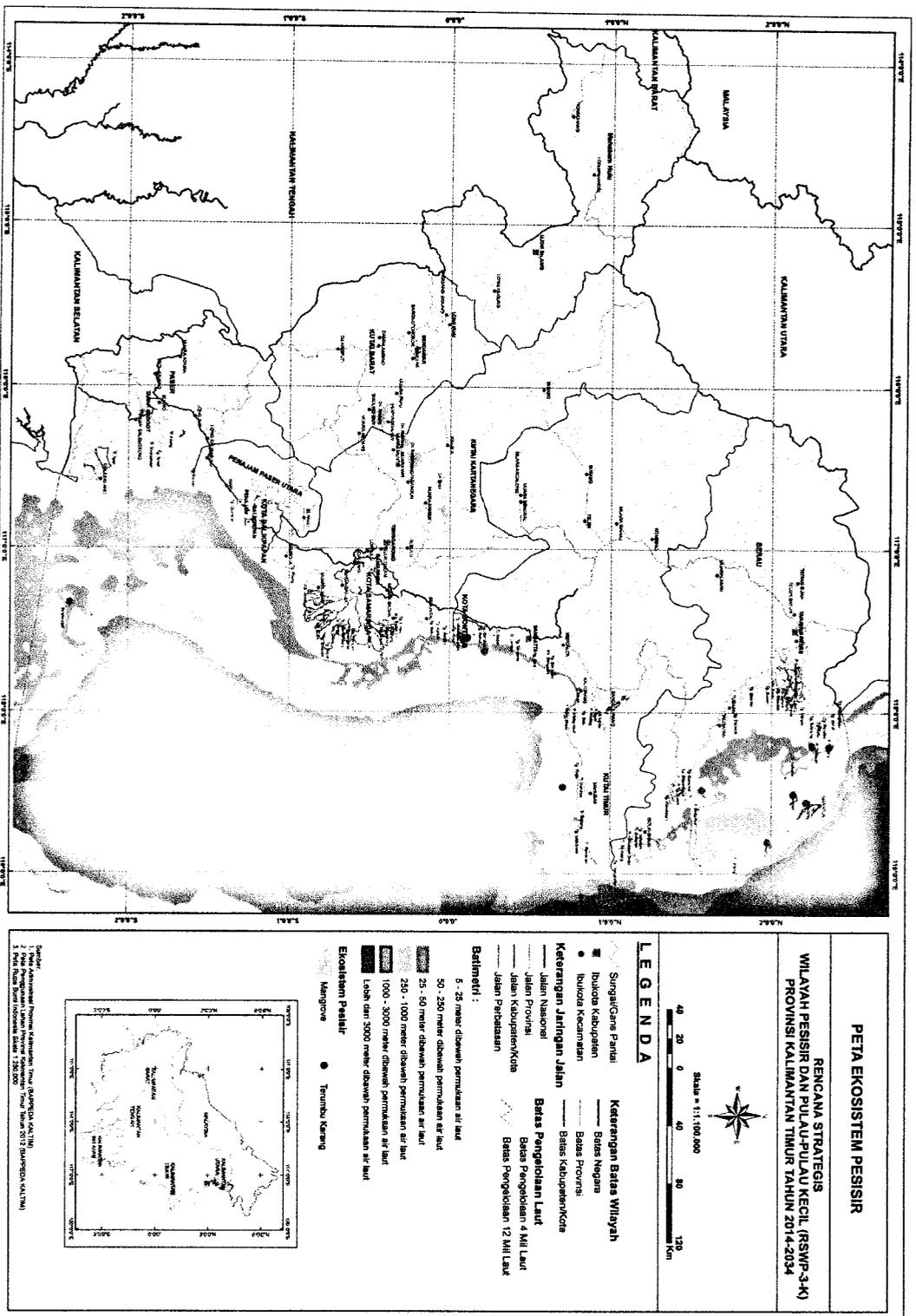
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud dengan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut; dimana ke arah darat mencakup daerah yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan, seperti pasang surut, interusi air laut, gelombang, dan angin laut; dan ke arah laut mencakup daerah perairan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan dan dampak kegiatan manusia, seperti aliran air sungai, *run off*, sedimentasi, dan pencemaran. Sedangkan pulau-pulau kecil/gugusan pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau-pulau yang secara fungsional saling berinteraksi dari sisi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya, baik secara individual maupun secara sinergis dapat meningkatkan skala ekonomi dari pengelolaan sumber dayanya.

Tabel 2.4. Kabupaten/Kota di Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten	Kecamatan-kecamatan Pesisir
Berau	Sambaliung, Pulau Derawan, maratua, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-biduk
Kutai Timur	Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Bengalon, Kaliorang, Sangkulirang dan Sandaran
Bontang	Bontang Utara dan Bontang Selatan
Kutai Kartanegara	Marang Kayu, Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Samboja
Balikpapan	Balikpapan Timur, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat
Penajam Paser Utara	Penajam, Waru dan Babulu
Paser	Batu Engau, Tanjung Harapan, Pasir Balengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali

Sumber: RSWP-3-K Kabupaten Berau, Kutai Timur dalam Angka 2014, RZWP3K Kota Bontang, RSWP-3-K Kutai Kartanegara (Draft), RZWP3K Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara dalam Angka 2014, RZWP3K Kabupaten Paser

Dalam wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 9 kabupaten/kota, terdapat 7 kabupaten/kota yang memiliki wilayah pesisir. Adapun luas wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Timur yang diukur dari jarak 0-12 mil ke arah laut dan batas-batas kecamatan pesisir ke arah darat adalah sebesar 110.371,63 km<sup>2</sup>.



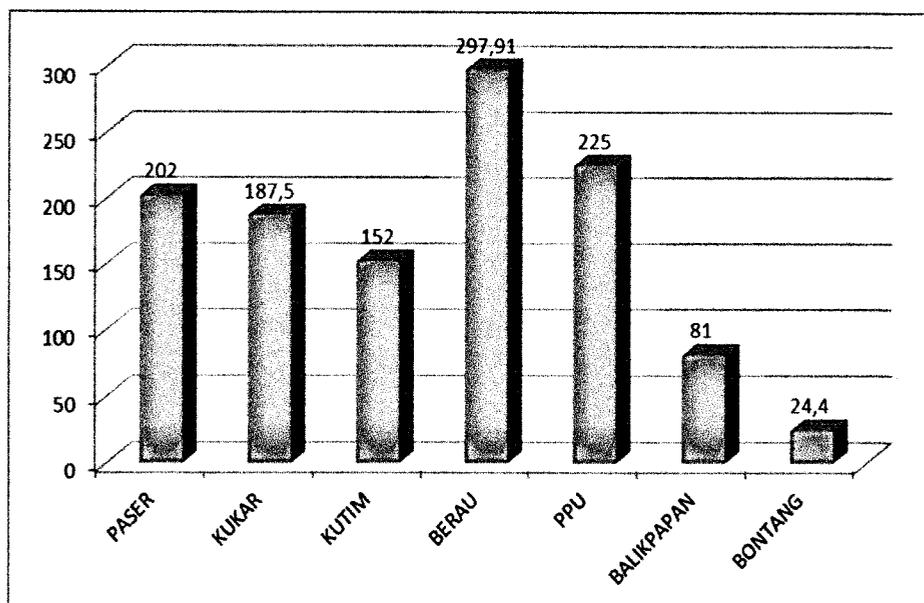
Gambar 2.2. Peta Ekosistem Perairan Provinsi Kalimantan Timur

Luas wilayah pesisir terbesar diberikan oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar 35.747,50 km<sup>2</sup> atau sebesar 32,39% dari total luas wilayah pesisir. Selanjutnya Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki wilayah pesisir terkecil sebesar 274,24 km<sup>2</sup> atau sebesar 0,25%. Selengkapnya mengenai luas wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Timur disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Luas Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Pesisir (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
<b>Kabupaten</b>		
Paser	11.603,94	10,51
Kutai Kartanegara	27.263,10	24,70
Kutai Timur	35.747,50	32,39
Berau	34.127,47	30,92
Penajam Paser Utara	274,24	0,25
<b>Kota</b>		
Balikpapan	857,81	0,77
Bontang	497,57	0,45
<b>Total Luas</b>	<b>110.371,63</b>	<b>100</b>

Selanjutnya panjang pantai di provinsi ini sekitar 1.169 km yang terbentang dari bagian selatan Kabupaten Paser hingga bagian utara Kabupaten Berau. Panjang pantai terluas di provinsi ini disumbangkan oleh Berau yaitu 297,91 km, disusul oleh Kabupaten Penajam Paser Utara 225 km dan Kabupaten Paser 202 km (Gambar 2.3).



Gambar 2.3. Panjang Pantai Menurut Kabupaten/Kota

## Ekosistem Mangrove

Mangrove merupakan vegetasi yang tumbuh pada daerah pasang surut di sepanjang pantai. Hutan mangrove sebagai ekosistem pesisir dan laut memiliki arti penting karena mempunyai fungsi ekologis, sosial dan ekonomi. Secara ekologis mangrove berfungsi sebagai tempat pemijahan dan pembesaran ikan, udang, kepiting dan biota lainnya (*spawning and nursery ground*), pelindung pantai dari abrasi akibat arus dan gelombang (*coastal protection*) dan pemasok unsur hara (*nutrient source*) bagi lingkungan. Secara sosial ekonomi, mangrove menghasilkan kayu untuk rumah penduduk dan industri, tempat sumber ikan bagi manusia. Secara estetika, ekosistem mangrove dengan keanekaragaman hayati yang tinggi memiliki potensi untuk ekowisata bahari (*marine ecotourism*).

Luas hutan mangrove di Kalimantan Timur tercatat sebesar 360.819,26 hektar. Kabupaten Kutai Kartanegara menyumbang luasan mangrove terbesar yakni 36% atau seluas 129.900 hektar diikuti oleh Kabupaten Berau sebesar 22,25% atau seluas 80.277 hektar (Tabel 2.6). Adapun kualitas hutan mangrove di wilayah ini bervariasi dari yang kondisi baik, sedang dan rusak.

Tabel 2.6. Luas Hutan Mangrove Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luasan Hutan Mangrove (ha)	Persentase (%)
Berau	80.277,00	22,25
Kutai Timur	30.276,09	8,39
Bontang	2.017,17	0,56
Kutai Kartanegara	129.900,00	36,00
Balikpapan	1.888,00	0,52
Penajam Paser Utara	62.345,00	17,28
Paser	54.116,00	15,00
<b>Total Luas</b>	<b>360.819,26</b>	<b>100,00</b>

Mangrove yang ditemukan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil laut Berau sebanyak 26 jenis. Hutan mangrove di Kabupaten Berau dapat ditemukan mulai dari bagian utara di Tanjung Batu, Delta Berau, sampai ke selatan di Biduk-Biduk. Selain itu hutan mangrove juga ditemukan di beberapa pulau, seperti Pulau Panjang, Rabu-rabu, Semama dan Maratua di bagian utara pesisir Berau, dan di Pulau Buaya-buaya di bagian selatan pesisir Berau. Jenis-jenis mangrove tersebut diantaranya Api-api (*Avicennia sp.*), Prapat (*Sonneratia sp.*), Bakau (*Rhizophora sp.*), Tancang (*Bruguiera sp.*), Nipah (*Nypa fruticans*) dan Tenger (*Ceriops sp.*).

Secara keseluruhan luas mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Berau sebesar 80.277 ha, terdiri dari mangrove sejati (bakau, api-api, prapat, tancang dan temger) 49.888 ha dan mangrove tidak sejati (nipah, nibung) 30.389 ha. Nipah khususnya mendominasi di sepanjang Sungai Berau, sedangkan bakau dan api-api di Delta Berau dan di sepanjang

pantai. Ekosistem mangrove juga terdapat di P. Panjang, P. Semama dan P. Maratua sementara di P. Derawan, P. Sangalaki, P. Kakaban, P. Sambit, P. Blambangan, P. Mataha, P. Bilang-bilangan, P. Balikukup, P. Manimbora, P. Kaniungan Besar dan P. Kaniungan Kecil, vegetasi yang ada hanya vegetasi pantai.

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur dijumpai di Kecamatan Teluk Pandan dengan luasan sebesar 2,323.58 ha terdiri dari jenis *Avicennia sp*, *Sonneratia sp* dan *Rhizophora sp* dan di Kecamatan Sengata Selatan dengan luas sebesar 1.402, 52 ha dengan didominasi oleh jenis mangrove yang sama. Sementara itu luasan mangrove di Kecamatan Sengata Utara sebesar 887.02 Ha terdapat di lokasi Jety Aquatic dan Kenyamukan. Jenis mangrove yang ada di lokasi tersebut di dominasi dari jenis *Avicennia sp*, *Rhizophora sp* dan *Nypha sp*.

Selanjutnya di Kecamatan Bengalon tercatat luasan mangrove sebesar 1,799.00 ha dengan jenis *Avicennia sp* dan *Sonneratia sp*. dan di Kecamatan Kaliorang tercatat seluas 659.36 ha didominasi oleh *Avicennia sp*, *Sonneratia sp* dan *Rhizophora sp*. Luas mangrove di Kecamatan Sangkulirang diketahui sebesar 11,210.75 ha dan di Kecamatan Sandaran 11,993.87 ha dengan jenis mangrove yang ditemukan adalah *Avicennia sp*, *Sonneratia sp*.

Jenis mangrove yang ditemukan di pulau-pulau kecil Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh jenis *Rhizophora sp* yang terdapat pada semua tepi pantai pulau-pulau kecil yang ada. Walaupun jenis *Avicennia sp* dan *Sonneratia sp* masih dapat ditemukan di beberapa pulau, namun bentuk tebing pulau dan kontur pantai yang cenderung terjal hanya memungkinkan untuk jenis *Rhizophora* yang mempunyai akar lebih panjang untuk bisa mencapai dasar perairan. Begitu pula seluruh pantainya yang terus menerus terendam air sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuhnya jenis mangrove lainnya.

Dari data-data di atas diketahui bahwa luas mangrove di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebesar 30.276,09 hektar dengan rincian berdasarkan kecamatan adalah Bengalon (1.799,00), Kaliorang (659,36), Sengata Utara (887,02), Sandaran (11.993,87), Sengata Selatan (1.402,52), Sangkulirang (11.210,75) dan Teluk Pandan (2,323,58).

Sebaran ekosistem mangrove di Kota Bontang dijumpai di pantai Kota Bontang dan pulau-pulau kecil. Dari keseluruhan pulau yang terdapat di Kota Bontang kecuali pulau Beras Basah merupakan kawasan mangrove. Keberadaan mangrove terluar di jumpai di Pulau Kedingdingan yaitu sekitar 8 km dari garis pantai. Luas hutan mangrove di wilayah pesisir Kota Bontang pada 2009 tercatat sebesar 2,017.17 hektar.

Tabel 2.7. Luasan Mangrove di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bontang

No.	Lokasi/Kelurahan	Luas (ha)
1	Api Api	52.94
2	Berbas Pantai	2.94
3	Berbas Tengah	0.42
4	Berbas Tengahi	0.24
5	Bontang Kuala	285.39
6	Bontang Lestari	704.60
7	Guntung	394.54
8	Gunung Elai	77.52
9	Kep. Badak	16.65
10	Loktuan	19.22
11	P. Agar-agar	7.07
12	P. Karang Kiampau	1.29
13	P. Kedindingan	119.09
14	P. Manuk-manukan	14.49
15	P. Melahing	3.42
16	P. Sianca	52.46
17	P.Tebak Batang	4.89
18	Satimpo	43.92
19	P. Selangan- P. Tihik-tihik	64.31
20	Tanjung Laut	0.43
21	Tanjung Laut Indah	117.70
22	Tj. Kuya	22.33
23	Tj. Merangas	11.324
	<b>Total</b>	<b>2.017,17</b>

Sumber: Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Bontang (2012)

Jenis-jenis mangrove yang ditemukan antara lain bakau (*Rhizophora sp*), Bius/tancang (*Bruguiera sp*), Rambai laut (*Sonneratia sp*), Api-api (*Avicenia sp*), Nipah (*Nypah sp*) dan lain-lain. Jenis yang banyak dijumpai adalah *Rhizophora* dan *Avicenia marina*. Secara umum formasi yang banyak ditemukan adalah formasi campuran terutama di pulau-pulau kecil. Formasi ini tidak membentuk zonasi dari darat sampai kelaut. Karena struktur pulau yang selalu terendam dan tidak pada waktu pasang. Selain itu sekitar pinggir pulau dikelilingi air laut.

Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara secara aktual relatif baik, distribusi kerapatan antar wilayah tereskpose berbeda dengan luas agregat kurang lebih 533,98 Ha. Spesies penyusun hutan mangrove di pesisir Kecamatan Marang Kayu didominasi dari jenis *Avecenia sp*, *Sonneratia sp*, dan *Nypa frutican*. Luas sebaran mangrove di pesisir Kecamatan Muara Badak diperkirakan sekitar 2.402,60 ha, dengan dominansi jenis yang relatif sama dengan kondisi mangrove di Pesisir Kecamatan Marang Kayu. Sedangkan luas mangrove di Muara Jawa berkisar 9.836,48 ha.

Secara ekologi penyusun hutan mangrove di Handil Baru hingga Tanjung Harapan Tanah merah adalah *Avicennia alba*, *Bruguiera* sp. dan *Rhizophora mucronata*, namun khusus di pantai Handil Baru lebih didominasi oleh *Bruguiera* sp.



Gambar 2.4.. Ekosistem mangrove yang disusun oleh komunitas *A. alba* yang telah berusia tua.

Secara khusus komunitas *A. alba* tersebut membentuk kelompok-kelompok yang kecil dan tidak membangun formasi sepanjang garis pantai dan tidak pula membentang ke arah darat. Aktualisasi tersebut menggambarkan bahwa komunitas ini dalam kondisi tertekan secara ekologis yang terlihat dari besarnya tekanan secara fisik yang berasal dari laut berupa arus dan gelombang yang terindikasi tidak ditemukannya anakan dan semai pada bagian depan dari arah laut pada komunitas ini. Kemudian adanya sekat pemisah yang jelas dengan bagian darat dibelakangnya berupa alur pasir kasar dan pada bagian darat ditumbuhi oleh vegetasi pantai berupa Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*).

Berbagai jenis ekosistem mangrove dapat ditemukan di Kota Balikpapan antara lain *Avicennia alba*, *Avicennia marine*, *Rhizophora mucronata*, *Rhizophora apiculata* dan *Sonneratia* sp. Selain pohon mangrove di kawasan ini juga terdapat berbagai macam fauna. Jenis fauna yang dapat ditemukan di sini antara lain belodok, kepiting, burung, monyet dan bekantan. Bekantan merupakan fauna endemik Pulau Kalimantan.

Distribusi mangrove di Kota Balikpapan berada di Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan Barat, Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Luas hutan mangrove di Kota Balikpapan diperkirakan sebesar 1.888 hektar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.8. di bawah ini.

Tabel 2.8. Distribusi Ekosistem Mangrove di Kota Balikpapan

1.	Balikpapan Utara	48	Tersebar di tepi sungai Sumber ( bagian selatan )
2.	Balikpapan Barat	1.750	❖ Tersebar di tepi pantai dari kemantis – Teluk Waru - Teluk Tebang – Tanjung Batu (Kariangau) ❖ Tersebar di tepi sungai Lempasuang, S. Berenga, S. Tengah, S. Pada, S. Makasar, S. Wain Kiri, S. Wain Tengah, S.Wain Besar & S. Sumber ( bagian utara ) ❖ Tersebar di tepi pantai di Margasari & Margomulyo
3.	Balikpapan Timur	90	❖ Tersebar di tepi pantai Lamaru – Teritip ❖ Tersebar di tepi sungai Manggar Besar, S.Aji Raden, S. Selok Api
4.	Balikpapan Selatan		Di tepi pantai melawai
	Jumlah	1.888	

Sumber: Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Kota Balikpapan (2011)

Ekosistem mangrove di kedua wilayah pesisir Teluk Adang dan Apar Kabupaten Paser merupakan salah satu ekosistem mangrove terbaik yang ada di Indonesia. Keanekaragaman dan keragaman ekosistem mangrove di kedua kawasan tersebut sangat tinggi, hal ini menjadi salah satu alasan kedua kawasan teluk ini dijadikan kawasan Cagar Alam sehingga kondisi hutan mangrove yang memiliki fungsi ekologi dan ekonomi tinggi tetap lestari. Luas total hutan mangrove yang terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Paser adalah 54.116 ha yang tersebar di kedua kawasan teluk tersebut.

Hasil pengolahan data citra Landsat Tim RZWP3K Kabupaten Paser 2013 untuk luasan mangrove Kabupaten Paser yang semakin berkurang menunjukkan kecenderungan bahwa semakin bertambahnya waktu maka luasan mangrove di kabupaten ini semakin menyusut. Penyusutan hutan mangrove di kedua kawasan teluk tersebut lebih banyak disebabkan karena faktor manusia, salah satunya adalah pengalihan pemanfaatan lahan menjadi kawasan pertambakan dan pemukiman. Di beberapa lokasi, kerusakan ekosistem mangrove yang dikonversi hanya menyisakan mangrove yang sangat tipis yang memisahkan antara tambak dengan laut.

Kawasan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Paser umumnya terdiri atas asosiasi beberapa suku dan jenis mangrove maupun vegetasi lainnya yang mempunyai kemampuan adaptasi terhadap lingkungan fisik kawasan. Di kabupaten ini terdapat 8 (delapan) jenis dari 5 (lima) suku vegetasi mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir Kabupaten Paser.

### **Ekosistem Terumbu Karang**

Terumbu karang merupakan ekosistem khas yang terdapat di daerah tropis. Meskipun terumbu karang ditemukan di seluruh perairan dunia, tetapi hanya di daerah tropis terumbu karang dapat berkembang dengan baik. Di dunia terdapat dua kelompok karang yaitu karang hermatifik dan ahermatifik. Perbedaan kedua kelompok karang ini terletak pada kemampuan karang hermatifik dalam menghasilkan terumbu. Kemampuan dalam menghasilkan terumbu ini disebabkan oleh adanya sel-sel tumbuhan yang bersimbiosis di dalam jaringan hermatifik. Sel-sel tumbuhan ini dinamakan zooxanthellae. Karang hermatifik hanya ditemukan di daerah tropis, sedangkan karang ahermatifik tersebar di seluruh dunia.

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas organik yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan terumbu untuk menahan nutrient dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung segala masukan dari luar. Keberadaan terumbu karang dengan berbagai fungsinya sangat penting untuk dipertahankan. Fungsi tersebut diantaranya mampu melindungi pulau-pulau kecil dari terpaan ombak, tempat beristirahat dan makan bagi penyu, serta tempat berlindungnya ikan-ikan.

Sebagai suatu ekosistem terumbu karang memiliki komponen-komponen sebagaimana ekosistem lain yaitu komponen biotik dan abiotik. Secara umum, pada ekosistem perairan komponen biotik yang berperan adalah tumbuhan hijau (produser), bermacam-macam kelompok hewan (konsumer) dan bakteri (dekomposer). Pada ekosistem terumbu karang, komponen produser utama adalah algae dari kelas dinophyceae yang disebut zooxanthellae yang hidup bersimbiosis dengan binatang karang, disamping beberapa jenis algae yang hidup berasosiasi dengan terumbu karang. Sangat banyak komponen biotik yang menempati ekosistem terumbu karang terutama adalah hewan karang itu sendiri yang sangat banyak jumlah dan jenisnya.

Selain itu, banyak jenis hewan yang berasosiasi dengan ekosistem ini antara lain ikan-ikan karang, Moluska, sponge, berbagai jenis echinodermata, dan berbagai jenis algae. Komponen abiotik meliputi unsur dan senyawa baik organik maupun anorganik dan parameter lingkungan berupa temperatur, oksigen, nutrien dan faktor fisik lain yang membatasi kondisi kehidupan. Komponen-komponen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Keterkaitan antar komponen-komponen tersebut sangat erat sehingga perubahan salah satu komponen tersebut dapat berakibat pada berubahnya kondisi ekosistem. Keseimbangan ekosistem akan selalu terjaga bila komponen-komponen tersebut tetap berada pada kondisi stabil dan dinamis.

Luas ekosistem terumbu karang di Kalimantan Timur tercatat sebesar 782.775,53 hektar. Adapun kualitas terumbu karang di wilayah ini bervariasi dari yang kondisi baik, sedang dan rusak. Terumbu karang terluas berada di Kabupaten Kutai Timur seluas 680.198 hektar (86,9%) diikuti oleh Kabupaten Berau seluas 99.700 hektar (12,7%) dan yang paling sedikit berada di Kota Balikpapan seluas 7 hektar.

Tabel 2.9. Luas Terumbu Karang di Provinsi Kalimantan Timur

<b>Berau</b>	99.700	12,7367
<b>Kutai Timur</b>	680.198	86,8957
<b>Bontang</b>	2.778,02	0,3549
<b>Kutai Kartanegara</b>	32,21	0,0041
<b>Balikpapan</b>	7	0,0009
<b>Penajam Paser Utara</b>	57	0,0073
<b>Paser</b>	3,3	0,0004
<b>Total Luas</b>	782.775,53	100,00

Terumbu karang di wilayah laut Berau tersebar luas pada seluruh pulau dan gosong yang ada di bagian utara dan selatan. Gosong-gosong yang ada di bagian utara adalah Gosong Mangkalasa, Gosong Masimbung, Gosong Buliulin, Gosong Pinaka, Gosong Tababinga, Gosong Lintang, Gosong Muaras dan Gosong Malalungun. Sedangkan gosong yang ada di bagian selatan adalah Gosong Besar/Sapitan, Gosong Dangkalahan dan Gosong Paninsinan. Tipe terumbu karang di wilayah laut Berau terdiri atas karang tepi, karang penghalang dan atol. Beberapa atol ada yang telah terbentuk menjadi pulau dan ada yang terbentuk menjadi danau air asin. Atol yang terdapat di bagian utara yaitu Pulau Kakaban, Pulau Maratua dan Gosong Muaras. Luas Atol Kakaban adalah 19 km<sup>2</sup>, Atol Maratua 690 km<sup>2</sup>, dan Atol Muaras 288 km<sup>2</sup>.

Kondisi terumbu karang di Kabupaten Kutai Timur memperlihatkan bahwa kategori bentuk pertumbuhan (lifeform) karang di wilayah pesisir laut Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Acropora Branching (ACB), Acropora Tabulate (ACT), Acropora Submassive (ACS), Acropora Digitate (ACD), Coral Foliose (CF), Coral Heliopora (CHL), Coral Millepora (CME), Coral Submassive (CS), Coral Massive (CM), Coral Mushroom (CMR). Kategori fauna lainnya (Others Fauna) yang ditemukan antara lain Soft Corals (SC), Sponge (SP), Coralline Algae (CA), Turf Algae (TA), Algae Assemblage (AA). Kategori abiotik yang ditemukan saat pengamatan antara lain Sand (S), Rubble (R), Silt (SI) dan Rock (RCK).

Hasil pengamatan di lapangan menemukan adanya keberadaan spot-spot karang di Kecamatan Teluk Pandan. Kategori lifeform karang yang terdapat di Kecamatan Teluk Pandan terdiri dari Acropora Branching (ACB) dan Coral Massive (CM). Kategori fauna lainnya (Others Fauna) yang ditemukan antara lain Soft Corals (SC), Coralline Algae (CA),

Turf Algae (TA), Algae Assemblage (AA). Sedangkan kategori abiotik yang ditemukan saat pengamatan antara lain Sand (S), Rubble (R), Silt (SI) dan Rock (RCK).

Selanjutnya untuk pengamatan karang di Kecamatan Sengata Selatan ditemukan dua spot keberadaan karang, dengan kategori lifeform karang serupa dengan karang yang ada di Kecamatan Teluk Pandan, yaitu terdiri dari Acropora Branching (ACB) dan Coral Massive (CM). Kategori fauna lainnya (Others Fauna) yang ditemukan antara lain Soft Corals (SC), Coralline Algae (CA), Algae Assemblage (AA). Sedangkan kategori abiotik yang ditemukan saat pengamatan antara lain Sand (S), Rubble (R), Silt (SI) dan Rock (RCK). Kondisi karang di Kecamatan Sengata Selatan dalam kondisi rusak berat dan mengalami kematian. Penyebab utama kerusakan terumbu karang disebabkan oleh kegiatan pemboman dan proses siltation.

Distribusi luas terumbu karang pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

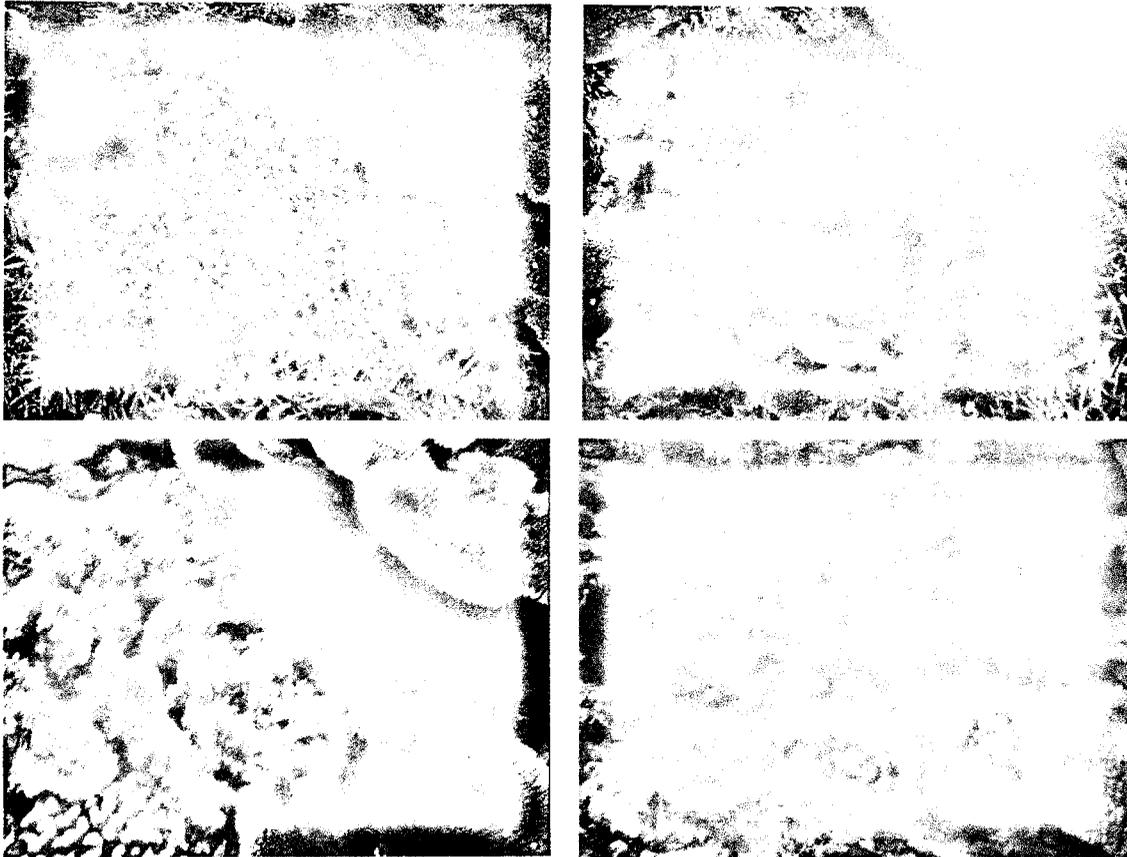
Tabel 2.10. Distribusi dan Luas Terumbu Karang di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Teluk Pandan	148,939
2.	Kaliorang	36.697
3.	Sandaran	44.698
4.	Sengata Selatan	8.208
5.	Sengata Utara	15,34
6.	Sangkulirang	426.316
	Jumlah	680.198

Pada umumnya ekosistem terumbu karang di kawasan pesisir dan laut Kota Bontang berada dalam radius 1,5 – 2 mil laut pada posisi yang berhadapan dengan pabrik PKT dan PT. Badak NGL. Rata-rata persentase tutupan karang dalam kategori sedang (berkisar 30 – 50 %). Sedangkan untuk lokasi yang lebih dari 2 mil laut, persentase tutupan karang lebih dari 50% seperti yang terlihat di wilayah Gosong Karang Segajah, Beras Basah dan Kedindingan. Luas terumbu karang Kota Bontang adalah seluas 2.778,02 hektar terdiri dari 252,63 hektar dalam kondisi baik, 902,1 hektar dalam kondisi sedang dan seluas 1.653,29 hektar terumbu karang dalam kondisi rusak.

Ekosistem terumbu karang dalam radius 1,5 – 2 mil umumnya merupakan kumpulan pecahan karang dan karang mati dengan dominasi substrat pasir. Sebagian besar terumbu karang mempunyai jenis karang berbentuk massive dan sub-massive yang disebabkan oleh pengaruh polutan berupa sedimen. Sedimentasi yang terjadi kemungkinan berasal dari

bahan-bahan organik. Hal ini terbukti dari kandungan padatan tersuspensi yang semakin kecil ke arah laut lepas. Kondisi sedimentasi ini menyebabkan dominasi tumbuhnya karang jenis *Porites cylidrica* atau karang foliose (*Montipora foliose*) yang merupakan jenis karang hidup di perairan keruh akibat bahan organik tersebut. Penyebab kekeruhan mungkin berasal dari hancuran tumbuhan lamun atau mangrove yang telah mati mengingat ekosistem terumbu karang lokasinya berdekatan dan berinteraksi dengan lamun maupun mangrove.



Gambar 2.5. Kondisi karang di Pulau Birah-Birahan Kabupaten Kutai Timur

Luas terumbu karang di Kota Bontang tercatat seluas 2.778,02 ha dengan rincian sebagai berikut 252,63 ha dengan kondisi baik, 9.02,1 ha dengan kondisi sedang dan seluas 1,653,29 ha telah mengalami kerusakan. Sebaran terumbu karang di Kota Bontang berada di Melahing, P. Agar-agar, P. Beras Basah, P. Karangkiampu, P. Kedindingan, P. Manuk-manukan, P. Tebak Batang, Sapa Segajah, Selangan, Tihik-tihik dan Tj. Sekubur

Keberadaan terumbu karang tercatat ditemukan di ketiga kecamatan pesisir, yaitu Kecamatan Marangkayu, Muara Badak (sekitar 50 persen dari 7 gugusan terumbu karang di perairan Samberah telah rusak) dan Kecamatan Samboja. Kondisi terumbu karang di ketiga kecamatan tersebut secara aktual sudah mengalami banyak tekanan dan memiliki kecenderungan mulai rusak yang disebabkan adanya pengaruh turunan dari kegiatan di

wilayah daratan dan juga akibat dampak langsung dari perikanan yang destruktif. Secara aktual performa terumbu karang di wilayah perairan pesisir samboja masuk pada kategori rusak/buruk hingga rusak/sedang dengan luas hamparan tereskpose diinterpretasikan sebagai berikut:

Perairan pesisir Senipah, Pemedas dan Tanjung Harapan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah perairan muara, sehingga sebagian besar masyarakat berbagai kalangan menganggap bahwa di perairan tersebut tidak memiliki dan atau sudah dianggap tidak memiliki ekosistem karang. Namun kenyataannya, hasil studi menunjukkan bahwa perairan Kecamatan Samboja tersebut masih memiliki ekosistem terumbu karang yang tersebar di sepanjang garis pantai Senipah, Pemedas dan Tanjung Harapan,

Gugusan-gugusan terumbu karang di perairan Kecamatan Samboja sejajar dengan garis pantai, hanya ada beberapa titik gugusan yang terdapat lebih jauh dari garis pantai. Bentuk formasi demikian umumnya dikenal dengan terminologi Karang Tepi (Fringing Reef). Formasi demikian memberikan dampak positif terhadap keamanan dan perlindungan pantai dari faktor hidrodinamika laut yang dapat mengakibatkan erosi dan abrasi pantai. Oleh karena itu, tingkat keamanan dan perlindungan pantai tersebut ditentukan oleh kondisi terumbu karang. Semakin sehat kondisi terumbu karang semakin baik atau semakin tinggi tingkat keamanan dan perlindungan pantai.

Berdasarkan sebaran gugusan terumbu karang, kondisi baik-buruknya karang tidak tergantung pada jarak dekat dan jauhnya dari garis pantai. Hal ini dikarenakan kompleksnya aspek hidrodinamika di perairan pantai. Pada dasarnya, arus Selat Makasar bergerak dari Utara ke Selatan, tetapi ketika arus air tersebut mengarah ke daerah pantai, maka arus di daerah pantai menjadi lebih kompleks.

Secara keseluruhan perairan pesisir Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki hamparan terumbu karang seluas 32,21 ha yang tersebar pada  $\pm$  3 gugusan karang. Luas hamparan terumbu karang yang terdapat di perairan Senipah sekitar 3,47 % atau  $\pm$  1,12 ha. Sekitar 55,12 % atau  $\pm$  17,75 ha terdapat di Pemedas, sedangkan luas hamparan terumbu karang yang terdapat di perairan Tanjung Harapan adalah sebesar 41,41 % atau  $\pm$  13,34 ha.

Genus terumbu karang yang ditemukan di perairan Senipah terdiri atas Favites, Hydnothophora, Montipora, Porites dan Turbinaria. Di perairan Pemedas, genus terumbu karang yang ditemukan terdiri atas Favia, Favites, Hydnothophora, Montipora, Platygyra, Porites, Stylophora dan Turbinaria, sedangkan genus terumbu karang yang ditemukan di perairan Tanjung Harapan terdiri atas Acanthastrea, Diploria, Favia, Favites, Montipora, Oulophyllia, Pavona, Pectinia, Platygyra, Porites dan Symphyllia

Sebagian besar terumbu karang di sepanjang pantai Kota Balikpapan mengalami kerusakan bahkan telah punah. Sampai saat ini potensi terumbu karang yang masih tersedia tersebar diseluruh kawasan pantai Kota Balikpapan dalam radius 4 mil tercatat seluas 0,07 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari:

- ☒ Pantai Manggar ± 0,02 km<sup>2</sup>
- ☒ Pantai Batakan (PT.HH) ± 0,01 km<sup>2</sup>
- ☒ Pantai Stal Kuda (Brimob) ± 0,01 km<sup>2</sup>
- ☒ Pesisir (antara Teritip dan Teluk Balikpapan) ± 0,03 km<sup>2</sup>

Ekosistem terumbu karang di Kabupaten Paser ditemukan di Gosong Desa Sungai Batu dan Gosong Tiga Desa Tanjung Harapan. Kondisi terumbu karang pada Gosong Desa Sungai Batu pada saat pengambilan data sudah tertutupi oleh lapisan sedimen dan alga. Hal ini disebabkan oleh tingginya sedimentasi yang terjadi akibat adanya pembukaan lahan di pesisir pantai Desa Sungai Batu. Proses sedimentasi akibat pembukaan lahan ini diperkirakan telah terjadi sejak tahun 1980-an. Proses yang telah terjadi sekitar 20 tahun inilah yang menyebabkan kondisi karang di lokasi ini telah berubah menjadi tutupan lumpur.

Kategori karang pada kedalaman 3 meter di lokasi Gosong Tiga Desa Tanjung Harapan didominasi oleh *Acropora Tubulate* (ACT) dengan persentase 29.2 %, lalu diikuti *Acropora Branching* (ACB) 21.5 % dan Patahan Karang/RubbleTHE 23.6 %. Pada kedalaman 3 meter ini, kondisi terumbu karang termasuk dalam kategori tutupan karang cukup baik. Secara visualisasi, hal ini disebabkan oleh kualitas perairan yang mendukung pertumbuhan terumbu karang seperti kecerahan dan salinitas. Hal ini karena letak dari spot karang ini cukup jauh dari daratan (sekitar 4 mil laut).

Kategori karang pada kedalaman 5 meter di lokasi ini didominasi oleh komponen abiotik yaitu pasir (S) dengan persentase 47 %, lalu diikuti Patahan Karang/RubbleTHE 18.7 % dan *Acropora Submassive* (ACS) 12.2 %. Pada kedalaman 5 meter ini, kondisi terumbu karang termasuk dalam kategori tutupan karang buruk. Rendahnya daya pandang (visibilitas) dan tingginya sedimentasi menyebabkan rendahnya tutupan karang dan banyaknya karang-karang yang mati.

### **Ekosistem Padang Lamun**

Lamun (*seagrass*) adalah tumbuhan berbunga yang hidup di perairan dangkal (sub Litoral). Terdiri dari daun-daun yang panjang, tipis mirip pita dan memiliki saluran-saluran air serta bentuk pertumbuhannya monopodial dari rhizome (Nybakken, 1988). Lamun memberikan perlindungan dan tempat untuk berbagai hewan dan tumbuhan renik. Komunitas flora dan

fauna lamun mempunyai komposisi yang khas. Daun-daunnya mendukung sejumlah organisme spesifik dengan suatu substrat yang cocok untuk menempel (Nybakken, 1988).

Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga (angiospermae) yang memiliki rhizome, daun dan akar sejati yang hidup terpendam dalam laut. Lamun mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah (propagule) yang dihasilkan secara seksual (diocious) (Mann, 2000). Lamun mempunyai batang, akar, daun, bunga, serta dilengkapi dengan hijau daun untuk proses fotosintesa. Agar proses fotosintesa berjalan optimal, lamun perlu sinar matahari yang cukup karena itu lamun tumbuh baik di perairan dangkal yang berair jernih sampai kedalaman sekitar 40 m. Namun lamun masih juga dapat dijumpai tumbuh di perairan yang airnya relatif keruh. Di daerah pasang surut, lamun tetap dapat bertahan, kendatipun daun-daunnya di jemur di terik matahari pada waktu air surut rendah. Bagian daun yang muncul di atas muka air boleh mengering, namun rimpang (rihzoema) dan akarnya tetap bertahan hidup. Sementara itu rimpang dan akarnya mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tipe dasar perairan, sehingga mereka dapat tumbuh di dasar pasir, Lumpur atau bahkan di pecahan karang mati ataupun juga dicampuran ketiganya (Anonim, 2003).

Secara ekologis ekosistem lamun memiliki fungsi penting bagi wilayah pesisir, yaitu: (1) Sumber utama produktivitas primer; (2) Sumber makanan bagi organisme, misalnya penyu; (3) Menstabilkan dasar yang lunak; (4) Tempat berlindung organisme dari predator; (5) Tempat pembesaran beberapa spesies ikan; (6) Peredam arus; dan (7) Tudung pelindung sinar panas matahari bagi penghuninya.

Luas ekosistem padang lamun di Kalimantan Timur tercatat sebesar 508.551 hektar. Adapun kualitas padang lamun di wilayah ini bervariasi dari yang kondisi baik, sedang dan rusak. Padang lamun terluas berada di Kota Bontang seluas 478.304 hektar (94,05%) diikuti oleh Kabupaten Berau seluas 30.000 hektar (5,89%).

Tabel 2.11. Luas Padang Lamun di Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten/Kota	Luas Padang Lamun (Ha)	Persentase (%)
Berau	30.000	5,8991
Kutai Timur	181,01	0,0356
Bontang	478.304	94,0523
Kutai Kartanegara	-	-
Balikpapan	16	0,0031
Penajam Paser Utara	50	0,0098
Paser	-	-
<b>Total Luas</b>	<b>508.551</b>	

Padang lamun (*seagrass-meadows*) atau hamparan lamun ditemukan tersebar di seluruh pesisir Berau dengan kondisi yang berbeda, dengan rata-rata luas tutupan kurang dari 10 % sampai 80 %. Luas tutupan padang lamun yang rendah (<10 %) dapat dijumpai pada daerah-daerah yang banyak mendapat gangguan, seperti terbuka pada surut terendah, sedangkan yang mempunyai luas tutupan tinggi (20 % - 80 %) terdapat pada daerah yang selalu tergenang dan terlindung. Berdasarkan survey tahun 2003 (TNC, 2003) terdapat 8 spesies lamun yang ditemukan di pesisir Berau yaitu: *Halodule uninervis*, *H. pinifolia*, *Cyamodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Halophila ovata* dan *Halophila ovalis*.

Penyabaran padang lamun di wilayah pesisir Kabupaten Berau dapat ditemukan di sebagian besar pulau-pulau kecil di utara dan selatan. Padang lamun di Pulau Panjang dapat ditemukan di sekeliling Pulau Panjang. Spesies yang ditemukan sebanyak 7 spesies yaitu; *Enhalus acoroidea*, *Thalasia hemprichii*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *Cyamodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Halodule pinifolia*, dengan jenis yang dominan adalah *Halodule uninervis* dan *Halodule pinifolia*. Penutupan padang lamun di Pulau Panjang berkisar antara 5 sampai 40 %. Di Pulau Derawan terdapat 6 spesies lamun yang dapat ditemukan di sekeliling pulau, yaitu; *Thalasia hemprichii*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *Cyamodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Halodule pinifolia*, dengan jenis dominan *Thalasia hemprichii* dan *Halophila ovalis*. Penutupan padang lamun di Pulau Derawan berkisar antara < 5 % sampai 50 %.

Padang lamun di Pulau Semama dapat ditemukan di sekeliling pulau dengan penutupan hampir rata sekitar 10%. Spesies yang dapat ditemukan adalah *Enhalus acroides*, *Thalasia hemprichii*, *Cyamodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, dan *Halophila ovalis*, dengan spesies dominan *Cyamodocea rotundata* dan *Halophila ovalis*. Padang Lamun di Pulau Sangalaki terdapat 5 spesies yang terdiri dari *Thalasia hemprichii*, *Cyamodocea rotundata*, *Halophila ovalis*, *Enhalus acroides*, dan *Halodule uninervis*, dengan spesies dominan *Halophila ovalis*. Penutupan padang lamun di Pulau Sangalaki berkisar antara 10 sampai 20 %. Sedangkan padang lamun di Pulau Kakaban dapat ditemukan di sebelah barat pulau yang mempunyai pantai relatif landai dengan penutupan hampir rata, sekitar 5 %. Spesies yang ditemukan adalah *Halophila ovalis* dan *Halodule uninervis*.

Padang lamun di Pulau Maratua dapat ditemukan di Teluk Pea, Payung payung, Bohe Bukut, dan Tanjung Bawa. Penutupan padang lamun di Pulau Maratua berkisar antara 5 sampai 80 %. Spesies yang ditemukan adalah *Halodule uninervis*, *H. pinifolia*, *Cyamodocea rotundata*, *Syringodium isoetifolium*, *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Halophila ovata* dan *Halophila ovalis*. Padang lamun pada daerah selatan hanya ditemukan pada pulau Mataha, Bilangbilangan, Belambangan, Balikukup, Manimbora, Buaya-buaya, Kaniungan

Kecil dan Kaniungan Besar. Sedangkan pada pulau Sambit tidak ditemukan habitat padang lamun. Padang lamun di pulau Belambangan dapat ditemukan di sebelah barat pulau dengan penutupan berkisar antara 10 sampai 15 %. Spesies yang ditemukan adalah *Halodule univernis*, *Halophila ovata* dan *Halophila ovalis*.

Ekosistem padang lamun di Kabupaten Kutai Timur ditemukan pada Kecamatan Teluk Pandan, Sengata Selatan, Sengata Utara, Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran. Jenis lamun yang ditemukan umumnya adalah *Enhalus acoroides* dan *Thalassia hemprichii*, khusus Pulau Birah-Birahan jenis yang ditemukan adalah *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii* dan *Cymodocea serrulata*.

Pulau Birah-Birahan di Kecamatan Sandaran merupakan pulau yang menjadi tempat penyusuk untuk bertelur. Pulau Birah-birahan sekaligus juga sebagai tempat mencari makan bagi biota laut lainnya, seperti ikan beronang yang berimplikasi akan menambah lengkapnya jaring-jaring makanan (*food web*) dari sejumlah komunitas organisme yang ada.

Tabel 2.12. Distribusi dan Luas Padang Lamun di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Teluk Pandan	164,26
2.	Sengata Selatan	16,75
	Jumlah	181,01

Ada 2 jenis spesies lamun yang terdapat di wilayah pesisir Kota Bontang yaitu *Enhalus sp.* dan *Thalassia sp.* Jenis *Enhalus sp.* tersebar cukup merata dengan hamparan yang luas yaitu di sebelah timur P. Badak-badak, sebelah selatan Bontang Kuala, sekitar P. Agar-agar, dekat Desa Selangan Laut, di Karang Kiampau, dan di dekat Dusun Tihik-tihik. Kerapatan lamun spesies *Enhalus sp.* ini berkisar antara 12 sampai 49 koloni/m<sup>2</sup>.

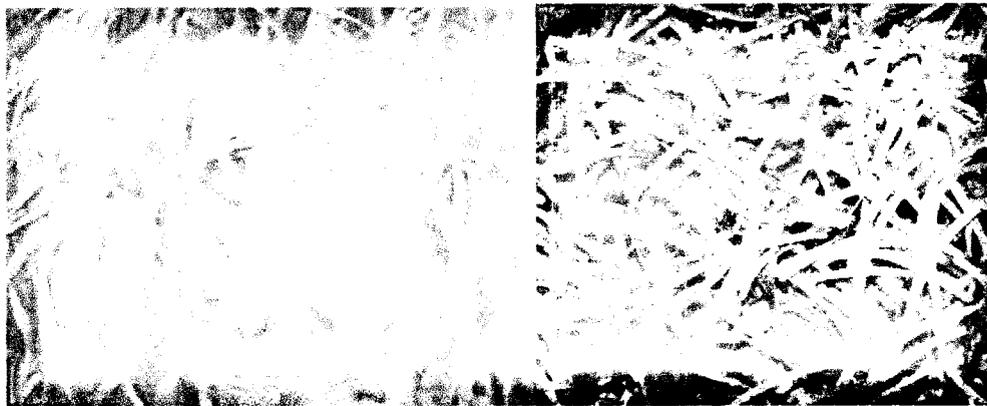
Jenis *Thalassia sp.* tidak tersebar merata. Jenis ini hanya terdapat di sebelah timur Pulau Agar-agar dengan kerapatan 30 koloni/m<sup>2</sup>. Faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap penyebaran lamun adalah kondisi dasar perairan. Secara umum, substrat dasar perairan di wilayah pesisir Kota Bontang adalah lumpur berpasir. Hal ini berkaitan erat dengan bentuk pantai yang landai dan relatif tenang sehingga memungkinkan bagi lamun untuk tumbuh dan berkembang.

Adapun distribusi dan luas padang lamun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Bontang disajikan pada Tabel

Tabel 2.13. Luasan Padang Lamun di Kota Bontang

No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Api Api	0.822
2	Berbas Pantai	0.540
3	Bontang Kuala	26.088
4	Bontang Lestari	41.461

No	Lokasi	Luas (ha)
5	Guntung	58.915
6	Gunung Elai	2.070
7	Kep. Badak	13.361
8	Loktuan	1.800
9	P. Tebak Batang	27.170
10	P. Agar-agar	4.285
11	P. Beras Basah	3.476
12	P. Gusung	4.050
13	P. Karang Kiampau	13.922
14	P. Kedindingan	30.819
15	P. Manuk-manukan	11.479
16	P. Melahing	16.093
17	P. Sianca	14.089
18	P. Tebak Batang	26.162
19	Sapa Pasikan	0.180
20	Sapa Segajah	4.303
21	Sapa Sepitan	0.441
22	Sapa Tambu	0.243
23	Satimpo	2.293
24	P. Selangan- P. Tihik-tihik	35.021
25	Tanjung Laut Indah	29.424
26	Tj. Kuya	11.046
27	Tj. Merangas	13.056
28	Tj. Sekadang	80.470
29	Tj. Sigurancing	5.226
	Total	478.304



A

B

Gambar 2.6 Jenis *Enhalus* (A), dan *Halodule* (B) di Selangan Kota Bontang

Luas zona padang lamun yang ada di Kota Balikpapan keseluruhan adalah 16 ha yaitu terdiri dari 15 ha ditemukan di perairan Kecamatan Balikpapan Barat dan 1 ha ditemukan di perairan Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur. Prosentase penutupan lamun yang ada masih sangat kecil, yakni antara 3,5 – 7,2 % (Teritip), 0 – 3% (Lamaru), 0 – 4 % (Manggar), 3,6 – 10,8 % (Sepinggan) dan 0 – 5,5 % (Pulau Tukung).

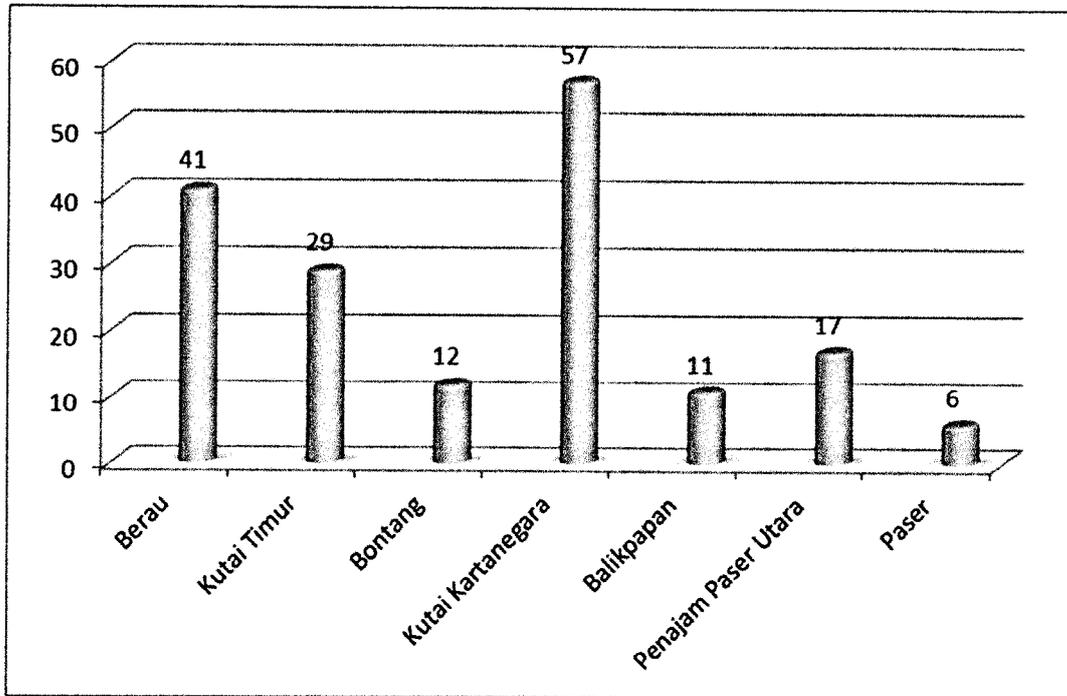
Secara spasial padang lamun di pesisir Kutai Kartanegara relatif terbatas, baik jumlah jenis maupun kerapatannya. Padang lamun di wilayah pesisir Kutai Kartanegara hanya ditemukan di 3 kecamatan pesisir, antara lain; Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Samboja itupun kondisinya sudah mengalami degradasi. Hal ini wajar terjadi, karena telah terjadi konversi hutan mangrove menjadi lahan tambak, pemukiman, MIGAS dan lain-lain sehingga pengaruh beban masukan dari daratan berupa sedimen mempengaruhi kelangsungan hidup vegetasi lamun. Kondisi ini apabila tidak segera diantisipasi maka akan berdampak lebih lanjut mengarah pada kerusakan terumbu karang sehingga perlu segera ditangani berupa rehabilitasi hutan mangrove yang mengalami kerusakan.

### **Pulau-pulau Kecil**

Pulau-pulau kecil memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan pesisir. Kawasan ini menyediakan sumberdaya alam seperti terumbu karang, padang lamun (seagrass), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi. Pulau-pulau kecil juga memberikan jasa lingkungan yang besar karena keindahan alam yang dimilikinya yang dapat menggerakkan industri pariwisata. Di lain pihak, pemanfaatan potensi pulau-pulau kecil masih belum optimal akibat perhatian dan kebijakan Pemerintah selama ini yang lebih berorientasi ke darat.

Kondisi pulau yang ada di Kalimantan Timur pada tahun 2013 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjumlah 173 buah baik yang berpenghuni dan tidak berpenghuni. Kabupaten Kutai Kartanegara menyumbang pulau-pulau kecil terbanyak sebesar 57 buah, diikuti oleh Kabupaten Berau 41 buah dan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 29 buah. Selengkapnya mengenai jumlah pulau-pulau kecil di Kalimantan Timur dikemukakan pada Gambar 2.7 di bawah ini.

Pulau-pulau kecil yang terletak di daerah pesisir dan laut Kabupaten Berau berjumlah sebanyak empat puluh satu (41) pulau (BPS Kab Berau, 2012,) yang meliputi pulau delta kontinental atau pulau yang pernah terhubung dengan daratan utama dan pulau oseanik yang tidak pernah terhubung dengan daratan utama. Selain itu juga terdapat beberapa gosong dan atoll yang tersebar di perairan Kabupaten Berau. Pulau-pulau oseanik tersebar di bagian utara dan selatan perairan laut Kabupaten Berau. Pulau-pulau tersebut tersebar pada 4 kecamatan pesisir, yaitu di Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua di bagian utara, dan di Kecamatan Batu Putih dan Biduk-biduk di bagian selatan. Dari



Gambar 2.7. Jumlah Pulau-pulau Kecil di Provinsi Kalimantan Timur

41 pulau tersebut yang berpenghuni hanya 4 pulau, yaitu Pulau Derawan, Maratua, Kaniungan Besar dan Balikpapan. Wilayah perencanaan Zonasi ini juga meliputi 37 pulau-pulau kecil lainnya yang tidak berpenduduk diantaranya adalah Pulau Sangalaki, Pulau Semama, Pulau Panjang, Pulau Rabu-Rabu, Pulau Kakaban, Pulau Sambit, Pulau Mataha, Pulau Bilang-Bilangan, Pulau Belambangan, Pulau Manimbora dan Pulau Kaniungan Kecil dan pulau-pulau lainnya.

Tabel 2.14. Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Berau

No.	Nama Pulau	Berpenghuni (B) atau Tidak Berpenghuni (TBP)
1.	Aji, Pulau	TBP
2.	Andongabu, Pulau	TBP
3.	Babanir Baru, Pulau	TBP
4.	Badakbadak, Pulau	TBP
5.	Bakungan Diki, Pulau	TBP
6.	Bakungan Hea, Pulau	TBP
7.	Balambangan, Pulau	TBP
8.	Balikkukup, Pulau	BP
9.	Bangkai, Pulau	TBP
10.	Besar, Pulau	TBP
11.	Besing, Pulau	TBP
12.	Bilangbilangan, Pulau	TBP
13.	Bingkar, Pulau	TBP
14.	Bonggong Besar, Pulau	TBP
15.	Bonggong Kecil, Pulau	TBP

Bermembuat (B) atau Tidak Bermembuat (TBP)	
16.	Bulanbulan, <i>Pulau</i> TBP
17.	Bulingisan, <i>Pulau</i> TBP
18.	Bunglalang, <i>Pulau</i> TBP
19.	Derawan, <i>Pulau</i> BP
20.	Guntung, <i>Pulau</i> TBP
21.	Gurimbang, <i>Pulau</i> TBP
22.	Kakaban, <i>Pulau</i> TBP
23.	Kamagi Lekkat, <i>Pulau</i> TBP
24.	Kamagi Pikkit, <i>Pulau</i> TBP
25.	Kaniungan Besar, <i>Pulau</i> BP
26.	Kaniungan Kecil, <i>Pulau</i> TBP
27.	Karangtimbul, <i>Pulau</i> TBP
28.	Kokok, <i>Pulau</i> TBP
29.	Labatan, <i>Pulau</i> TBP
30.	Labulabu, <i>Pulau</i> TBP
31.	Lakitkuhita, <i>Pulau</i> TBP
32.	Lalawan, <i>Pulau</i> TBP
33.	Lungsurannaga, <i>Pulau</i> TBP
15.	Manambula, <i>Pulau</i> TBP
34.	Manimbora, <i>Pulau</i> TBP
35.	Maratua, <i>Pulau</i> BP, ada mercusuar
36.	Mataha, <i>Pulau</i> TBP
37.	Nakal, <i>Pulau</i> TBP
38.	Pabahanan, <i>Pulau</i> TBP
39.	Padai, <i>Pulau</i> TBP
40.	Panjang, <i>Pulau</i> TBP
41.	Payau, <i>Pulau</i> TBP
42.	Peapea, <i>Pulau</i> BP
43.	Rampien, <i>Pulau</i> TBP
44.	Samama, <i>Pulau</i> TBP
45.	Sambit, <i>Pulau</i> TBP, ada mercusuar
46.	Sangalaki, <i>Pulau</i> TBP
47.	Sangalan Diki, <i>Pulau</i> TBP
48.	Sangalan Hea, <i>Pulau</i> TBP
49.	Semut, <i>Pulau</i> TBP
50.	Sentubung, <i>Pulau</i> TBP
51.	Serundung, <i>Pulau</i> TBP
52.	Sialod, <i>Pulau</i> TBP
53.	Siappung, <i>Pulau</i> TBP
54.	Sibela, <i>Pulau</i> TBP
55.	Sibilambay, <i>Pulau</i> TBP
56.	Siddau, <i>Pulau</i> TBP
57.	Sigending Besar, <i>Pulau</i> TBP
58.	Sigending Kecil, <i>Pulau</i> TBP

Bermendungi (BM) atau Tidak Bermendungi (TBM)	
59	Sodang Besar, Pulau TBP
60	Solok, Pulau TBP
61	Talisapan, Pulau TBP
62	Tangkapanan, Pulau TBP
63	Tanjungbuayabuaya, Pulau TBP
64	Telasau, Pulau TBP
65	Tempurung, Pulau TBP
66	Tidung, Pulau TBP
67	Uraban, Pulau TBP

Jumlah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kutai Timur tercatat sebanyak 29 buah yang berada di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran. Luas keseluruhan pulau-pulau kecil di kabupaten ini diketahui seluas 5.219,64 hektar (Tabel 2.15).

Tabel 2.15. Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Kutai Timur

No	Nama Pulau	Luas (Ha)	Kecamatan
1	P. Miang Besar	727,00	Sangkulirang
2	P. Miang Kecil	83,01	Sangkulirang
3	P. Rinding	137,34	Sangkulirang
4	P. Serai	6,22	Sangkulirang
5	P. Sanumpak	45,88	Sangkulirang
6	P. Bajau	5,53	Sangkulirang
7	P. Hantu	24,00	Sangkulirang
8	P. Jopang	175,23	Sangkulirang
9	P. Sangkuang	1.754,58	Sangkulirang
10	P. Tobo 1	0,26	Sangkulirang
11	P. Tobo 2	0,78	Sangkulirang
12	P. Peti	10,96	Sangkulirang
13	P. Panjang	828,28	Sangkulirang
14	P. Panjang	67,00	Sangkulirang
15	P. Rapak	56,72	Sangkulirang
16	P. Tukung	21,45	Sangkulirang
17	P. Mandu	201,40	Sangkulirang
18	P. Rapak	457,03	Sangkulirang
19	P. Tempurung	0,23	Sangkulirang
20	P. Pamantauan	23,60	Sangkulirang
21	P. Belidan	8,87	Sandaran
22	P. Jorong Jorong Selatan	25,49	Sandaran
23	P. Labuan Pinang	4,66	Sandaran
24	P. Jorong Jorong Utara	5,65	Sandaran
25	P. Sitoddo	24,60	Sandaran
26	P. Sitebak	3,34	Sandaran
27	P. Panjang	72,81	Sandaran

No	Nama Pulau	Luas (Ha)	Kecamatan
28	P. Birabirahan	16,62	Sandaran
29	P. Labuan Bilik	1,12	Sandaran
	Luas Total	5.219,64	

Sumber: Kajian Pemetaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kondisi Agroekosistem (2012).

Jumlah pulau-pulau kecil di Kota Bontang adalah 12 buah yang terletak di Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan. Adapun letak geografis pulau-pulau kecil di wilayah ini dikemukakan pada Tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.16. Pulau-pulau Kecil di Kota Bontang

No	Nama Pulau	Koordinat	Kelurahan	Kecamatan
1	Selokia	0° 11' 4,26" U 117° 30' 40,53" T	Guntung Desa Pakuaji	Bontang Utara
2	Kedindingan	0° 5' 9,11" U 117° 33' 21,30" T	Bontang Lestari	Bontang Selatan
3	Pulau Tempurung	0° 4' 47,8" U 117° 33' 31,0" T	Bontang Lestari	Bontang Selatan
4	Beras Basah	0° 3' 50,41" U 117° 33' 32,38" T	Bontang Lestari	Bontang Selatan
5	Tihik-tihik	0° 3' 57,47" U 117° 31' 40,96" T	Bontang Lestari	Bontang Selatan
6	Panjang	0° 3' 51,79" U 117° 31' 4,73" T	Bontang Lestari	Bontang Selatan
7	Tobok-tobok Bontang	0° 7' 50,33" U 117° 31' 29,54" T	Bontang Kuala	Bontang Selatan
8	Agar-agar	0° 7' 52,41" U 117° 31' 45,57" T	Bontang Kuala	Bontang Utara
9	Melahing	0° 6' 32,01" U 117° 31' 14,66" T	Tanjung Laut Indah	
10	Badak-badak	0° 9' 2,63" U 117° 30' 11,95" T	Bontang Kuala	Bontang Utara
11	Tobok Batang	0° 7' 20,62" U 117° 33' 27,62" T	Bontang Kuala	Bontang Utara
12	Siaca	0° 4' 4,59" U 117° 29' 31,34" T	Bontang Lestari	Bontang Selatan

Selanjutnya jumlah pulau-pulau kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 57 buah baik pulau yang berpenghuni maupun tidak. Adapun nama pulau-pulau kecil di wilayah ini dikemukakan pada Tabel 2.16 berikut ini.

Tabel 2.17. Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Pulau	Status (Penghuni/Tidak Penghuni)
1	Bangau, Pulau	TBP
2	Berau, Pulau	TBP
3	Berukang, Pulau	TBP

Bina		
No	Nama Pulau	Kategori
4	Bukuan, Pulau	TBP
5	Burung, Pulau	TBP
6	Cerocok, Pulau	TBP
7	Cok, Pulau	TBP
8	Datu, Pulau	TBP
9	Dinar, Pulau	TBP
10	Gandeng, Pulau	BP
11	Genting Besar, Pulau	TBP
12	Genting Kecil, Pulau	TBP
13	Harapan, Pulau	BP
14	Ilu, Pulau	TBP
15	Jawa, Pulau	TBP
16	Jerang, Pulau	TBP
17	Jopang, Pulau	TBP
18	Kambing, Pulau	TBP
19	Kayumajarang, Pulau	TBP
20	Kelambu, Pulau	TBP
21	Kerbau, Pulau	TBP
22	Kobe, Pulau	BP
23	Kumala, Pulau	BP
24	Lalukena, Pulau	TBP
25	Lantang Kecil, Pulau	TBP
26	Layangan, Pulau	TBP
27	Lerong, Pulau	TBP
28	Letung, Pulau	TBP
29	Merdeka Selatan, Pulau	TBP
30	Merdeka Tengah, Pulau	TBP
31	Merdeka Utara, Pulau	TBP
32	Merdeka, Pulau	TBP
33	Miang, Pulau	TBP
34	Muaraulu, Pulau	TBP
35	Nibung, Pulau	TBP
36	Nubi, Pulau	TBP
37	Pantuan, Pulau	TBP
38	Patin, Pulau	TBP
39	Pegah, Pulau	TBP
40	Penti, Pulau	TBP
41	Perangatan Besar, Pulau	TBP
42	Perangatan Kecil, Pulau	TBP
43	Perangatan, Pulau	TBP
44	Pusa, Pulau	BP
45	Rambairangas, Pulau	TBP
46	Seleteh Kecil, Pulau	TBP
47	Seleteh, Pulau	TBP

Kategori (B) atau Tidak Berkategori (TBP)		
48	Sungaikelambu, Pulau	TBP
49	Tambora, Pulau	TBP
50	Tanjungdewa, Pulau	TBP
51	Telukgenting, Pulau	TBP
52	Tiga Selatan, Pulau	BP
53	Tiga Tengah, Pulau	TBP
54	Tiga Utara, Pulau	TBP
55	Timbangbarukang, Pulau	TBP
56	Tunu, Pulau	TBP
57	Yupa, Pulau	TBP

Kota Balikpapan memiliki 11 pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah pesisir dan laut Teluk Balikpapan dengan luas total 303,19 ha. Pulau yang terluas yaitu Pulau Balang dengan luas 119,81 ha dan Pulau terkecil yaitu Pulau Babi 0,024 ha. Selain itu, terdapat satu pulau yang secara administratif masuk di 2 wilayah Kabupaten/kota yaitu Pulau Balang dimana 119,81 ha masuk ke dalam wilayah administrasi Kota Balikpapan, dan 194,35 ha masuk ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Tabel 2.18. Pulau-Pulau Kecil di Kota Balikpapan

1.	P. Demis	Kel. Kariangau	3,522	1,685	Kawasan konservasi dan/atau budidaya mangrove
2.	P. Lipan	Kel. Kariangau	1,441	0,689	Semak belukar dan sebagian kecil mangrove
3.	P. Lembu	Kel. Kariangau	0,839	0,401	Semak belukar mendominasi pulau ini, sedangkan mangrove hanya tumbuh di pinggir-pinggir pulau
4.	P. Posa	Kel. Kariangau	79,929	38,232	Kawasan mangrove dan tambak
5.	P. Using	Kel. Kariangau	15,983	7,645	Kawasan konservasi mangrove
6.	P. Kemantis	Kel. Kariangau	1,867	0,893	Kawasan wisata mangrove
7.	P. Benawa Besar	Kel. Kariangau	62,870	30,072	Kawasan konservasi mangrove
8.	P. Benawa Kecil	Kel. Kariangau	16,870	8,069	Kawasan konservasi mangrove
9.	P. Balang	Kel. Kariangau	25,660	12,274	Kawasan konservasi mangrove dan pondasi jembatan jalan trans Kalimantan

Kecamatan					
10.	P. Tukung	Kel. Prapatan	0,061	0,029	Semak belukar
11.	P. Babi	Kel. Prapatan	0,024	0,011	Semak belukar
Jumlah			209,066	100,00	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan 2005 – 2015 dan Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (2011)

Berikut ini disajikan daftar pulau-pulau kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah pulau-pulau kecil di kabupaten ini adalah 17 buah dan keseluruhannya tidak berpenghuni (Tabel 2.19).

Tabel 2.19. Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten			Berpenghuni (B) atau Tidak Berpenghuni (TBP)	
1	Baru Ilir, Pulau		TBP	
2	Baru Ulu, Pulau		TBP	
3	Batupayau, Pulau		TBP	
4	Cempa, Pulau		TBP	
5	Datuk, Pulau		TBP	
6	Idoh, Pulau		TBP	
7	Jawang, Pulau		TBP	
8	Kedumpit, Pulau		TBP	
9	Kedumpit Barat, Pulau		TBP	
10	Kedumpit Tengah, Pulau		TBP	
11	Kedumpit Timur, Pulau		TBP	
12	Kwangan, Pulau		TBP	
13	Maridan, Pulau		TBP	
14	Sabut, Pulau		TBP	
15	Selumut, Pulau		TBP	
16	Sera, Pulau		TBP	
17	Tanjungtipis, Pulau		TBP	

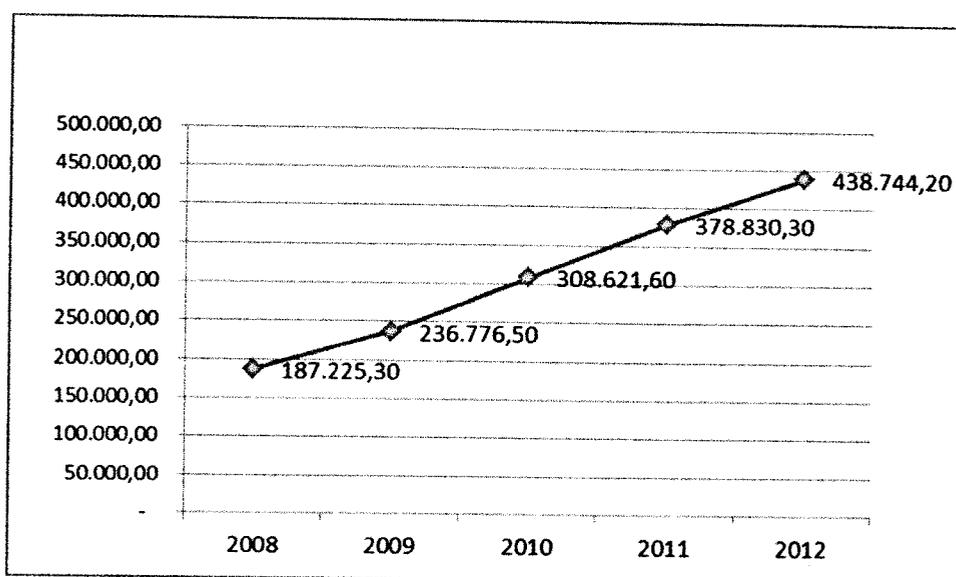
Selanjutnya jumlah pulau-pulau kecil di Kabupaten Paser adalah 6 buah baik pulau yang berpenghuni maupun tidak. Adapun nama pulau-pulau kecil di wilayah ini dikemukakan pada Tabel 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20. Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Paser

Kabupaten			Berpenghuni (B) atau Tidak Berpenghuni (TBP)	
1	Bansik, Pulau		TBP	
2	Batukapal, Pulau		TBP	
3	Burung, Pulau		BP	
4	Merayap, Pulau		BP	
5	Rantau Besar, Pulau		BP	
6	Rantau Kecil, Pulau		BP	

### 2.2.2. Perkembangan Produksi Perikanan

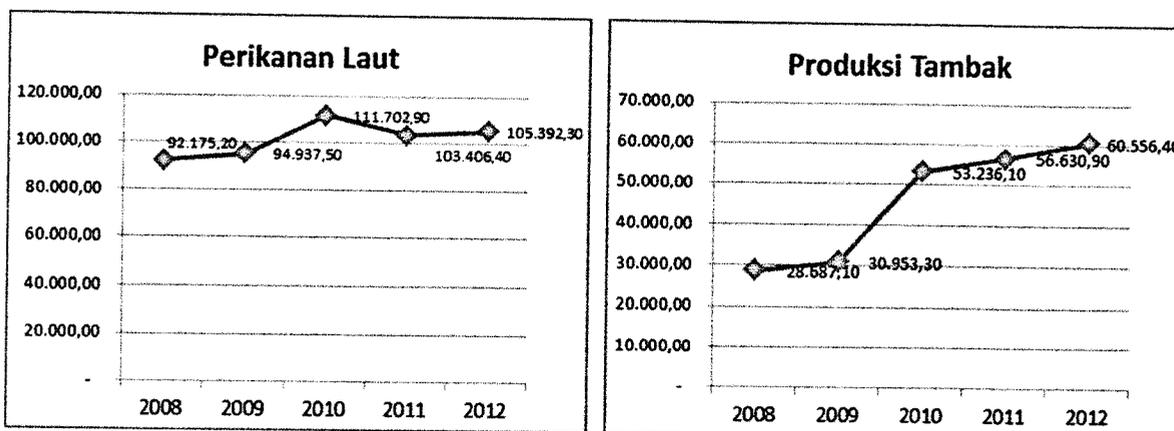
Produksi perikanan Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2008 sampai 2012 mengalami peningkatan dari 187.225,30 ton menjadi 438.774,20 ton atau naik sebesar 134,35%. Jika dihitung rata-rata pertumbuhan subsektor perikanan dalam kurun waktu 2008-2012 dari sisi produksi diketahui sebesar 23,84% per tahun. Jika dibandingkan pertumbuhan volume produksi terhadap nilai, maka pertumbuhan nilai juga mengalami peningkatan dari setiap pertumbuhan volume. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum komoditas perikanan mengalami peningkatan kualitas dan kenaikan harga. Peningkatan produksi perikanan selama tahun 2008-2010 kecuali pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan nilai produksi sedangkan perproduksi tetap mengalami peningkatan.



Gambar 2.8. Trend Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Timur 2008-2012

Selanjutnya untuk produksi perikanan laut pada tahun 2008 sebesar 92.179,20 ton menjadi 105.392,30 ton atau naik sebesar 14,33%. Dalam kurun waktu tersebut produksi perikanan laut tertinggi dicapai pada tahun 2010 sebesar 111.702,90 ton. Trend produksi perikanan budidaya tambak selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2008 sampai 2012. Pada tahun 2008 produksi tambak Kaltim diperoleh sebesar 28.687,10 ton menjadi 60.556,40 ton pada 2012 atau naik sebesar 111,1%.

Selengkapnya mengenai besaran produksi dan perkembangan perikanan dari kegiatan perikanan laut dan budidaya tambak disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.9. Produksi Laut dan Tambak Provinsi Kalimantan Timur 2008-2012

### 2.2.3. Kondisi Perikanan Tangkap

#### 1. Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Rumah tangga perikanan pada perikanan laut di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 21.575 RTP. Jumlah rumah tangga perikanan terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 6.435 RTP atau sebesar 29,83% dari jumlah seluruh rumah tangga perikanan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di urutan kedua jumlah rumah tangga perikanan terbanyak adalah Kabupaten Kutai timur sebanyak 4.114 RTP (19,07%). Selanjutnya diurutan berikutnya adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 3.709 RTP (17,19%), Kabupaten Berau sebanyak 2.251 RTP (10,43%), Kabupaten Paser sebanyak 2.154 RTP (9,98%), Kota Bontang sebanyak 1.176 RTP (5,45%), Kota Balikpapan sebanyak 1.068 RTP (4,95%) dan terakhir Kota Samarinda sebanyak 668 RTP (3,10%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21. Rumah Tangga Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013

Kabupaten	Rumah Tangga Perikanan Tangkap
Paser	2154
Kutai Kartanegara	6435
Kutai Timur	4114
Berau	2251
Penajam Paser Utara	3709
Samarinda	668
Balikpapan	1068
Bontang	1176
Jumlah	21575

## 2. Armada Penangkapan

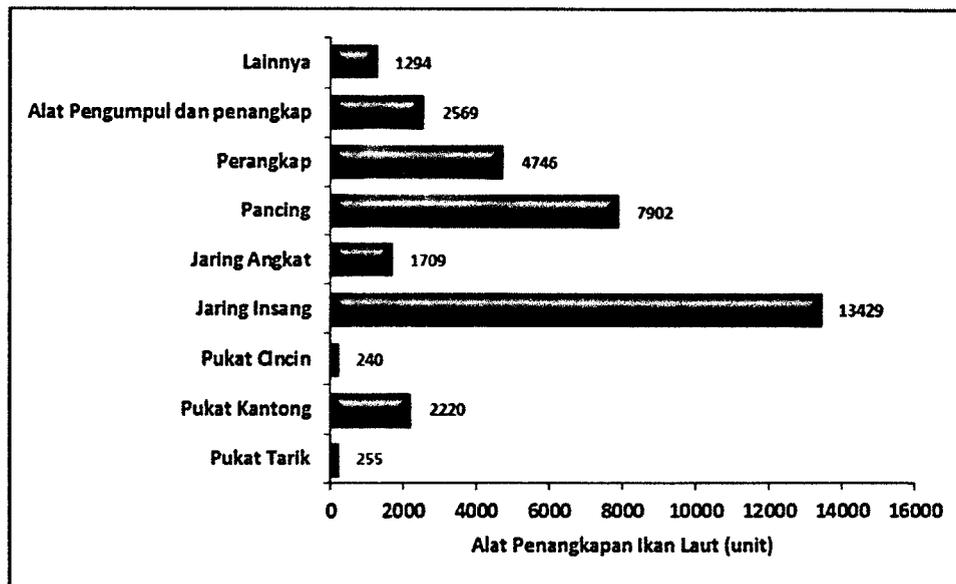
Armada penangkapan pada perikanan laut di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari perahu tanpa motor, perahu motor tempel dan kapal motor. Jumlah armada penangkapan sebanyak 22.169 unit yang terdiri dari perahu tanpa motor sebanyak 1.908 unit, perahu motor tempel sebanyak 3.025 unit dan kapal motor sebanyak 17.236 unit. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur yang paling banyak memiliki armada penangkapan yaitu sebanyak 6.457 unit (29,21%) diikuti Kabupaten Kutai timur sebanyak 4.114 unit (18,56%), Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 3.660 unit (16,51%), Kabupaten Berau sebanyak 2.459 unit (11,09%), Kabupaten Paser sebanyak 2.154 unit (9,72%), Kota Balikpapan sebanyak 1.362 unit (6,14%), Kota Bontang sebanyak 1.265 unit (5,71%), dan Kota Samarinda sebanyak 680 unit (3,07%). Jumlah armada penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22. Jumlah Armada Penangkapan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

	Motor	Tempel	Kapal Motor	Jumlah
Paser	2	10	2142	2154
Kutai Kartanegara	80	505	5890	6475
Kutai Timur	1404	806	1904	4114
Berau	17	665	1777	2459
Penajam Paser Utara	140	543	2977	3660
Samarinda	0	23	657	680
Balikpapan	18	8	1336	1362
Bontang	247	465	553	1265
<b>Jumlah</b>	<b>1908</b>	<b>3025</b>	<b>17236</b>	<b>22169</b>

## 3. Alat Penangkapan Ikan

Alat penangkapan ikan di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari sembilan jenis alat tangkap yaitu pukat tarik, pukat kantong, pukat cincin, jaring insang, jaring angkat, pancing, perangkap, alat pengumpul dan perangkap serta alat tangkap lainnya. Jumlah alat penangkapan ikan dilaut sebanyak 34.364 unit yang terdiri dari pukat tarik sebanyak 255 unit, pukat kantong sebanyak 2.220 unit, pukat cincin sebanyak 240 unit, jaring insang sebanyak 13.429 unit, jaring angkat sebanyak 1.709 unit, pancing sebanyak 7.902 unit, perangkap sebanyak 4.746 unit, alat pengumpul dan penangkap sebanyak 2.569 unit serta alat tangkap lainnya sebanyak 1.294 unit. Jumlah alat penangkapan ikan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2.10. Jumlah Alat Penangkapan Ikan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

#### 4. Produksi Perikanan Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2013 sebanyak 94.679 ton, dimana sebaran jumlah produksi perikanan tangkap per kabupaten/ kota menunjukkan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 32.192,9 ton (34%), diikuti Kabupaten Berau sebesar 15.886,2 ton (16,78%), Kota Bontang sebesar 14.043,9 ton (14,83%), Kabupaten Paser sebesar 9.935,9 ton (10,49%), Kota Samarinda sebesar 7.779,5 ton (8,22%), Kota Balikpapan sebesar 5.289,3 ton (5,59%), Kabupaten Kutai Timur sebesar 5.211 ton (5,50%) dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 4.340,3 ton (4,58%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di laut Provinsi Kalimantan Timur 2013

Kabupaten	Produksi Perikanan Tangkap (ton)
Paser	9935.9
Kutai Kartanegara	32192.9
Kutai Timur	5211
Berau	15886.2
Penajam Paser Utara	4340.3
Samarinda	7779.5
Balikpapan	5289.3
Bontang	14043.9
Jumlah	94679

#### 5. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Nilai produksi perikanan tangkap di laut pada tahun 2013 sebesar 2.019.488 juta rupiah, dimana sebaran nilai produksi perikanan tangkap per kabupaten/ kota

menunjukkan jumlah terbesar berada di Kota Bontang yaitu sebesar 569.441 juta rupiah (28,20%), diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 526.107 juta rupiah (26,05%), Kabupaten Berau sebesar 248.636 juta rupiah (12,31%), Kabupaten Paser sebesar 246.650 juta rupiah (12,21%), Kabupaten Kutai Timur sebesar 131.924 juta rupiah (6,53%), Kota Samarinda sebesar 7119.697 juta rupiah (5,93%), Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 98.068 juta rupiah (4,93%) dan Kota Balikpapan sebesar 78.965 juta rupiah (3,91%), Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24. Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Kabupaten	Produksi Perikanan Tangkap (juta Rp)
Paser	246650
Kutai Kartanegara	526107
Kutai Timur	131924
Penajam Paser Utara	98068
Berau	248636
Samarinda	119697
Balikpapan	78965
Bontang	569441
Jumlah	2019488

#### 2.2.4. Perikanan Budidaya Laut

##### 1. Rumah Tangga Perikanan (RTP)

Rumah tangga perikanan pada perikanan budidaya laut di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 16.932 RTP. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya laut terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebanyak 7.791 RTP atau sebesar 46,01% dari jumlah seluruh rumah tangga perikanan budidaya laut yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Di urutan kedua jumlah rumah tangga perikanan budidaya terbanyak adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 3.791 RTP (22,39%), diikuti Kabupaten Paser sebanyak 3.669 RTP (21,67%), Kabupaten Kutai Timur sebanyak 560 RTP (3,31%), Kota Bontang sebanyak 458 RTP (2,70%), Kabupaten Berau sebanyak 415 RTP (2,45%) dan Kota Balikpapan sebanyak 248 RTP (1,46%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Tabel 2.25. Rumah Tangga Perikanan Budidaya Laut Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013

Kabupaten	Perikanan Budidaya Laut (RTP)	Perikanan Budidaya Air Tawar (RTP)	Jumlah (RTP)
Paser	3669	0	3669
Kutai Kartanegara	7727	64	7791
Kutai Timur	392	168	560

Produksi Perikanan Budidaya Laut (ton)			
Berau	281	134	415
Penajam Paser Utara	3791	0	3791
Balikpapan	248	0	248
Bontang	61	397	458
<b>Jumlah</b>	<b>16169</b>	<b>763</b>	<b>16932</b>

## 2. Produksi Perikanan Budidaya Laut

Jumlah produksi perikanan budidaya laut pada tahun 2013 sebanyak 43.054,8 ton, dimana sebaran jumlah produksi perikanan budidaya laut per kabupaten/kota menunjukkan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 24.581,7 ton (57,09%), diikuti Kabupaten Paser sebesar 9.463,7 ton (21,98%), Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 7.236,8 ton (16,81%), Kabupaten Berau sebesar 737,2 ton (1,71%), Kabupaten Kutai Timur sebesar 720 ton (1,67%), Kota Balikpapan sebesar 261 ton (0,61%) dan Kota Bontang sebesar 54,4 ton (0,13 ton). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Laut di laut Provinsi Kalimantan Timur 2013

	Produksi Perikanan Budidaya Laut (ton)		
	Tambak	Budidaya Laut	
Paser	9463.7	0	9463.7
Kutai Kartanegara	24573	8.7	24581.7
Kutai Timur	684.1	35.9	720
Berau	590.5	146.7	737.2
Penajam Paser Utara	7236.8	0	7236.8
Balikpapan	261	0	261
Bontang	15.6	38.8	54.4
<b>Jumlah</b>	<b>42824.7</b>	<b>230.1</b>	<b>43054.8</b>

## 3. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Nilai produksi perikanan budidaya laut pada tahun 2013 sebesar 1.792.347 juta rupiah, dimana sebaran nilai produksi perikanan budidaya laut per kabupaten/ kota menunjukkan jumlah terbesar berada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 1.170.658 juta rupiah (65,31%), diikuti Kabupaten Paser sebesar 281.271 juta rupiah (15,69%), Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 263.272 juta rupiah (14,69%), Kabupaten Berau sebesar 35.045 juta rupiah (1,96%), Kabupaten Kutai Timur sebesar 30.939 juta rupiah (1,73%), Kota Balikpapan sebesar 8.109 juta rupiah (0,45%), dan Kota Bontang sebesar 3.053 juta rupiah (0,17%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27. Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013

Nilai Produksi Perikanan Budidaya Laut (juta Rp)			
	Tambak	Budidaya Laut	
Paser	281.271	0	281.271
Kutai Kartanegara	1.170.044	614	1.170.658
Kutai Timur	25.915	5.024	309.39
Penajam Paser Utara	263.272	0	263.272
Berau	17.648	17.397	35.045
Balikpapan	8.109	0	8.109
Bontang	601	2.452	3.053
<b>Jumlah</b>	<b>1.766.860</b>	<b>25.487</b>	<b>1.792.347</b>

### 2.2.5. Ekspor Hasil Perikanan

Secara umum volume ekspor hasil perikanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2005-2010 mengalami peningkatan yang sangat kecil sebesar 6,58%, namun terjadi penurunan volume ekspor di tahun 2006 sebesar 10,69%, tahun 2007 sebesar 5,38% dan tahun 2008 sebesar 2,85%. Namun pada tahun dan 2009 sebesar 21,26% dan tahun peningkatan yang signifikan sebesar 42,47%. Nilai ekspor hasil perikanan terjadi penurunan sekitar 0,39% per tahun, yakni dari US\$ 63,15 miliar pada tahun 2005 menjadi US\$61 miliar pada tahun 2010.

Terjadinya penurunan nilai ekspor hasil perikanan Kaltim yang lebih diakibatkan penurunan volume ekspor, tidak adanya peningkatan harga rata-rata produk perikanan yang diekspor, antara lain disebabkan sebagian karna sebagian besar komoditas ekspor belum mengarah pada produk bernilai tambah (non primary product). Begitu juga nilai impor komoditas perikanan, sampai tahun 2010 mengalami penurunani dari nilai sebesar US\$53 juta dengan penurunan per tahun sebesar 41,71%. Pertumbuhan nilai ekspor - impor dan neraca perdagangan hasil perikanan selama tahun 2005 2010, sebagaimana tersebut pada Tabel 2.28 berikut ini.

Tabel 2.28. Pertumbuhan Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Hasil Perikanan Tahun 2005 - 2010 Provinsi Kalimantan Timur

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Kenaikan Rata-rata (2005-2010)
1	Volume Expor (ton)	9 273	8 281	7 835	7 611	8 327	11 864	6,58%
2	Volume Impor (ton)	117	28	1	0	0	0	-14,49%
3	Nilai ekspor (US\$1000)	63 158	61 480	61 480	55 448	53 826	61 040	-0,39%
4	Nilai impor (US\$1000)	53	11	3	0	0	0	-41,72%

Sumber: Pusat Data Statistik dan Informasi Sekretariat Jenderal KKP Tahun 2012

## 2.3. Pola Penggunaan Lahan dan Perairan

### 2.3.1. Kawasan Hutan

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pepaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan paduserasi TGHK-RTRWP merupakan dasar utama dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi.

Hutan di Indonesia, berdasarkan fungsinya dibagi menjadi : Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan Konservasi terdiri dari, Kawasan Hutan Suaka Alam (KSA), Kawasan Hutan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) (UU No. 41 Tahun 1999). Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 20.999.353 ha, memiliki kawasan hutan seluas 14.651.553 ha (SK. Menhut No. 79/Kpts-II/2001). Dari luas kawasan hutan tersebut hutan konservasi yang definitif hanya seluas 1.789.679 ha.

Tabel 2.29. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi Kawasan di Kalimantan Timur

Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Persen luas (%)
Kawasan Hutan Konservasi (HAS & HPA)	± 2.165.198	14,78
Kawasan Hutan Lindung (HL)	± 2.751.702	18,78
Kawasan Hutan Produksi	± 9.734.653	66,44
Hutan Produksi Terbatas (HPT)	± 4.612.965	31,48
Hutan Produksi Tetap (HP)	± 5.121.688	34,96
<b>Luas Keseluruhan</b>	<b>± 14.651.553</b>	<b>100</b>

Sumber: RTRW Kalimantan Timur (2012)

Tabel 2.30. Luas Hutan Menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan dan Kabupaten di Kalimantan Timur (Ha)

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Suaka Alam & Wisata	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Tetap	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Hutan Pendidikan /Penelitian
<b>Kabupaten</b>							
Paser	114.516	96.641	168.091	238.752	406.843	-	-
Kutai Kartanegara	208.507	136.703	562.367	752.313	1.314.9	-	24.581

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Suaka Alam & Wisata	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Tetap	Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Hutan Pendidikan /Penelitian
					50		
Kutai Timur	270.726	219.385	868.778	839.455	1.708.233	-	-
Berau	351.106	18	698.978	611.640	1.310.618	-	-
Penajam Paser Utara	-	9.905	49.411	104.311	153.272	-	-
<b>Kota</b>							
Balikpapan	12.833	-	29.919	-	29.919	-	-
Bontang	4.704	1.221	-	-	-	-	-

Sumber: Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Timur (2014)

Kawasan Konservasi terdiri dari Cagar Alam (CA), Suaka Margasatwa (SM), Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TW), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Buru (TB). Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Di Provinsi Kalimantan Timur, Hutan Konservasi yang telah ditunjuk dan ditetapkan adalah sejumlah 3 unit Cagar Alam, 1 unit Suaka Margasatwa (Laut), 2 unit Taman Nasional dan 2 unit Taman Wisata (satu diantaranya TW Laut).

Tabel 2.31. Luas Kawasan Hutan Konservasi Daratan dan Perairan

Nama Kawasan	Kabupaten	Fungsi	Luas (Ha)	Nomor SK	Tanggal SK
Muara Kaman Sedulang	Kutai Kartanegara, Kutai Timur	Cagar Alam	62.500	SK Mentan No. 290/Kpts/Um/5/1976	5/10/1976
Padang Luway	Kutai Barat	Cagar Alam	5.000	SK Mentan No. 792/Kpts/Um/10/1982	29/10/1982
Teluk Apari	Paser	Cagar Alam	46.900	SK Mentan No. 086/Kpts-II/1993	16/2/1993
Pulau Semama	Berau	Suaka Margasatwa Laut	220	SK Mentan No. 604/Kpts/Um/8/1982	19/8/1982
Taman Nasional Kutai	Kutai Timur	Taman Nasional	198.629	SK Mentan No. 325/Kpts-II/1995	29/6/1995
Kayan Mentarang	Malinau, Nunukan	Taman Nasional	1.360.500	SK Menhut No. 631/Kpts-II/1996	7/10/1996
Bukit Suharto	Samarinda	Taman Wisata	61.850	SK Menhut No. 242/Kpts-II/1988	1/1/1988
Pulau Sangalaki	Berau	Taman Wisata Laut	280	SK Menhut No. 604/Kpts/Um/8/1982	19/8/1982

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, 2008 dalam RTRW Kalimantan Timur (2012)

Laju pengurangan hutan (Deforestasi) di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil perbandingan dari Peta Penutupan lahan RePProT tahun 1985 dan Peta Penutupan

Lahan hasil penafsiran citra tahun 1997 Pusat Data dan Perpetaan Badan Planologi diperoleh hasil bahwa selama periode waktu 12 tahun telah terjadi perubahan penutupan lahan hutan dengan rata-rata Laju deforestasi tahunan periode 1985 – 1997 adalah sekitar 373.159 ha/tahun.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan agar tetap menjaga kelestariannya. Pemanfaatan kawasan Hutan Pelestarian Alam dan Kawasan Hutan Suaka Alam serta Taman Buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3.2. Pertambangan

Wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Timur juga kaya akan sumberdaya mineral. Adapun sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir Kalimantan Timur adalah batubara, nikel, bijih besi, emas, mangan, logam dasar, batu gamping, batu pasir, batu lempung, gypsum, dan tanah. Luas wilayah yang dijadikan lahan pertambangan berdasarkan IUP di Kabupaten/kota pesisir di Provinsi Kalimantan Timur seluas 2.660.869,71 Ha, dimana terdiri dari tahapan eksplorasi dan proses produksi. Jika dilihat dari luas wilayah pertambangan, diharapkan mampu memberikan keuntungan sosial dan ekonomi yang tinggi juga bagi perkembangan wilayah pesisir, dengan tetap memperhatikan aspek ekologisnya.

Tabel 2.32. Luas Wilayah Pertambangan Berdasarkan Tahapan Kegiatan di Wilayah Pesisir Kalimantan Timur

Kabupaten /kota	Luas (Ha)		Jumlah
	Eksplorasi	Proses Produksi	
<b>Kabupaten</b>			
Paser	89.040,05	31.898,85	<b>120.938,90</b>
Kutai Kartanegara	444.449,22	353.407,21	<b>797.856,42</b>
Kutai Timur	1.077.569,55	160.170,02	<b>1.237.739,57</b>
Berau	240.865,90	46.057,83	<b>286.923,73</b>
Penajam Paser Utara	174.879,72	42.531,37	<b>217.411,09</b>
<b>Kota</b>			
Balikpapan	-	-	<b>0</b>
Bontang	-	-	<b>0</b>
<b>Pesisir Kalimantan Timur</b>	<b>2.026.804,44</b>	<b>634.065,28</b>	<b>2.660.869,71</b>

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur (2015)

### 2.3.3. Pertanian dan Perkebunan

Pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Kalimantan Timur sebagai lahan pertanian dan perkebunan sudah cukup luas dengan berbagai macam komoditi. Untuk area pertanian terdapat padi sawah dan padi bukan lahan sawah (ladang). Untuk jenis palawija terdapat

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Sedangkan perkebunan tanaman terdapat karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan kelapa sawit yang tersebar di seluruh wilayah pesisir Kalimantan Timur.

Tabel 2.33. Luas Area Pertanian Berdasarkan Komodoti Padi di Kalimantan Timur (Ha)

Kabupaten/Kota	Padi sawah	Padi bukan lahan sawah
<b>Kabupaten</b>		
Paser	7.240	3.064
Kutai Kartanegara	37.113	4.461
Kutai Timur	5.072	5.047
Berau	5.911	8.371
Penajam Paser Utara	13.373	1.590
<b>Kota</b>		
Balikpapan	45	196
Bontang	24	-

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2014

Luas areal pertanian di wilayah pesisir Kalimantan Timur berdasarkan jenis palawija terdiri dari luas komoditi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selengkapnya mengenai informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34. Luas Area Pertanian Berdasarkan Jenis Palawija di Kalimantan Timur (Ha)

Kabupaten /kota	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau
<b>Kabupaten</b>						
Paser	248	109	122	78	161	17
Kutai Kartanegara	413	1.152	642	491	369	192
Kutai Timur	299	204	93	144	49	44
Berau	630	295	141	287	376	93
Penajam Paser Utara	34	51	85	29	2	10
<b>Kota</b>						
Balikpapan	165	322	23	25	-	-
Bontang	3	21	17	3	-	-

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka (2014)

Luas areal perkebunan di wilayah pesisir Kalimantan Timur berdasarkan jenis tanaman terdiri dari karet, kelapa, kopi, lada, kakao, kelapa sawit dan lain-lain. Selengkapnya mengenai informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.35. Luas Area Perkebunan Berdasarkan Jenis Tanaman di Kalimantan Timur (Ha)

Kabupaten /kota	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
<b>Kabupaten</b>							
Paser	13.987	3.354	1.690	113	381	181.946	265
Kutai Kartanegara	23.117	11.142	1.604	5.655	281	178.864	784
Kutai Timur	8.779	1.191	218	348	4.818	359.519	367
Berau	2.706	3.044	587	1.607	4.057	91.591	146
Penajam Paser Utara	10.922	4.969	27	1.369	15	48.699	101
<b>Kota</b>							
Balikpapan	4.498	1.085	21	16	11	10	71
Bontang	116	30	2	-	5	38	35

Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka (2014)

#### 2.3.4. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Provinsi Kalimantan Timur tidak kalah dengan potensi sumberdaya yang lain. Seluruh daerah kabupaten/kota yang terletak di wilayah pesisir Kalimantan Timur semuanya memiliki daerah wisata pantai dan bahari. Potensi wisata yang dimiliki layak untuk dikembangkan karena mampu memberikan pendapatan daerah yang menjanjikan jika dikelola dengan baik. Jika melihat jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, yang semakin meningkat tiap tahunnya, maka banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari pengelolaan wisata, mulai dari ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja.

Pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi daerah dan sebagai aset berharga yang patut untuk dijaga dan dikembangkan. Pariwisata di Kalimantan Timur mempunyai prospek yang bagus dan masih dapat dikembangkan lebih optimal. Provinsi Kalimantan Timur dengan 10 kabupaten/ kotanya ini memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata alam, agrowisata, maupun wisata budaya. Pada tahun 2013, tercatat ada 430 obyek wisata di Kalimantan Timur yang mengalami kenaikan jumlah dari 423 obyek pada tahun 2011 (BPS Kaltim, 2013).

Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu juga diharapkan sebagai sektor yang padat karya yakni sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan diharapkan berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut statistik kunjungan wisata, jumlah pengunjung obyek wisata di Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2013 tercatat 19,76 ribu wisatawan mancanegara (wisman) dan sekitar 1,04 juta wisatawan nusantara (wisnus). Peningkatan wisman mencapai 3,50 persen dan wisnus sebesar 6,68 persen atau secara total terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebesar 6,62 persen ((BPS. Prov Kaltim, 2013).

Kalimantan Timur memiliki 7 kabupaten/kota yang merupakan wilayah pesisir yang meliputi Kabupaten Paser, Panajam Paser Utara, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, Kota Balikpapan dan Bontang. Masing-masing wilayah kabupaten/kota pesisir ini memiliki potensi dan obyek wisata yang memanfaatkan sumberdaya pesisir. Beberapa obyek pariwisata di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut (Tabel 2.36).

Tabel 2.36. Obyek Wisata Bahari dan Pantai Utama di Provinsi Kalimantan Timur.

No.	Obyek wisata	Lokasi Kab. / Kota	Keterangan
1.	Pulau Sangalaki	Berau	Merupakan habitat terbesar penyu hijau di Asia Tenggara dan merupakan kawasan konservasi penyu. Selain itu pulau ini juga

No.	Obyek wisata	Lokasi Kab. / Kota	Keterangan
			termasuk pusat habitat Pari Manta di dunia. Obyek wisata ini menawarkan suasana di pulau yang sangat alami dan indah serta suasana penyelaman yang menakjubkan dengan kehidupan bawah lautnya yang sangat eksotik.
2.	Pulau Maratua	Berau	Pulau ini merupakan salah satu paradiseisland wilayah ini. Merupakan pulau terluar Indonesia. Sepanjang garis pantainya merupakan lokasi bertelurnya penyu hijau terbesar di Indonesia. Obyek wisata ini selain menawarkan keindahan panorama pantainya juga keindahan taman bawah lautnya serta pemandangan iringan lumba-lumba yang sering muncul menyertai kapal menuju pulau ini. Obyek wisata ini dapat ditempuh dengan jarak 1,5 jam dari pulau Derawan.
3.	Pulau Kakaban	Berau	Pulau yang merupakan atol atau batu karang melingkar dan memiliki laguna. Terdapat danau air payau di tengah pulau ini dengan 4 species ubur-ubur ( <i>jelly fish</i> ) yang tidak menyengat dan biota unik lainnya. Danau ini telah ditetapkan sebagai kawasan warisan dunia pada tahun 2004 oleh UNESCO. Obyek ini dapat ditempuh sekitar 45 menit dari pulau Derawan.
4.	Pulau Derawan	Berau	Obyek wisata ini merupakan kawasan taman laut Derawan yang dikenal pula dengan " <i>The Coral Triangle</i> " nya. Daya tarik utama panorama laut dan pantai dengan pasir putihnya disertai dengan keramahan penduduk setempat yang suku Bajau. Pulau ini dikenal dengan wisata baharinya khususnya penyelaman dan aktifitas snorkling.
5.	Labuan Cermin	Berau	Obyek wisata ini terletak di Desa Labuan Kelambu, Kec. Biduk-Biduk, yang dapat dicapai dengan jarak tempuh 6-7 jam perjalanan darat dari tj. Redeb dengan jarak sejauh 257 km. Obyek yang ditawarkan adalah keindahan surga bawah laut pada pantai berbentuk danau dengan kejernihan air dua rasa tawar pada bagian atas dan asin pada bagian bawah serta berbagai makhluk hidup yang berasal dari kedua kehidupan tersebut.
6.	Pulau Beras Basah	Bontang	Pulau ini terletak 40 menit perjalanan laut dari dermaga Bontang Kuala. Obyek yang ditawarkan adalah pemandangan alam pantai dengan pasir putih bersih yang

No.	Obyek wisata	Lokasi Kab. / Kota	Keterangan
			nyaman untuk berjemur, berenang dan memancing serta ombak yang memungkinkan untuk kegiatan olah raga jet sky, selancar angin, banana boat, menyelam dll. Pulau ini dilengkapi dengan sebuah menara.
7.	Pulau Gusung	Bontang	Terletak di sebelah utara Kota Bontang berjarak ± 6 mil laut, dapat ditempuh dengan speedboat selama 20-30 menit dari pelabuhan Loktuan, pelabuhan Tj. Limau atau Bontang Kuala. Pulau ini sangat berpotensi untuk kegiatan memancing, daya tarik selain itu adalah dalam perjalanan menuju pulau ini wisatawan dapat menyaksikan kilang/pabrik pengolahan Pupuk Kaltim, yang jika pada malam hari sangat menarik karena semarak lampu-lampu penerangan pabrik.
8.	Pantai Marina	Bontang	Obyek wisata ini terletak tidak jauh dari pelabuhan Tj. Laut yang menawarkan keindahan panorama pantai dan pemandangan ke arah laut dengan latarbelakang bangunan-bangunan pabrik LNG.
9.	Pantai Lamaru	Balikpapan	Obyek wisata pantai ini terletak ± 5 km sebelah timur Pantai Manggar Segara Sari tepatnya di Jl. Mulawarman, Balikpapan Timur. Suasana yang relatif tenang menjadikan Pantai Lamaru sebagai pilihan yang tepat untuk bersantai, selain itu dominasi pohon cemara yang rindang menciptakan suasana yang lebih eksotik.
10.	Pantai Kemala (Kemala Beach)	Balikpapan	Pantai ini terletak di pusat Kota Balikpapan tepatnya di Jl. Jend. Sudirman, Balikpapan Selatan. Pantai mungil berpasir putih ini diwarnai dengan nuansa Bali yang memberikan suasana nyaman untuk bersantai. Warung-warung yang ditata di tepi pantai lengkap dengan sentuhan cahaya lilin di malam hari menjadikan pantai ini salah satu pilihan terbaik untuk menikmati makan malam dengan suasana pantai di alam terbuka.
11.	Pantai Manggar	Balikpapan	Obyek wisata ini terletak sekitar 20 km sebelah timur Kota Balikpapan dari pusat kota. tepatnya di Jl. Mulawarman, Manggar. Dipantai Manggar pengunjung bisa menikmati kuliner loka, panggung hiburan, arena bermain anak, berbagai jenis olah raga air atau bahkan sekedar bersantai menikmati pemandangan pantai.

No.	Obyek wisata	Lokasi Kab. / Kota	Keterangan
12.	Pantai Sekerat	Kutim	Merupakan salah satu pantai unggulan di Kabupaten Kutai Timur dengan garis pantai 3 km. Obyek wisata ini terletak di Desa Sekerat yang dapat dicapai dengan jarak tempuh 3 jam dari kota Sangatta dengan transportasi darat atau sekitar 40 km dari Kecamatan Bengalon. Pantai ini menyajikan panorama indah di tepi pantai dengan pemandangan jejeran pegunungan kapur Sekerat.
13.	Pantai Teluk Lombok	Kutim	Pantai ini terletak tidak jauh dari Kota Sangatta Kutai Timur, tempat ini berjarak 15 km dari pusat kota dan termasuk dalam kawasan TNK. Pemandangan pantai dan laut menjadi daya tarik utama dari obyek wisata ini yang di tunjang dengan fasilitas pendopo-pendopo tempat menjajakan makanan dan penyewaan permainan rekreasi air
14.	Pantai Aquatik "Pantai Tanjung Bara"	Kutim	Pantai ini berada dalam wilayah teritorial pertambangan PT. KPC, sekitar 30 menit perjalanan dari Kota Sangatta ke arah Utara. Pantai ini selain memiliki pemandangan indah kelaut Makassar, daya tarik lain adalah hutan bakau yang mengelilingi pantai. Pengunjung dapat berperahu duduk-duduk didermaga sambil memancing.
15.	Pantai Teluk Kaba	Kutim	Teluk Kaba masih terletak di dalam kawasan TNK merupakan salah satu obyek wisata alam pantai yang dikelilingi oleh vegetasi bakau yang masih asli dan belum banyak tersentuh oleh aktivitas manusia. Pengunjung dapat melakukan aktivitas fishing dan snorkling.
16.	Pualu Birah-birahan	Kutim	Terletak di Kecamatan Sangkulirang, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan kapal motor cepat dari Sangatta atau Benua Baru. Pulau Birah-birahan selain memiliki keindahan pemandangan laut juga memiliki keindahan alam bawah laut, seperti taman laut dengan keanekaragaman karang laut yang indah dan ikanhias yang beraneka ragam.
17.	Pantai pangandaran	Kutim	Terletak di Desa Pangandaran Kecamatan Sangkulirang. Obyek wisata ini dapat dijangkau dengan speedboat lebih kurang 2 jam dari Sangkulirang ke arah laut. Daya tarik obyek wisata ini adalah pantai dengan pasir putihnya, gelombang laut dan ikan lautnya.

No.	Obyek wisata	Lokasi Kab. / Kota	Keterangan
18.	Pantai Tanah Merah	Kukar	Pantai ini berada di Tanjung Harapan – Samboja, 14 km dari persimpangan jalan Raya Balikpapan – Samarinda (KM 50) atau ± 127 km dari Tenggarong. Obyek wisata ini memiliki luas ±8 ha. Dikawasan ini terdapat ratusan pohon pinus yang lebat memperindah dan menyejukkan pantai, sehingga sangat cocok untuk para wisatawan yang ingin berkemah, memancing dan berburu kepiting.
19.	Pantai Biru	Kukar	Pantai Biru Marangkayu terletak di Desa Kersik yang berjarak sekitar 10 km dari ibukota Kecamatan Marang Kayu dengan dengan aksesibilitas yang cukup baik. Daya tarik dari pantai ini adalah pemandangan alam pantai yang indah dan pasir putihnya
20.	Pantai Pangempang	Kukar	Pantai Pangempang merupakan obyek wisata berupa pulau yang berada di Desa Tanjung Limau. Pulau tersebut berpasir putih dan memiliki keindahan alam yang menawan. Obyek wisata ini terletak 15 km dari ibukota Kecamatan Muara Badak dengan aksesibilitas yang cukup baik berupa transportasi darat dan laut. Setiap tahun dilokasi ini diselenggarakan upacara adat pesta laut yang merupakan ritual persembahan sebagai wujud tanda syukur kepada Sang Pencipta.
21.	Pantai Paser Mayang	Paser	Terletak 45 km dari Tanah Grogot yang dapat dijangkau dengan transportasi darat atau transportasi laut melalui pelabuhan Pondong dengan waktu tempuh 15 menit. Obyek wisata ini menawarkan hamparan pasir putih.
22.	Pantai Tanjung Jumlai	Penajam Paser Utara	Pantai Tanjung Jumlai adalah merupakan ikon bagi Kabupaten Penajam Paser Utara. Pantai ini mempunyai lebar 100 – 150 m dengan bentangan garis pantai sepanjang 15 km dari Kelurahan Tanjung Tengah, Saloloang, kampung Baru dan Pejal, Kecamatan Penajam. Pantai ini terkenal dengan eksotis panoramanya yang didukung dengan pasir kwarsa kasar, sehingga dasar laut terlihat dengan jelas. Dikawasan ini juga tersedia tempat hiking dan perahu masyarakat dapat disewa untuk melakukan perjalanan ke Gugusan Pasir Gusung dan menyusuri kawasan pantai.
23.	Pulau Gusung	Penajam Paser Utara	Obyek wisata Pulau Gusung ini berada di kawasan Pantai Tanjung Jumlai memiliki 5

No.	Obyek wisata	Lokasi Kab. / Kota	Keterangan
			gugusan Pasir Gusung atau timbunan pasir laut yang dikelilingi areal terumbu karang ( <i>coral reef</i> ) yang terdiri dari 56 jenis karang dan 47 jenis ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias. Gusung tersebut adalah gusung Maniang, Gusung Batu, Gusung Tanjung Tengah, Gusung Karang dan Gusung Hitam. Selain itu dikawasan perairan ini terdapat salah satu jenis ikan langka yang dilindungi yaitu ikan Napoleon. Terumbu karang yang ditemukan dikawasan pulau ini 80% termasuk karang hidup yang langka.
24.	Pantai Sipakario (Pantai Nipah-Nipah)	Penajam Paser Utara	Pantai ini memiliki letak yang strategis karena berada tepat diteluk Balikpapan dan berjarak 8 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selain menawarkan pemandangan sunset dan pasir putih, pantai ini juga memiliki daya tarik berupa gemerlap lampu-lampu Kota Balikpapan pada malam hari. Kegiatan hiburan rakyat dan pagelaran seni budaya adalah kegiatan rutin tahunan yang digelar setelah perayaan Idul Fitri di pantai ini.
25.	Pantai Buluminung	Penajam Paser Utara	Kawasan pantai ini terletak di Kelurahan Buluminung Kecamatan Penajam arah Barat dari pelabuhan Feri Penajam – Somber Kota Balikpapan. Kawasan pantai ini menyimpan potensi laut yang beragam sehingga cocok untuk kawasan ekowisata berupa pemancingan, ditambah dengan deburan ombak yang kecil karena rerimbunan hutan mangrove sehingga sangat cocok untuk aktivitas dayung, berselancar dan jet sky. Perairan pantai ini juga terdapat komunitas ikan duyung (Dugong), yang sampai kini di yakini masyarakat sebagai penunggu kawasan pantai Buluminung.

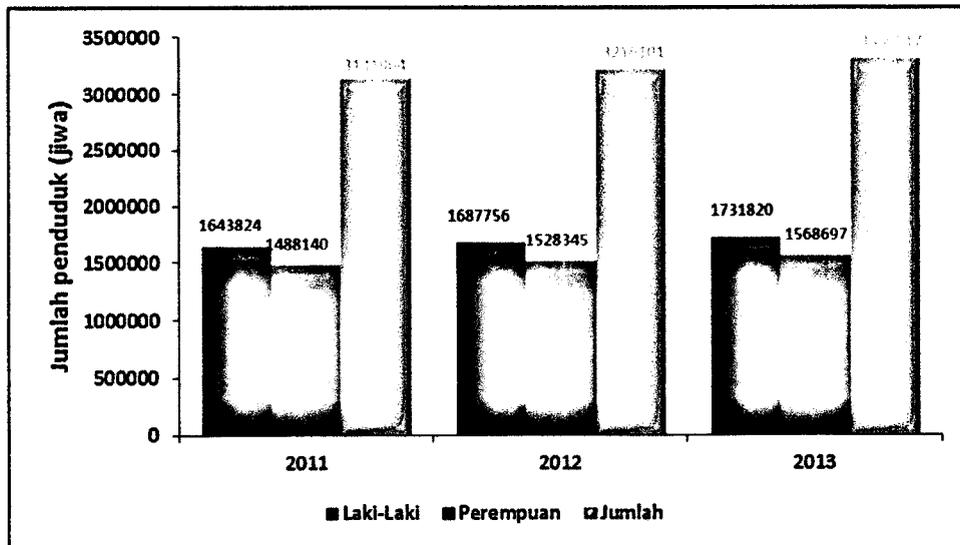
Sumber: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (2015)

## 2.4. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir

### 2.4.1. Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan

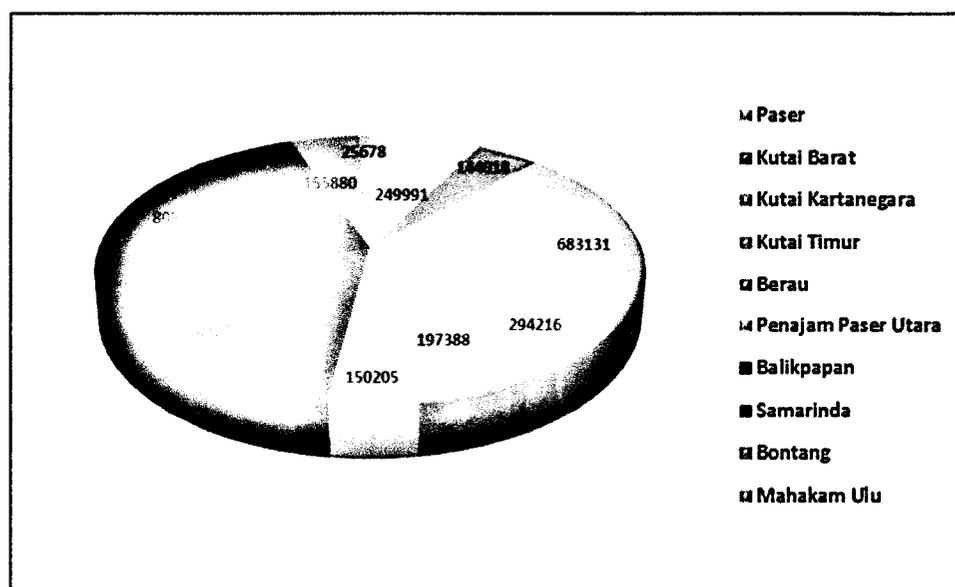
Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang pesat. Jumlah penduduk pada tahun 2013 sebanyak 3.300.517 jiwa mengalami peningkatan sebesar 5,38% dari tahun 2011 yang hanya sebanyak 3.131.964 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2013 jumlah

penduduk laki-laki sebanyak 1.731.820 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 5,35% dari tahun 2011, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.568.697 jiwa atau mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 5,41%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.11.



Gambar 2.11. Perkembangan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2013

Jumlah penduduk berdasarkan kabupaten/kota terlihat bahwa Kota Samarinda merupakan kota dengan penduduk paling besar yaitu sebanyak 805.688 jiwa (24,41%), diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 683.131 jiwa (20,70%), Kota Balikpapan sebanyak 594.322 jiwa (18,01%), Kabupaten Kutai Timur sebanyak 294.216 jiwa (8,91%), Kabupaten Paser sebanyak 249.991 jiwa (7,57%), Kabupaten Berau sebanyak 197.388 jiwa (5,98%), Kota Bontang sebanyak 155.880 jiwa (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 150.205 jiwa (4,55%), Kabupaten Kutai Barat sebanyak 144.018 jiwa (4,36%) dan Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 25.678 jiwa (0,78%). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12.



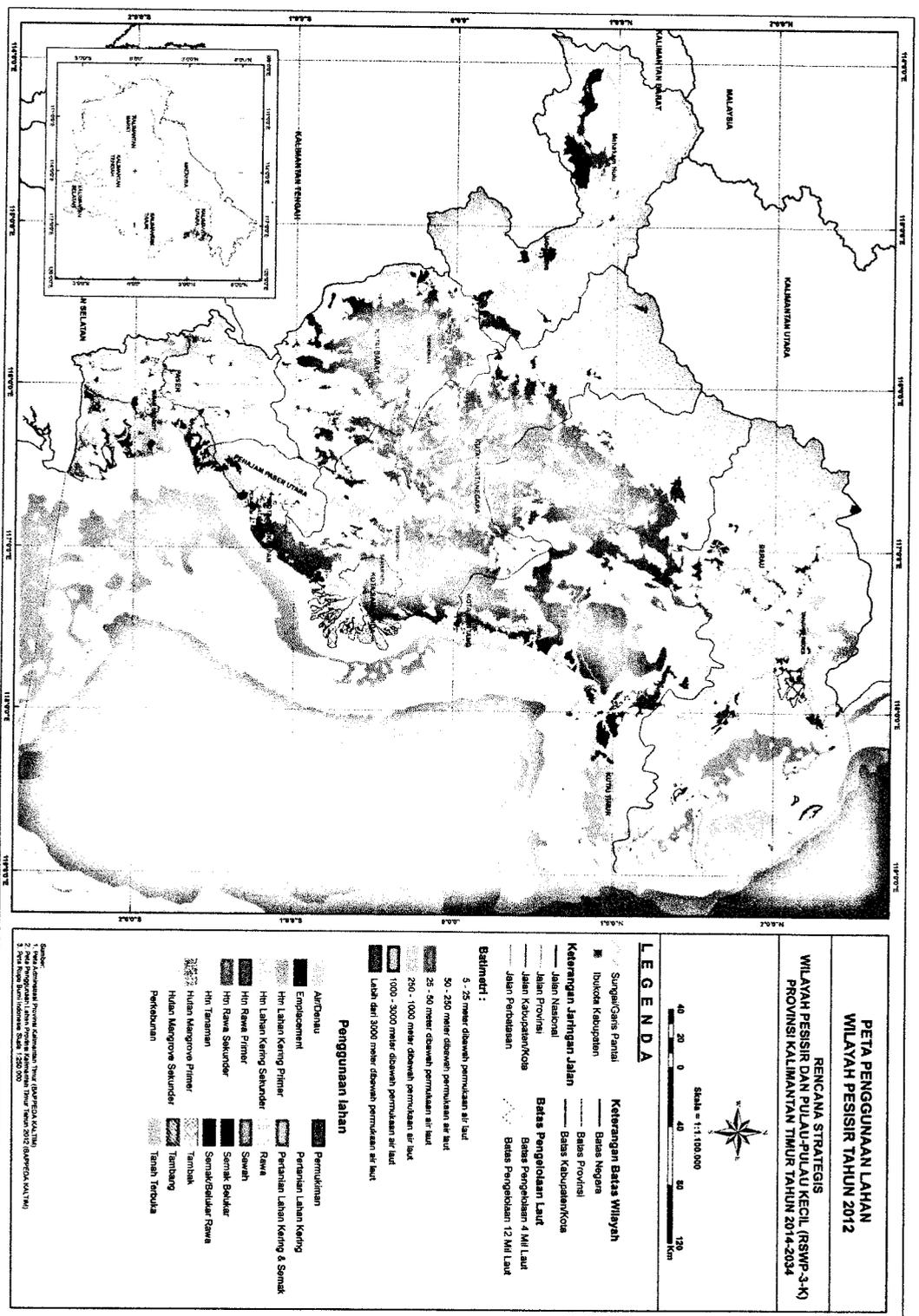
Gambar 2.12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang paling banyak berada di Kota Samarinda yaitu masing-masing sebanyak 416.975 jiwa dan 388.713 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 13.724 jiwa dan 11.954 jiwa. Rata-rata sex ratio penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah 110,40, dimana sex ratio terbesar berada di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebesar 118,57 dan yang paling rendah berada di Kota Balikpapan dengan sex ratio sebesar 106,98. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37. Jumlah Penduduk dan *Sex Ratio* Per Kabupaten/Kota Tahun 2013

Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Paser	132.722	117.269	249.991	113.18
Kutai Barat	76.115	67.903	144.018	112.09
Kutai Kartanegara	358.982	324.149	683.131	110.75
Kutai Timur	159.605	134.611	294.216	118.57
Berau	106.185	91.203	197.388	116.43
Penajam Paser Utara	78.606	71.599	150.205	109.79
Balikpapan	307.188	287.134	594.322	106.98
Samarinda	416.975	388.713	805.688	107.27
Bontang	81.718	74.162	155.880	110.19
Mahakam Ulu	13.724	11.954	25.678	114.81
Jumlah	1.731.820	1.568.697	3.300.517	110.40

Sumber: Kaltim dalam Angka (2014)



Gambar 2.13. Peta Pola Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Timur



Sebagaimana pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk di Kalimantan Timur juga tidak merata. Pada tahun 2012 porsi terbesar penduduk Kalimantan Timur berada di Kota Samarinda (20,47%), yang merupakan ibukota Provinsi di Kalimantan Timur. Selebihnya berada di Kabupaten Kutai Kartanegara (17,64%), Kota Balikpapan (15,69%) dan tersebar di kabupaten/kota lain berkisar 0,43-6,48 persen. Pola persebaran penduduk seperti ini sejak tahun 2004 tidak banyak berubah.

Pola persebaran penduduk Kalimantan Timur menurut luas wilayah sangat timpang, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk yang mencolok antar daerah, terutama antar kabupaten dengan kota. Wilayah kabupaten dengan luas 99,17 persen dari wilayah Kalimantan Timur dihuni oleh sekitar 54,35 persen dari total penduduk Kalimantan Timur. Sedangkan selebihnya, yaitu 45,65 persen menetap di kota yang luasnya hanya 0,83 persen dari luas wilayah Kalimantan Timur. Akibatnya kepadatan penduduk di kabupaten hanya berkisar 1-48 jiwa/km<sup>2</sup>, sementara kepadatan penduduk di Kota Balikpapan sebanyak 1.148,35 jiwa/km<sup>2</sup>, Kota Samarinda 1.087,30 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kota Bontang 914,96 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk Kalimantan Timur adalah 18,88 jiwa/km<sup>2</sup>.

Tenaga kerja adalah modal dalam pembangunan ekonomi. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan penduduk. Tenaga Kerja yang aktif secara ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan jumlah penduduk digolongkan sebagai angkatan kerja untuk setiap 100 pekerja. Selama kurun waktu 2011-2012, angkatan kerja di Kalimantan Timur meningkat sebanyak 12.685 orang dari 1.764.696 orang menjadi 1.777.381 orang.

TPAK Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 66,64 persen, mengalami penurunan sebesar 1,87 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Menurut jenis kelamin terlihat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2011 TPAK laki-laki sebesar 89,93 persen dan 2012 turun menjadi 88,36 persen.

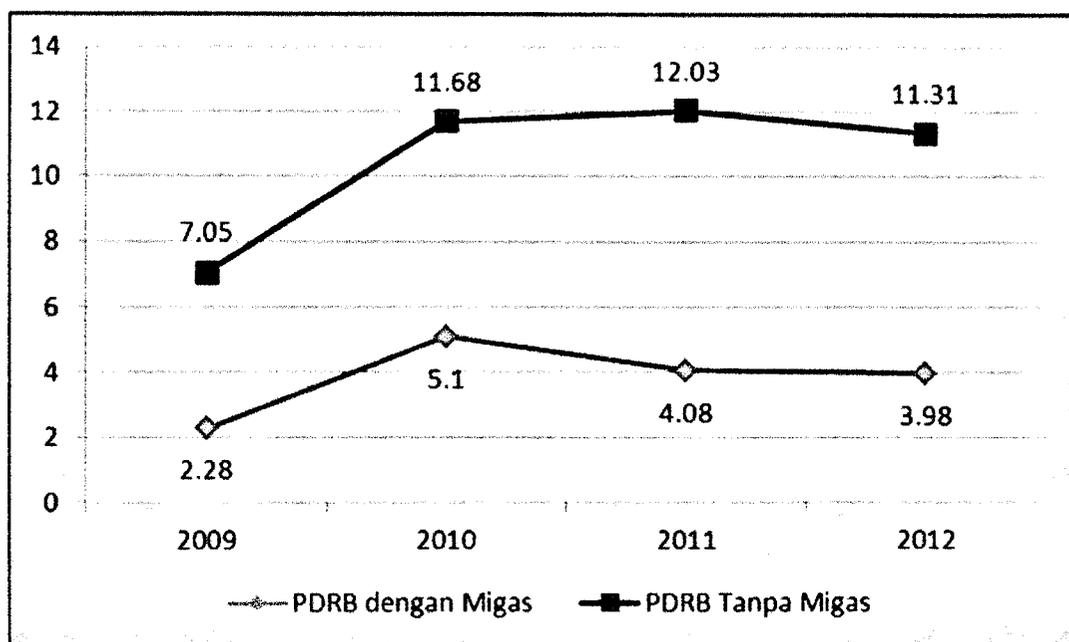
#### 2.4.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk melihat terjadinya peningkatan atau penurunan kinerja perekonomian suatu wilayah dalam suatu periode tertentu, dibutuhkan sebuah indikator yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diperoleh dari turunan nilai Produk Domestik Regional Bruto konstan yang dihitung berdasarkan harga tahun dasar tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai data ekonomi makro berupa nilai tambah bruto yang diperoleh dari berbagai aktivitas yang mencakup seluruh sektor perekonomian

yang terjadi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu menyajikan nilai kuantitatif tentang pembangunan ekonomi yang berdimensi waktu capaian lalu dan sekarang.

Dengan kata lain, salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat perkembangan perekonomian Kalimantan Timur adalah perkembangan besaran PDRB. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa pada tahun berjalan dibanding produksi tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan negatif menunjukkan produksi barang dan jasa pada tahun berjalan lebih rendah daripada produksi tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha pada tahun 2012 sebesar 3,98 persen dengan migas dan non migas sebesar 11,73 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,08 persen dengan migas dan non migas 12,03 persen, maka pada tahun 2012, laju pertumbuhan PDRB dengan migas dan tanpa migas mengalami penurunan.



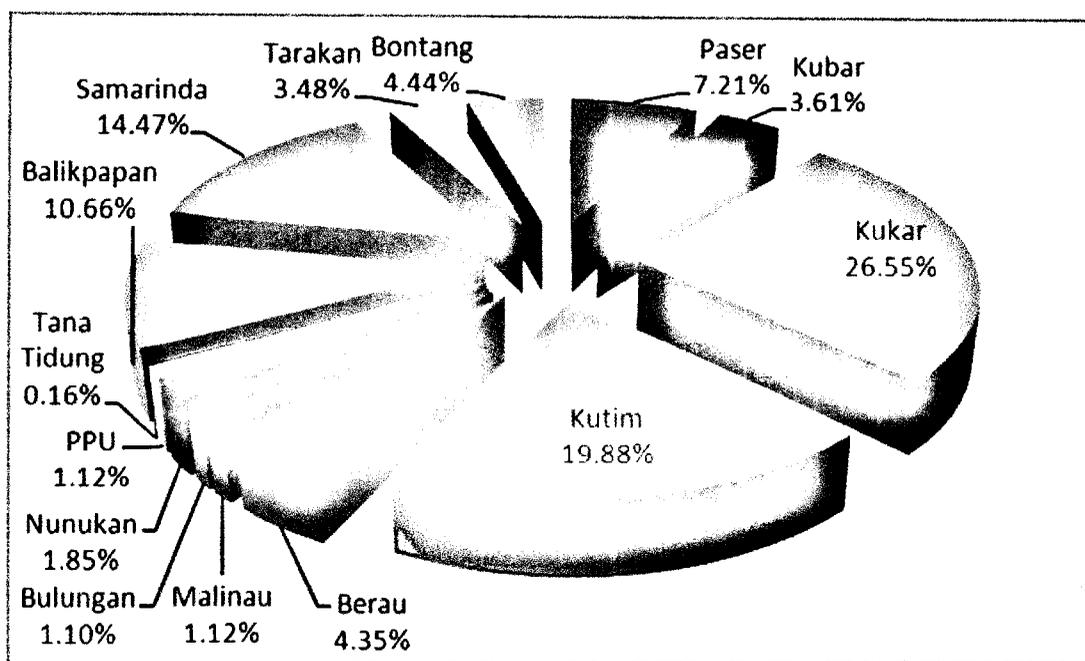
Gambar 2.15. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%) 2009-2012

Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dengan migas selama kurun waktu 2009-2012 diketahui sebesar rata-rata 3,86 per tahun. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur dengan tanpa migas selama kurun waktu tersebut dihitung sebesar 10,52% per tahun.

Hampir semua sektor ekonomi di Kalimantan Timur pada tahun 2012 mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya sektor Industri

Pengolahan yang mengalami perlambatan. Struktur ekonomi Kalimantan Timur tahun 2012 dengan migas maupun non migas tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

PDRB Kalimantan Timur dengan migas menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kalimantan Timur adalah sektor Pertambangan (47,44 persen), Industri Pengolahan (23,50 persen), Perdagangan, Hotel dan Restoran (8,62 persen), serta sektor Pertanian (6,16 persen). Struktur PDRB non migas didominasi oleh empat sektor yaitu sektor Pertambangan (47,91 persen), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (13,25 persen), sektor Pertanian (9,46 persen), serta sektor Industri Pengolahan (7,43 persen).



Gambar 2.16. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Non Migas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (%), 2012

Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun sebesar 3.821.676 jiwa, pendapatan perkapita netto atau pendapatan yang diterima penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 44.649.668 rupiah (dengan migas) mengalami peningkatan 7,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang besarnya 41.415.585 rupiah. Sedangkan pendapatan perkapita non migas meningkat 8,70 persen yaitu dari 24.803.027 rupiah menjadi 26.961.329 rupiah di tahun 2012.

PDRB Kalimantan Timur Menurut penggunaan pada tahun 2012, masih didominasi oleh komponen ekspor impor dengan kontribusi 65,48 persen (net ekspor). Disusul pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 14,48 persen dan pengeluaran untuk konsumsi rumahtangga yaitu 13,46 persen. Sedangkan pertumbuhan untuk semua

komponen tahun 2012 mengalami percepatan dibanding tahun sebelumnya kecuali pada penggunaan perubahan inventori dan ekspor-impor.

PDRB dengan migas Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2012 terbesar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan nilai PDRB sebesar 132,09 triliun rupiah disusul Kota Bontang dengan nilai 68,51 triliun rupiah, dan Kabupaten Kutai Timur dengan nilai 50,18 triliun rupiah. Sedang pertumbuhan ekonomi tertinggi Menurut kabupaten/kota pada tahun 2012 ada di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.38. PDRB Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Rp 000.000)

Sektor	2011	2012
Pertanian	22.866.420	25.796.122
Pertambangan	196.161.893	198.835.276
Industri Pengolahan	91.461.374	98.494.375
Listrik, gas, dan air bersih	1.023.315	1.120.289
Bangunan	10.323.466	12.487.160
Perdagangan, hotel dan restoran	30.907.448	36.129.516
Pengangkutan dan komunikasi	14.044.932	16.652.193
Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	9.292.982	12.122.857
Jasa-jasa	15.326.662	17.463.822
PDRB Dengan Migas	391.408.492	419.101.619
PDRB Tanpa Migas	242.058.704	272.688.461

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur (2013)

Nilai PDRB Kalimantan Timur dengan migas pada tahun 2012 sebesar 128.107.356 juta rupiah dan jika tanpa migas sebesar 90.473.750 juta rupiah. Penambahan nilai PDRB Kalimantan Timur dengan migas antara tahun 2009 dan 2012 adalah mengalami kenaikan sebesar 13%. Sementara itu pada periode yang sama nilai PDRB Kalimantan Timur tanpa migas meningkat sebesar 34%.

Tabel 2.39. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Wilayah Pesisir Kalimantan Timur, 2009-2012 Rp 000.000)

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012
1	Paser	4.833.721	5.670.576	6.285.681	6.827.145
2	Kutai Kartanegara	27.997.018	29.169.411	29.426.708	30.428.221
	Kutai Kartanegara @)	9.288.665	10.507.261	12.537.080	14.825.296
3	Kutai Timur	15.530.332	16.978.570	18.919.768	21.319.122
	Kutai Timur @)	15.313.702	16.814.678	18.759.584	21.163.592
4	Berau	4.259.856	4.602.169	4.967.314	5.364.332
5	Penajam Paser Utara	1.849.722	1.984.292	2.216.080	2.296.179
	Penajam Paser Utara @)	1.119.791	1.232.135	1.448.527	1.512.184
6	Balikpapan	15.405.236	16.205.278	17.410.846	17.846.455
	Balikpapan @)	10.390.240	11.256.708	12.225.721	13.284.050

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012
7	Bontang	23.776.029	22.957.709	21.037.449	19.475.610
	Bontang @)	2.770.374	2.957.586	3.173.121	3.342.144
	Total Kabupaten/Kota	113.423.455	118.632.502	123.659.699	128.107.356
	Total Kabupaten/Kota @	67.394.095	73.766.057	82.420.600	90.473.750

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.  
Catatan: @ Non Migas (Minyak, Gas Bumi dan Industri Migas).

#### 2.4.3. Tipologi Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

Posisi perekonomian yang merupakan gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah di Kalimantan Timur dapat dijelaskan dari hasil analisis tipologi daerah. Menurut Tipologi Daerah, daerah dibagi menjadi empat klasifikasi, yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Kriteria yang digunakan untuk menentukan klasifikasi daerah tersebut adalah:

1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah acuan yang lebih luas (provinsi atau nasional, dan lain lain).
2. Daerah maju tapi tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan daerah acuan yang lebih luas (provinsi atau nasional, dan lain-lain).
3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan daerah acuan yang lebih luas (provinsi atau nasional, dan lain-lain).
4. Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah acuan yang lebih luas (provinsi atau nasional, dan lain-lain).

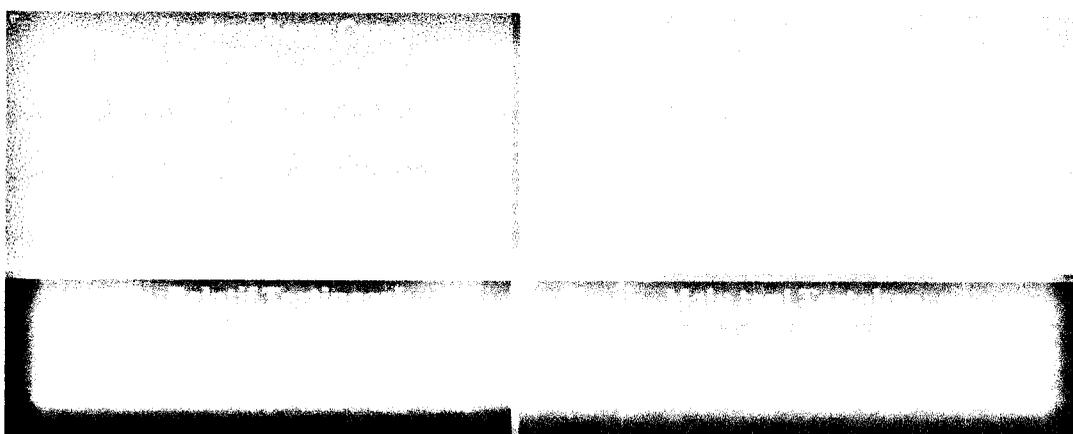
Posisi atau pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah tersebut digambarkan dalam semacam matrix yang dihasilkan dari grafik atau diagram variabel-variabel di atas. Matrix ini terbagi menjadi empat (4) kuadran berdasarkan klasifikasi tersebut. Variabel yang digunakan antara lain adalah:

1. Laju pertumbuhan PDRB per kabupaten (rata-rata).
2. Laju pertumbuhan PDRB rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.
3. PDRB per kapita untuk masing-masing kabupaten (rata-rata).
4. PDRB per kapita rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.

Posisi perekonomian daerah dibagi dua berdasarkan PDRB dengan migas dan tanpa migas (non migas). Maksud dari pembagian ini agar dapat mengetahui besarnya pengaruh komoditas minyak dan gas bumi di Provinsi Kalimantan Timur.

Hasil analisis tipologi daerah dengan memperhitungkan sektor migas menunjukkan Kabupaten Kutai Timur termasuk kedalam tipologi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh karena selain memiliki laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan migas yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi juga memiliki tingkat PDRB (dengan migas) per kapita rata-rata yang lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur. Dari hal ini terlihat bahwa pengaruh sektor pertambangan migas di Kabupaten Kutai Timur (masih) sangat signifikan.

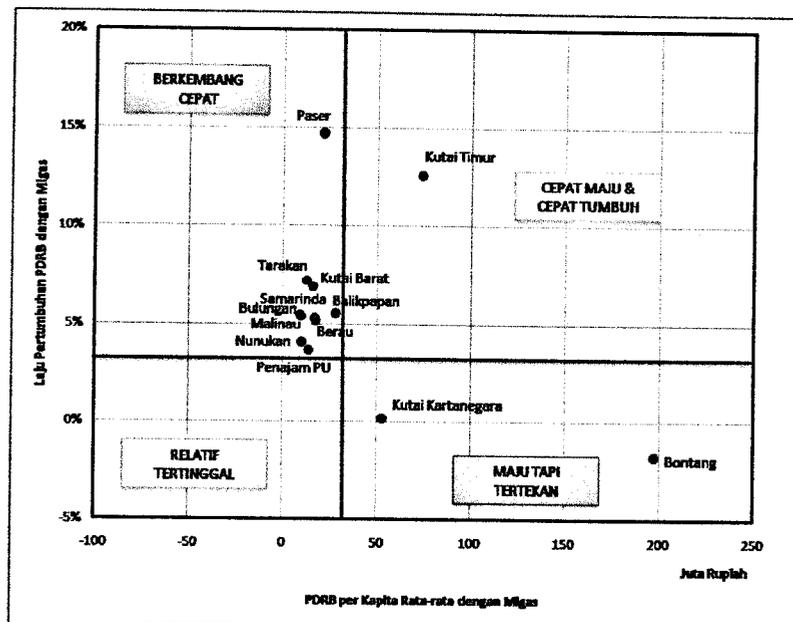
Sementara itu untuk Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Bontang yang termasuk kedalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan memiliki tingkat PDRB dengan migas rata-rata yang lebih tinggi dari provinsi akan tetapi laju pertumbuhannya masih di bawah rata-rata provinsi. Hal ini dapat diartikan bahwa walaupun struktur ekonomi kedua daerah masih didominasi sektor migas akan tetapi perkembangan sektor ini mulai melambat, bahkan Kota Bontang laju pertumbuhannya negatif atau terjadi tren menurun dari tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 2.17. Tipologi Daerah dengan Migas  
Sumber: RTRW Kalimantan Timur (2012)

Daerah-daerah yang termasuk berkembang cepat adalah Kabupaten Paser, Kota Tarakan, Balikpapan, dan Samarinda, Kabupaten Kutai Barat, Berau, Nunukan, Penajam PU, Bulungan, dan Malinau. Daerah-daerah ini memiliki laju pertumbuhan PDRB dengan migas yang lebih tinggi dari provinsi akan tetapi memiliki tingkat PDRB dengan migas per kapita yang lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Berdasarkan analisis tipologi daerah dengan PDRB tanpa migas (non migas) terlihat bahwa Kabupaten Paser dan Kutai Timur masuk ke dalam tipologi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kedua kabupaten memiliki laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan migas yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi serta memiliki tingkat PDRB (dengan migas) per kapita rata-rata yang lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.18. Posisi Perekonomian Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur dengan Migas  
Sumber: RTRW Kalimantan Timur (2012)

Dari hal ini terlihat bahwa sektor pertambangan migas di kedua kabupaten tidak terlalu berpengaruh terhadap posisi perekonomian daerah. Kedua kabupaten memiliki sektor pertambangan di luar migas yaitu batubara yang memiliki sumbangan PDRB yang besar dengan tingkat perkembangan yang relatif cepat. Selain batubara, komoditas lain yang mampu menyumbang PDRB secara signifikan adalah perkebunan kelapa sawit. Perkembangan yang pesat dari kedua komoditas ini mampu membawa kedua kabupaten relatif unggul dalam peta posisi ekonomi.

Sementara itu untuk Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang termasuk kedalam klasifikasi daerah maju tapi tertekan. Walaupun tingkat PDRB tanpa migas rata-rata lebih tinggi dari provinsi akan tetapi laju pertumbuhan ekonominya masih di bawah rata-rata provinsi. Hal ini dapat diartikan bahwa potensi ekonomi di luar migas cukup besar akan tetapi perkembangannya relatif lebih lambat.

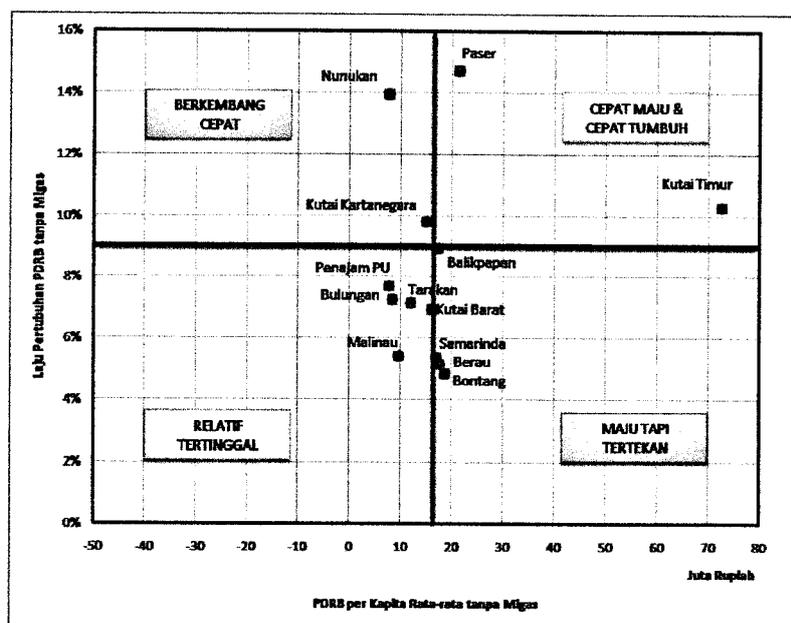


Gambar 2.19. Tipologi Daerah tanpa Migas (non Migas)  
Sumber: RTRW Kalimantan Timur (2012)

Kota Balikpapan dan Samarinda memiliki PDRB dari sektor perdagangan, hotel dan restoran yang relatif besar, akan tetapi tingkat pertumbuhannya tidak terlalu cepat. Untuk Kota Balikpapan perkembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran sangat terkait dengan sektor migas (pengolahan). Sementara itu di Kota Samarinda sektor ini terkait dengan industri pengolahan non migas dan sektor jasa angkutan, keuangan dan jasa pemerintahan. Sektor industri pengolahan non migas memiliki kontribusi yang cukup besar di Samarinda.

Daerah-daerah yang termasuk berkembang cepat adalah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Nunukan. Daerah-daerah ini memiliki laju pertumbuhan PDRB tanpa migas yang lebih tinggi dari provinsi akan tetapi tingkat PDRB tanpa migas per kapita kondisinya lebih rendah dari rata-rata provinsi. Sektor pertambangan non migas yaitu batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara berkembang dengan pesat akan tetapi hasil produksinya belum sebesar Kabupaten Kutai Timur dan Paser. Selain itu, sektor pertanian di Kutai Kartanegara perkembangannya cukup baik, akan tetapi dari sisi produksi belum bisa bersaing dengan komoditas pertambangan (migas dan batubara).

Kabupaten Malinau, Penajam PU, Bulungan, Kutai Barat dan Kota Tarakan termasuk ke dalam tipologi relatif tertinggal, dimana baik tingkat PDRB per kapita non migas maupun laju pertumbuhan PDRB non migas daerah-daerah tersebut lebih rendah dari rata-rata provinsi Kalimantan Timur.



Gambar 2.20. Posisi Perekonomian Kabupaten dan Kota di Kalimantan Timur tanpa Migas  
Sumber: RTRW Kalimantan Timur (2012)

Berdasarkan hasil analisis tipologi daerah yang didasarkan atas PDRB per kapita dengan migas dan non migas, ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan berkaitan dengan Kapet Sasamba yang berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi Kalimantan Timur. Beberapa kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

Kabupaten Kutai Kartanegara masih tergantung kepada sektor migas (sub sektor pertambangan migas), sedangkan sektor pertambangan non migas (batubara) walaupun perkembangannya cukup pesat akan tetapi kontribusinya belum sebesar migas. Sektor migas laju perkembangannya sudah tidak sepesat dulu atau dapat dikatakan. Sementara itu sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup signifikan akan tetapi jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan sektor pertambangan migas.

Seperti halnya Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan pun masih tergantung pada sektor migas, akan tetapi tidak pada sub sektor pertambangan melainkan pada sub sektor industri pengolahannya (pengilangan minyak). Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran cukup besar andilnya dalam memberikan kontribusi PDRB. Perkembangan sektor ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan kegiatan pengilangan minyak serta kedudukan Balikpapan sebagai pintu masuk Kalimantan Timur dari udara dan laut.

Kota Samarinda memiliki leading sektor di bidang perdagangan dan jasa, terutama perdagangan, hotel, dan restoran. Selain itu sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar pula walaupun tidak sebesar perdagangan, hotel, dan restoran. Walaupun kedua sektor ini masih mendominasi perekonomian Kota Samarinda akan tetapi tingkat pertumbuhannya cenderung melambat.

#### **2.4.4. Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir**

Kearifan lokal yang sudah lama mengakar dalam kehidupan masyarakat nelayan ini dapat dijadikan sebagai landasan sistem pengelolaan sumberdaya perikanan pesisir dan laut yang optimal. Kearifan lokal yang digali dari masyarakat ini menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai lokal dalam menjalankan usaha perikanan berdasarkan kepercayaan yang mereka miliki.

##### **a. Kepercayaan dan Pantangan**

Masyarakat nelayan di kabupaten/kota di wilayah pesisir Kalimantan Timur memiliki beragam kepercayaan dan pantangan berkaitan dengan aktivitas sebelum melakukan penangkapan, di saat melakukan penangkapan ataupun setelah melakukan penangkapan ikan. Secara terperinci tentang kepercayaan masyarakat nelayan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.40. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Kepercayaan Masyarakat Nelayan Kaltim

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Mengadakan selamat laut saat paceklik atau hasil tangkapan menurun terutama sekitar bulan 3 dan 4 disertai dengan membuang sesaji ke laut.	Babulu Laut (Kec. Babulu)
2.	Melakukan selamat kampung atau "Belintang" saat menjelang waktu musim ikan dan disertai dengan menabur beras saat akan memasang alat tangkap belat ke laut.	Perepat (Kec. Tanah Grogot)
3.	Percaya pada dewa laut Junjung Buih dengan memberi sesaji yang dilarung ke laut, sebagai bentuk penghormatan, mohon petunjuk wilayah penangkapan (melalui mimpi) dan memperoleh hasil tangkapan yang banyak.	Martadinata (Teluk Pandan)
4.	Mengadakan pesta laut/selamatan kampung di tanjung, menyembelih kambing dan ayam hasil sumbangan masyarakat (kepala kambing di tanam). Selamatan dipimpin tokoh adat membaca shalawat dan doa tolak bala, lalu bersantap bersama dengan tujuan memperoleh keselamatan, terhindar bencana bagi seluruh warga, dan hasil tangkapan melimpah bagi nelayan.	Muara Bengalon (Bengalon)
5.	Mempercayai waktu dan hari baik tertentu sebagai pedoman sebelum melaut karena perbedaan waktu diyakini mempunyai nilai berbeda pula. Mereka percaya kalau memulai aktivitas pada waktu tertentu, maka akan memperoleh hasil tangkapan maksimal, sehingga jika terlambat atau berhalangan maka biasanya nelayan tidak melaut.	Muara Bengalon (Bengalon) Sangkima Lama (Sangata Selatan)
6.	Mengadakan selamat parit/selamatan kampung, memotong kambing dan kelengkapannya. Melibatkan masyarakat untuk berkontribusi bahkan pengadaan kambing dibantu oleh pemerintah desa. Jika tidak melakukan selamat kampung diyakini bakal terkena bencana dan hasil tangkapan berkurang.	Selangkau (Kaliurang)
7.	Membuang telur sebelum keluar dari muara, saat akan berangkat melaut yang dipercayai sebagai permintaan izin, penghormatan dan terima kasih terhadap penjaga laut sehingga aktivitas di laut dapat berlangsung lancar dan memperoleh hasil maksimal sepanjang tahun.	Selangkau (Kaliurang)
8.	Kapal baru saat diturunkan pertama kali harus diawali selamatan, bersedekah dengan mengundang tetangga atau kerabat. Hal ini dipercayai dapat mendatangkan keselamatan. Bagi nelayan agungan setelah memperbaiki kapal (tiap 3-4 bulan sekali), saat akan diturunkan juga melakukan doa selamat bersama.	Benua Baru Hilir dan P. Miyang (Sangkulirang)
9.	Ketika membeli dan menurunkan perahu pertama kali diawali dengan selamatan, bersedekah mengundang makan-makan tetangga atau kerabat. Hal itu diyakini mendatangkan keselamatan bagi pemilik perahu dan memberikan hasil tangkapan banyak saat melaut.	Benua Baru Hulu (Sangkulirang), Sekerat (Bengalon) Kenyamukan (Sangata Utara)
10.	Bagi nelayan bagan, acara selamatan dilakukan saat membuat bagan baru yang dibantu kerabat, tetangga atau teman-teman. Selamatan diadakan di rumah pemilik bagan, dibacakan doa selamat dan tolak bala dengan menghidangkan makanan untuk disantap bersama, sebagai wujud rasa syukur dan diyakini berdampak terhadap hasil tangkapan saat bagan beroperasi.	Sekerat (Bengalon)
11.	Acara selamatan saat menurunkan perahu baru, membaca "barjanji" (shalawat nabi), doa selamat dengan mengundang makan-makan tetangga atau kerabat. Hal itu diyakini akan mendatangkan keselamatan bagi pemilik perahu dan memberikan hasil tangkapan banyak saat melaut.	Sangkima Bandara (Sangata Selatan)

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
12.	Mengadakan selamatan kampung setiap bulan Syafar, untuk menolak bala dan memperoleh keselamatan dalam berusaha. Masyarakat bergotong-royong menyediakan makanan dan dibawa ke muara untuk disantap bersama. Berkumpul seluruh warga dengan kepala dusun dan ketua-ketua RT. Diyakini setiap muara ada penunggunya sehingga tidak boleh ada yang takabur dan harus menghormati.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
13.	Jika menurunkan perahu mengadakan selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga sekitar. Membaca doa selamat dan tolak bala dengan harapan keselamatan bagi yang memiliki perahu dan hasil tangkapan yang berlimpah saat melaut.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
14.	Sebagian nelayan Kenyamukan mengadakan acara selamatan kampung dengan ritual yang dijalankan di Teluk Lombok sebagai asal nelayan Kenyamukan untuk tujuan memperoleh keselamatan dan menghilangkan penyakit dari kampung. Di Teluk Lombok ada seorang dukun (tokoh agama yang dihormati) yang dipercaya memimpin upacara selamatan, sehingga perlengkapan ritual dipenuhi secara berkelompok. Jika ada kelebihan rezeki, masing-masing nelayan juga membawa sesajian secara pribadi saat menghadiri acara selamatan tersebut. Sebagian sesaji dilarung ke laut dengan menggunakan rakit, sebagian lagi disantap bersama.	Kenyamukan (Sangata Utara)
15.	Masyarskat nelayan biasa melaksanakan pesta adat "Pantai Lango" yang diadakan dalam rangka memperingati bulan Safar. Rangkaian upacara yang diadakan adalah pelarungan sesaji ke laut dengan tujuan agar penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan diberi kelimpahan hasil laut.	Paser
16.	Acara Upacara Adat "Petik Laut Maparange " Sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir di Kabupaten Paser. Upacara adat ini sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang melimpahkan banyaknya hasil tangkapan nelayan di sepanjang pantai Kabupaten Paser. Upaya ini sebagai wujud dari kearifan lokal masyarakat dengan mempertimbangkan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada secara turun temurun dari nenek moyang mereka.	Paser
17.	Ritual "kasih makan karang" yang diadakan setiap akhir tahun dengan cara menghanyutkan sajian berupa pisang ambon, kelapa dan telur kelaut. Mereka berkeyakinan bahwa laut telah membagi rezki, sehingga harus berterimakasih dengan memberi persembahan kepada laut.	Bontang
18	Jika terjadi musibah yang menimpa keluarga akan dilakukan ritual "membuang ke air" yang bertujuan menolak bala dengan cara menghanyutkan sajian berupa pisang ambon, kelapa dan telur kelaut yang dipersembahkan untk penunggu laut.	Bontang

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK -Unmul

Selain beragam kepercayaan yang berkaitan dengan aktivitas penangkapan, terdapat pula pantangan-pantangan yang tabu untuk dilakukan oleh masyarakat nelayan. Mereka meyakini pelanggaran terhadap pantangan-pantangan tersebut berdampak terhadap kurangnya hasil tangkapan, bencana, wabah penyakit dan ancaman terhadap

keselamatan jiwa mereka beserta keluarga. Secara terperinci beragam pantangan masyarakat nelayan di pesisir Kabupaten Kutai Timur dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.41. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Pantangan bagi Masyarakat Nelayan

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Saat akan turun melaut anak yang ditinggal tidak boleh menangis dan air yang berada di dalam perahu tidak boleh dibuang ke laut.	Muara Telake (Kec. Long Kali)
2.	Tidak boleh melakukan penangkapan udang atau ikan hingga lewat tengah malam (lewat jam 12 malam), jika dilanggar musim ikan dan udang akan cepat berakhir.	Babulu Laut (Kec. Babulu)
3.	Tidak diperbolehkan bakar udang di atas tambak karena bisa menyebabkan gagal panen.	Labangka (Kec. Babulu)
4.	Tidak sembarangan ketika ingin membuang hajat (buang air kecil atau buang air besar) di perairan saat melakukan aktivitas penangkapan. Jangan di sekitar rumpun dan harus permisi dulu pada penunggu laut dengan cara menjentikkan jari ke air.	Martadinata, (Teluk Pandan)
5.	Tidak boleh menangkap ikan pada hari Jum'at, jika dilanggar bisa mendapat bahaya atau terserang penyakit. Ada sanksi (denda) bagi nelayan lokal yang melakukan pelanggaran yaitu harus membayar denda berupa kambing, ayam, telur maupun beras ketan untuk membaca doa selamat dan tanda maaf pada penunggu muara.	Muara Bengalon (Bengalon)
6.	Tidak boleh saat akan melaut setelah keluar rumah lalu kembali lagi. Jika keluar masuk rumah dilakukan, maka akan berdampak pada kelancaran aktivitas dan biasanya sulit mendapatkan hasil tangkapan maksimal.	Muara Bengalon (Bengalon)
7.	Tidak boleh menyebut nama binatang yang berkaki empat karena sumberdaya yang ingin ditangkap adalah jenis hewan tidak berkaki jadi tidak boleh menyebut nama binatang yang bukan sejenis karena berdampak tidak memperoleh hasil tangkapan.	Muara Bengalon (Bengalon)
8.	Jika melihat kejadian aneh di tengah laut tidak boleh ditunjuk, karena di laut terdapat banyak hal-hal gaib yang secara kasat mata tidak terlihat nyata. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan nelayan.	Muara Bengalon (Bengalon)
9.	Tidak boleh menangkap ikan hiu tutul/loreng yang memiliki panjang hingga 10 m karena diyakini merupakan nenek moyangnya ikan. Jika dilanggar, orang yang menangkap bisa jatuh sakit dan meninggal dunia.	Muara Bengalon (Bengalon)
10.	Tidak boleh melaut pada malam Jum'at dan pagi Jum'at, tetapi aktivitas penangkapan setelah sholat Jum'at tidak dipermasalahkan. Jika dilanggar biasanya terjadi badai.	Selangkau (Kaliurang)
11.	Tidak boleh saat akan melaut naik-turun dari kapal. Apabila hal ini dilakukan maka akan berdampak pada kelancaran aktivitas dan sulit mendapatkan hasil yang maksimal.	Selangkau, Kaliurang, Benua Baru Hilir (Sangkulirang)
12.	Tidak boleh membawa bekal melaut berupa beras ketan atau nasi ketan karena merupakan makanan sakral dalam sesajian untuk para penguasa atau penjaga laut, sehingga akan mengganggu keselamatan nelayan.	Selangkau (Kaliurang)
13.	Jika ada orang yang mau ikut melaut maka tidak boleh membatalkan janjinya dengan mengatakan tidak jadi atau berhalangan, karena dikhawatirkan menyebabkan tidak jadi memperoleh hasil tangkapan yang maksimal.	Selangkau (Kaliurang)
14.	Pantang menginjak atau menendang ikan hasil tangkapan di kapal	Selangkau

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
	karena bermakna menyia-nyiakan dan bentuk sifat takabur yang berdampak terhadap sedikitnya hasil tangkapan.	(Kaliurang)
15.	Tidak boleh membawa mencuci panci di laut sebelum berangkat melaut. maknanya makanan dalam periuk nelayan tidak boleh habis baru mencari lagi atau tidak boleh menghabiskan apa yang dimiliki sekarang sebelum rezeki yang lain diperoleh, ada simpanan saat musim paceklik.	Benua Baru Hilir, Hulu dan P. Miang, (Sangkulirang)
16.	Tidak mau ditanya atau dipanggil saat sudah menuju ke arah perahu. Pantangan ini bermakna bahwa sesaat setelah keluar dari rumah sampai ke kapal tidak boleh ada rintangan yang mengakibatkan ketidakberhasilan dalam mendapatkan hasil tangkapan maksimal.	Benua Baru Hilir, Hulu dan P. Miang (Sangkulirang)
17.	Tidak boleh ditegur atau dipesani duluan (minta dijual ikan dalam jumlah tertentu) saat akan berangkat melaut oleh orang lain, karena bisa jadi malah tidak memperoleh ikan tangkapan.	Benua Baru Hulu (Sangkulirang)
18.	Tidak boleh melakukan kegiatan penangkapan ikan pada hari Jum'at, jika dilanggar bisa dikucilkan warga lain dan mendapat bahaya di laut atau terserang penyakit.	Benua Baru Hulu (Sangkulirang) Sengkerat (Bengalon)
19.	Pantang pemilik bagan dan anak buahnya berbicara takabur (terlalu yakin mendapat hasil tangkapan) dan dipesani hasil tangkapan duluan, karena pada dasarnya rizki hasil tangkapan adalah karunia Sang Pencipta dan tidak bisa ditentukan perolehannya.	Sekerat (Bengalon)
20.	Tidak boleh melaut saat hari Jum'at atau saat ada warga kampung yang meninggal dunia. Jika dilanggar akan dikucilkan warga lain dan dipercaya mendatangkan musibah bagi yang melanggarnya.	Sangkima Bandara (Sangkulirang)
21.	Malam Jum'at atau pagi Jum'at tidak boleh melaut (terutama nelayan trawl). Jika ke laut juga, maka hasil tangkapan sedikit bahkan tidak ada, bisa terkena musibah di tengah laut seperti kapal rusak atau mesin kapal mati.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
22.	Pantangan bagi nelayan pancing : anaknya tidak boleh menangis saat mau berangkat memancing, tidak mau ditanya atau dipanggil saat sudah menuju ke arah perahu, saat membawa peralatan macing tidak boleh sampai ada yang jatuh sebelum sampai di kapal, setelah pulang memancing, hasil tangkapan harus di bawah dulu ke dalam rumah. Kesemua pantangan tersebut bermakna menjaga kelancaran dalam beraktivitas, dengan harapan memperoleh hasil tangkapan yang maksimal.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
23.	Tidak boleh melakukan kegiatan penangkapan pada hari Jum'at dan saat tanggal kelahiran nelayan yang bersangkutan. Jika hal tersebut dilanggar nelayan tersebut bisa mendapat bencana seperti terkena gelombang besar, mesin kapal mati, kecelakaan di laut dan sebagainya.	Kenyamukan (Sangata Utara)
24.	Nelayan tidak boleh membawa ketan kelaut dan tidak boleh menyebut kata-kata umpatan atau nama binatang yang berkaki empat karena sumberdaya yang ingin ditangkap adalah jenis hewan tidak berkaki jadi tidak boleh menyebut nama binatang yang bukan sejenis karena berdampak tidak memperoleh hasil tangkapan. Selain itu petambak tidak boleh membakar udang di tambak karena dipercaya dapat menyebabkan gagal panen.	Air Mati (Kec. Tanah Grogot)
25.	Tidak boleh takabur tentang hasil tangkapan atau menjaga omongan sebelum melaut dan tidak boleh membakar udang diatas tambak.	Lori (Kec. Tj. Aru)

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

**b. Pengetahuan dan Teknologi tentang Alat Tangkap yang digunakan**

Usaha penangkapan ikan yang tergantung dengan alam dan penuh resiko menyebabkan mereka menghadapi masa-masa ikan melimpah dan masa-masa paceklik secara bergantian. Kondisi tersebut melahirkan sistem pengetahuan dan penerapan teknologi tertentu agar mereka dapat beradaptasi dan tetap survive dalam segala keadaan.

Tabel 2.42. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Pengetahuan dan Teknologi tentang Alat Tangkap yang Digunakan

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Alat tangkap bubu yang dibuat sendiri dan dipertahankan terus untuk menangkap ikan oleh nelayan merupakan upaya nelayan untuk ikut menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya perikanan diwilayahnya.	Nenang - Penajam Pasir Utara
2.	Alat tangkap jaring memiliki mata jaring 2 inchi ukuran 2 m yang selektif menangkap ikan-ikan berukuran besar, sedangkan anak ikan yang berukuran kecil bisa lolos dan berkembangbiak menjadi besar.	Martadinata (Teluk Pandan)
3.	Alat tangkap rengge digunakan untuk menangkap bawal putih dan kakap merah. Alat tangkap lainnya adalah rengge gondrong untuk menangkap udang (bintik, putih dan windu) serta ikan (menangin, otek, sembilang, gulamah dan pari).	Muara Bengalon (Bengalon)
4.	Alat tangkap yang digunakan adalah jaring, pancing, rawai dan belat yang termasuk klasifikasi alat tangkap ramah lingkungan, karena selektif dalam hasil tangkapan (bisa terukur). Kegiatan pemancingan dilakukan sepanjang tahun, baik itu musim utara maupun musim Selatan terutama saat air tenang.	Selangkau (Kaliurang)
5.	Alat tangkap yang digunakan adalah pancing ulur. Beberapa jenis ikan hasil tangkapan dengan pancing ulur adalah beronang, belanak, putih, ketamba dan kerapu.	P. Miang (Sangkulirang)
6.	Alat tangkap agungan adalah modifikasi purse sein merupakan alat tangkap selektif dengan menggunakan mata jaring sebesar 2-2,5 inch, sehingga ikan kecil lolos dan yang tertangkap hanya ikan besar. Kelebihan lainnya bisa menahan arus deras dan tidak timbul karena mata jaringnya cukup besar sehingga terhindar dari kerusakan. Alat tangkap ini merupakan modifikasi purse sein	Benua Baru Hilir (Sangkulirang)
7.	Penggunaan alat tangkap tergantung keberadaan umpan. Jika umpan banyak maka menggunakan rawai, jika sedikit menggunakan pancing (menggunakan umpan udang hidup).	Benua Baru Hulu (Sangkulirang)
8.	Alat tangkap yang digunakan adalah 2 jenis pancing, yaitu pancing rinta dan pancing ladung. Jenis ikan hasil tangkapan alat pancing adalah : kembung, bambangan, tongkol, tenggiri, juku efa dan putih.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
9.	Nelayan umumnya menggunakan 2 jenis alat tangkap, yaitu pancing dan jaring. Pancing digunakan menangkap ikan di laut saat musim teduh (musim utara), sedangkan jaring digunakan menangkap ikan saat musim gelombang (musim selatan) karena bisa dipasang di daerah teluk yang relatif aman dari terjangan gelombang.	Kenyamukan (Sangata Utara)
10.	Pengoperasian bagan tidak menggunakan umpan dan hanya memanfaatkan cahaya lampu untuk menarik ikan datang berkumpul di jaring yang sudah dibentang di bawah pondok. Kegiatan penangkapan hanya dilakukan pada malam hari terutama saat bulan gelap atau paling tidak saat bulan sabit terutama di musim teduh (utara).	Sekerat (Bengalon)

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

### c. Pengetahuan dan Teknologi tentang Musim Penangkapan

Pengetahuan tentang musim akan sangat menentukan keberhasilan nelayan dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan. Menandai keadaan bulan yang berkaitan dengan pasang surut air laut menjadi pedoman bagi nelayan untuk menentukan apakah mereka memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah banyak, atau jenis ikan apa yang akan tertangkap.

Tabel 2.43. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Pengetahuan dan Teknologi tentang Musim Penangkapan

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Dalam 1 bulan akan ada waktu 10 hari yang merupakan musim ikan. Musim tersebut ditandai dengan kondisi air "nyorong" (air dalam, mencapai 2 meter atau lebih) sebagai tanda banyak ikan dan kondisi air "konda" (air dangkal) pertanda tidak sedang musim ikan.	Melahing (Bontang)
2.	Musim ikan juga di tandai dengan adanya angin Selatan dimana air dalam di pagi hari dan dangkal di sore hari, atau angin Utara dimana air dalam di sore hari dan dangkal di pagi hari.	Melahing (Bontang)
3.	Musim ikan terutama ikan bawis ditandai jika tumbuh bunga lamun ( <i>lusai</i> ) yang terlihat di dasar perairan dan menampakkan bunga berwarna putih.	Bontang
4.	Musim ikan ditandai dengan keadaan bulan dan pasang surut air laut. Saat musim selatan kondisi air pasang di pagi hari, sedangkan saat musim utara kondisi air pasang di sore hari. Jika air seimbang pagi dan sore dinamakan musim barat dan timur. Pada kondisi musim barat atau timur air payau turun termasuk racun (limbah) di sekitarnya sehingga mengakibatkan kematian ikan dan susah untuk memperoleh ikan.	Martadinata (Teluk Pandan)
5.	Musim penangkapan udang dengan rengge gondrong dimulai dari bulan Juni-Oktober, dengan puncak musim pada bulan Juli-Agustus. Daerah penangkapan ( <i>fishing ground</i> ) berkisar di dekat muara. Operasi penangkapan dilakukan siang hari. Pada saat air konda (tenang), nelayan tidak melakukan penangkapan dimana udang berada dalam kolom dasar perairan.	Muara Bengalon (Bengalon)
6.	Musim Selatan (biasanya bulan 6-10) adalah musim udang papai, ditandai dengan air laut berwarna merah kecoklatan (penangkapan dilakukan dengan menggunakan serok). Menandai keberadaan ikan dapat juga dengan mendengarkan suara ikan di perairan.	Muara Bengalon (Bengalon)
7.	Musim utara sering terjadi gelombang besar sehingga hasil tangkapan berkurang dikenal sebagai musim paceklik. Adapun musim ikan (musim selatan) dimulai sejak bulan 3-11 dan puncaknya pada bulan 5-9 setiap tahun. Bulan 8 biasanya yang banyak muncul adalah ikan demersal (laut dalam).	Muara Bengalon (Bengalon)
8.	Musim utara adalah musim teduh sehingga nelayan mudah menangkap ikan di laut (antara bulan 10-6), sedangkan musim selatan (antara bulan 7-9) biasanya berombak besar sehingga nelayan tidak melaut dan mencari usaha lain seperti berladang.	Selangkau (Kaliurang) Sekerat (Sangkulirang)
9.	Kegiatan penangkapan dilakukan sepanjang tahun. Saat nyorong penangkapan dilakukan pada lokasi sekitar karang, karena gelombang agak besar. Saat konda penangkapan dilakukan pada lokasi dengan	P. Miyang (Sangkulirang)

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
	kedalaman minimal 15 m. Kegiatan pemancingan dilakukan sejak siang sampai sore hari dan mencapai puncaknya pada musim selatan (Juni-Oktober).	
10.	Melihat keadaan bulan sebagai patokan musim banyak ikan dan paceklik. Saat bulan 6 -7 (hidup bulan hari ke-21) dinamakan mata konda, maka berangkat melaut setelah subuh agar saat sampai ke laut masih belum terlalu siang dan udang masih banyak. Saat nyorong muda (hidup bulan 9) kondisi air biasanya tenang dan keruh sehingga banyak terdapat ikan.	Benua Baru Hulu (Sangkulirang)
11.	Musim ikan ditandai dengan melihat bulan. Misalnya saat bulan terbelah dua (naik 8) atau dinamakan mata konda, maka ikan rintaan seperti ikan putih akan berada di pinggir sehingga penangkapan mudah dilakukan di sungai. Saat nyorong arus tidak terlalu besar maka "meladung" (memancing ikan dasar) ke tengah laut, tidak ke sungai. Saat cuaca mendung biasanya ikan tenggiri dan tongkol naik, jika cuaca panas maka "meladung".	Sangkima Bandara (Sangata Selatan)
12.	Musim tangkap ikan yang dianggap paling ideal dan menguntungkan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan nelayan adalah pada musim Angin Utara. Biasanya aktivitas dimulai sejak subuh/pagi hari (pukul 05.00 - 17.00 wita) dan sore hari (dari pukul 16.00 - 05.00 wita).	Kukar

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

#### d. Pengetahuan dan Teknologi tentang Fenomena atau Gejala Alam

Berbagai fenomena atau gejala alam menjadi pedoman bagi nelayan lokal yang menggunakan teknologi penangkapan sederhana untuk menandai keberadaan ikan dan kemunculan jenis ikan tertentu.

Tabel 2.44. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Pengetahuan dan Teknologi tentang Fenomena atau Gejala Alam

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Ketika matahari nampak merah diikuti awan yang kemerahan di sore hari selama beberapa minggu menandakan ikan dari laut naik ke atas, memijah dan bertelur di sekitar bakau dan batu karang. Induk ikan yang sudah bertelur mudah tertangkap karena hanya berenang di sekitar wilayah tersebut, sedangkan telur ikan dibiarkan menetas agar dapat berkembangbiak.	Martadinata (Teluk Pandan)
2.	Air laut yang berwarna kemerah-merahan merupakan pertanda keberadaan gerombolan udang rebon.	Sekerat (Bengalon)
3.	Jika terjadi kilat tiga kali berturut-turut sampai menyentuh permukaan laut (istilah nelayan menyentuh alis laut), pertanda akan datang badai gelombang. Nelayan langsung memutuskan menghentikan aktivitas penangkapan dan kembali ke darat, bila berada di laut. Jika masih di darat maka nelayan akan memutuskan untuk tidak berangkat melaut.	Muara Bengalon (Bengalon)
3.	Menandai keberadaan ikan dengan mendengarkan suara ikan dengan pancaindera pendengaran (telinga) di permukaan perairan. Suara ikan gulamah dan layur ditandai bunyinya seperti suara besi dipukul. Sedangkan jika banyak terdapat udang, suara yang terdengar adalah seperti suara meletup-letup.	Muara Bengalon (Bengalon)
4.	Keberadaan gerombolan ikan dapat dilihat dari bentuk	Benua Baru

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
	pengelompokkan dan caranya muncul dipermukaan air. Gerombolan ikan kembung di siang hari dikenali dari penutup insangnya yang mengkilap di kejauhan. Siang hari keberadaan gerombolan ikan tembang dikenali dari percikan air yang ditimbulkan secara bersamaan. Ikan tongkol pada siang hari dikenali dari caranya menyambar ke permukaan secara bersamaan. Ikan putih dan trakulu baik siang maupun malam hari apabila mendengar suara, gerombolannya langsung menyebar sebentar kemudian menyatu lagi.	Hilir (Sangkulirang)
5.	Memperhatikan kondisi cuaca saat melaut. Jika ada awan hitam di selatan, biasanya angin dan hujan lebat berada di arah selatan. Sebaliknya jika ada awan hitam di utara biasanya angin dan hujan berada di arah utara.	Benua Baru Hulu (Sangkulirang)
6.	Memperhatikan arah angin dalam melakukan penangkapan ikan. Angin darat (Barat Daya) ikan permukaan menghilang, yang banyak adalah ikan dasar (misal : tenggiri, terkulu). Sedangkan saat angin laut (Timur Laut) ikan juga biasanya banyak terdapat.	Sangkima Bandara (Sangata Selatan)
7.	Nelayan pancing memperhatikan saat musim tanam padi tiba. Pada waktu-waktu tersebut biasanya ikan-ikan liar (kembung dan tongkol) muncul dalam jumlah relatif banyak.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
8.	Jika terjadi gelombang besar, biasanya setelah teduh bagus untuk melaut karena banyak ikan. Memancing baik dilakukan saat bulan gelap, sedangkan saat terang bulan penangkapan ikan baik dilakukan di sekitar batu karang.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
9.	Keberadaan ikan kembung biasanya di sekitar Muara Sangatta yang merupakan tempat pertemuan antara air keruh dengan air laut yang biru. Air laut akan tampak berbuih-buih karena ikan kembung meloncat-loncat di permukaan.	Kenyamukan (Sangata Utara)
10.	Musim hujan biasanya berpengaruh buruk pada usaha budidaya rumput laut, terutama jika ditandai dengan warna air yang cenderung lebih gelap dan rasanya lebih tawar dari biasanya.	Bontang.

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

#### e. Pengetahuan dan Teknologi tentang Penandaan Wilayah Penangkapan

Berdasarkan pengalaman biasanya nelayan mengenali daerah-daerah yang banyak terdapat ikannya Untuk menandai wilayah tangkapan mereka membuat rumpon yang berfungsi sebagai penanda sekaligus menjadi habitat ikan.

Tabel 2.45. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Pengetahuan dan Teknologi tentang Penandaan Wilayah Penangkapan

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Membuat rumpon di sekitar bakau sebagai habitat ikan-ikan kecil akan memudahkan melakukan penangkapan. Keberadaan burung di permukaan air menandakan keberadaan ikan. Keberadaan terumbu karang juga menjadi tempat berkembangnya ikan.	Selangkau (Kaliurang) Sangkima Lama (Sangata Selatan)
2.	Pemasangan rumpon dilakukan pada daerah-daerah dimana nelayan sebelumnya pernah memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya keberadaan rumpon ditandai dengan memperhatikan bentang atau posisi gunung atau daratan terdekat. Adapun tandanya terdiri atas dua titik yang tegak lurus dari rumpon, dalam istilah nelayan disebut posisi menggunting.	Selangkau (Kaliurang) Sangkima Lama (Sangata Selatan)

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
3.	Setelah mendapatkan daerah penangkapan dengan hasil banyak, nelayan menandai daerah tersebut dengan memperhatikan bentang, posisi gunung atau daratan terdekat. Lokasi-lokasi penangkapan tersebut diberi nama, seperti: Batu Hilir, Batu Tengah, Batu Cermin, Miang Besar, dan lain-lain.	P. Miang (Sangkulirang)
4.	Daerah perairan yang cocok untuk meletakkan bagan (pondok) adalah daerah yang berbatu karang karena diyakini banyak terdapat berjenis-jenis ikan, terlindung dari gelombang (dekat teluk) dan bukan daerah perlintasan atau lalu lintas kapal.	Sekerat (Bengalon)

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

#### f. Etika dan Aturan dalam Kegiatan Penangkapan dan Pemasaran Hasil Tangkapan

Masyarakat nelayan lokal memiliki etika dan aturan tersendiri berkaitan dengan aktivitas penangkapan dan pemasaran hasil perikanan. Uraian tentang etika dan aturan dalam kegiatan penangkapan dan pemasaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Etika dan Aturan dalam Kegiatan Penangkapan dan Pemasaran Ikan

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buahnya (nelayan pancing atau rawai), dimana satu kapal bisa terdiri dari 2 sampai 3 orang. Biasanya pemilik kapal menanggung biaya operasional selanjutnya hasil tangkapan dibagi dengan anak buah setelah dikurangi biaya operasional. Jika kapal disewa, hasil tangkapan tidak perlu dibagi dengan pemilik kapal.	Selangkau (Kaliurang)
2.	Sistem bagi laba antara juragan dan anak buah kapal dengan alat tangkap agungan. Sistem ini dianggap efektif daripada sistem pengupahan karena menanggung resiko bersama. Setelah dikeluarkan biaya operasional melaut, lalu dikeluarkan 1 bagian untuk pemilik kapal, setelah itu dibagi rata berdasarkan banyaknya anak buah kapal. Namun pemilik kapal termasuk lagi dalam bagian ABK. Juragan menanggung kebutuhan hidup ABKnya dan memberi pinjaman jika diperlukan dengan cara pembayaran memotong bagian pendapatan ABK sesuai kesepakatan.	Benua Baru Hilir (Sangkulirang)
3.	Sistem bagi hasil bagi nelayan pancing atau rawai yang memiliki anak buah adalah sebagai berikut : 1 bagian untuk biaya operasional melaut, 1 bagian untuk pemilik kapal. Setelah itu 1 bagian lagi dibagi rata berdasarkan banyaknya ABK dan pemilik kapal termasuk lagi dalam bagian ABK.	Sangkima Lama (Sangata Selatan)
4.	Sistem pemasaran untuk ikan tangkapan adalah menjual kepada pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul tersebut juga dijadikan sumber pemberi pinjaman modal untuk pembelian alat tangkap, bahan bakar dan sebagainya.	Muara Bengalon (Bengalon)
5.	Sistem pembayaran yang dilakukan antara nelayan dengan pedagang pengumpul di pasar atau dengan penyambang di tengah laut ada 2 macam yaitu pembayaran secara kontan (ada ikan langsung dibayar) atau berjangka (menyicil beberapa kali) sesuai kondisi keuangan pedagang. Hal ini disepakati untuk menjaga kelanggengan hubungan anantara nelayan dengan pedagang perantara.	Benua Baru Hilir (Sangkulirang)
6.	Penjualan hasil tangkapan dilakukan langsung kepada pedagang di	Benua Baru

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
	pasar dan pembeli dari warung makan.	Hulu (Sangkulirang)
7.	Terdapat hubungan antara juragan (bos) dari Sangata dengan anak buahnya (beberapa orang nelayan Kenyamukan). Bos memberikan pinjaman berupa alat tangkap, bahan bakar, konsumsi melaut, es batu, biaya pemeliharaan kapal dan sebagainya yang dibutuhkan untuk kegiatan penangkapan. Terkadang nelayan juga dipenuhi kebutuhan sembakonya saat musim paceklik, termasuk paket sembako menjelang lebaran sebagai hadiah. Sistem peminjaman bersifat fleksibel waktu dan jumlah pengembaliannya berdasarkan perhitungan penjualan hasil tangkapan nelayan. Pembayaran dalam bentuk nota hasil penjualan ikan yang bisa ditukar dengan kebutuhan nelayan. Jika nelayan menginginkan dalam bentuk uang, mereka menukarkan nota yang sudah terkumpul dikurangi jumlah pinjamannya.	Kenyamukan (Sangata Utara)

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

### g. Praktek dan Tradisi Pengelolaan Sumberdaya

Berbagai kelembagaan lokal berupa lembaga adat, kelompok nelayan, kumpulan arisan dan yasinan menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat nelayan. Begitupula halnya dengan kesepakatan-kesepakatan dalam penentuan wilayah penangkapan berdasarkan pengoperasian alat tangkap menjadi dasar dalam mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Tabel 2.47. Kearifan Lokal Berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
1.	Kecamatan Teluk Pandan memiliki Lembaga Adat Kecamatan membawahi 7 Lembaga Adat Desa. Setiap desa dikelola 5 pengurus adat. Ketua adat di tingkat desa (dulu Kepala Padang) merupakan tokoh masyarakat yang memiliki wibawa, kewenangan untuk mengatur, mengarahkan dan penasehat bagi masyarakat desa. Masyarakat lebih mudah menyampaikan permasalahannya kepada Kepala Padang karena sifatnya yang kekeluargaan. Peran Kepala Padang sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah desa atau dinas terkait.	Martadinata (Teluk Pandan)
2.	Nelayan tergabung dalam kelompok nelayan atau pembudidaya. Adapun untuk wilayah penangkapan bersifat open access dimana setiap nelayan boleh melakukan kegiatan penangkapan. Ada kegiatan rapat anggota dengan prinsip yang diterapkan adalah mau bekerjasama, tidak berdasarkan suku dan wilayah administratif karena letak Desa Martadinata (Sangata) berbatasan dengan Desa Guntung (Bontang). Anggota kelompok bisa berasal dari wilayah Bontang maupun Sangata. Namun perkecualian bagi anggota kelompok yang dari luar Sangata tidak bisa menuntut jika ada bantuan dari pemerintah Sangata untuk anggota kelompok, kecuali berkeinginan pindah ke Sangata. Walaupun demikian untuk kegiatan usaha setiap warga boleh terlibat.	Martadinata (Teluk Pandan)
3.	Upaya menjaga hutan mangrove yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Kutai agar tidak terjadi kerusakan dan penebangan liar dilakukan oleh Lembaga Adat Desa sebagai pengawas di tingkat	Martadinata (Teluk Pandan)

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
	desa. Pemanfaatan kayu hutan mangrove untuk kayu bakar, sebagai turus untuk budidaya rumput laut, termasuk pemanfaatan kayu <i>sala'-sala'</i> yang tumbuh di tengah hutan mangrove dan dimanfaatkan sebagai papan untuk membuat rumah, masih diperbolehkan sepanjang untuk kebutuhan sendiri (tidak dijual) dan sudah meminta ijin pada Lembaga Adat Desa, walaupun sebenarnya kegiatan tersebut dilarang di kawasan Taman Nasional Kutai.	
4.	Lembaga Adat Desa mempunyai wewenang menasehati dan menegur masyarakat yang melakukan kegiatan penebangan hutan mangrove untuk tujuan komersial, melakukan pengeboman ikan di wilayah perairan dan kerusakan lainnya. Jika sudah beberap kali ditegur tetapi masih ada oknum yang melakukan kerusakan, maka Lembaga Adat Desa melaporkan kepada Lembaga Adat Kecamatan yang akan meneruskan kepada pihak berwajib untuk dilakukan penangkapan dan dijera hukuman sesuai kesalahan yang dilakukan.	Martadinata (Teluk Pandan) Muara Bengalon (Bengalon)
5.	Kelembagaan lokal seperti arisan/yasinan umumnya dilaksanakan oleh wanita nelayan. Karena kelompok nelayan umumnya beranggotakan rumah tangga nelayan (suami istri), sehingga fungsi kegiatan arisan juga berkaitan dengan aktivitas penangkapan seperti pembelian atau perbaikan alat tangkap dan perahu, penambahan modal usaha, selain untuk perbaikan rumah tinggal dan keperluan keluarga lainnya.	Martadinata (Teluk Pandan) Muara Bengalon (Bengalon)
6.	Wilayah operasi nelayan bagan yang relatif menetap (di sekitar bagan) dan sifatnya pasif, tidak boleh didekati oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap rengge (jaring) atau nelayan belat karena akan terjadi persaingan dimana ikan sudah terhadang duluan dengan alat tangkap aktif tersebut. Tetapi tidak menjadi masalah jika nelayan pancing yang beroperasi di sekitar bagan, karena hasil tangkapannya lebih selektif.	Sekerat (Bengalon)
7.	Aktivitas penangkapan tidak dilakukan di sekitar rumpon nelayan lain, karena rumpon (biasanya diberi tanda) merupakan milik pribadi yang tidak boleh dicampuri. Tidak boleh memasang rumpon disekitar terumbu karang karena daerah tersebut merupakan wilayah tangkapan milik bersama.	Sekerat (Bengalon)
8.	Pengelolaan kapal bantuan Dinas Perikanan dan Kelautan Bontang kepada kelompok nelayan dengan cara bergantian dalam memanfaatkan. Setiap anggota kelompok yang menggunakan kapal menyerahkan kontribusi setiap kali melaut. Uang tersebut menjadi kas kelompok dan dimanfaatkan untuk simpan pinjam. Kapal bantuan tidak menjadi milik pribadi/perorangan tetapi dimanfaatkan bersama. Aturan dibuat atas kesepakatan seluruh anggota kelompok nelayan sehingga berjalan baik. Kelembagaan kelompok nelayan dengan pendampingan mampu mengubah perilaku nelayan dalam hal kegiatan simpan pinjam. Karena pendapatan nelayan tidak tentu, maka pembayaran dilakukan dengan cara fleksibel sesuai musim penangkapan.	Selangkau (Kaliurang)
9.	Wilayah penangkapan nelayan agungan berpindah-pindah sesuai kondisi alam. Ada kesepakatan tidak tertulis untuk tidak saling mengganggu wilayah penangkapan nelayan pancing (di sekitar teluk), nelayan agungan, nelayan purse sein dan nelayan dengan alat tangkap lainnya.	Benua Baru Hilir (Sangkulirang)
10.	Nelayan dengan berbagai jenis alat secara tidak tertulis memiliki	Benua Baru

No.	Identifikasi Kearifan Lokal	Keterangan
	wilayah penangkapan masing-masing untuk menghindari konflik. Nelayan pemancing, trawl dan hampang diatur wilayah penangkapannya. Namun saat ini ketika musim dengan gelombang besar, nelayan sulit menghindari dan melakukan penangkapan di sembarang tempat yang penting mendapat hasil walaupun sedikit.	Hulu (Sangkulirang)
11.	Umumnya nelayan berangkat berkelompok, setelah sampai di wilayah penangkapan baru berpencar mencari peruntungan masing-masing. Pulang melaut juga dilakukan berombongan, agar mudah jika terjadi sesuatu hal di tengah perjalanan.	Sangkima Bandara (Sangata Selatan)
12.	Nelayan menandai daerah penangkapannya masing-masing dengan memperhatikan bentang alam dan pepohonan sekitarnya. Tidak mempermasalahkan jika wilayah penangkapan yang mereka temukan tersebut digunakan nelayan lain untuk kegiatan penangkapan, karena pada dasarnya rezeki sudah ada yang mengatur. Namun mereka tidak boleh ikut serta menangkap di sekitar wilayah penangkapan yang sudah ada nelayan lainnya yang lebih dahulu tiba.	Kenyamukan (Sangata Utara)

Sumber : Hasil-hasil Penelitian FPIK - Unmul

## 2.5. Isu dan Permasalahan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi:

### a. Bidang Sosial dan Kependudukan

Beberapa permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada bidang sosial dan kependudukan antara lain :

- Akses masyarakat lokal di desa-desa pesisir terhadap fasilitas sosial (misal kesehatan, pendidikan dan sumber air bersih);
- Tingkat kemiskinan di desa-desa tertinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Konflik sosial yang diakibatkan oleh tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya pesisir;
- Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir;
- Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi meningkatkan kebutuhan ruang pesisir dan kebutuhan gizi dan sumber protein ikan;

### b. Permasalahan Bidang Perikanan dan Kelautan

Permasalahan di bidang perikanan dan kelautan antara lain :

- Potensi sumberdaya ikan di wilayah pesisir semakin berkurang akibat degradasi sumberdaya pesisir dan tekanan penangkapan;
- Armada penangkapan masih terbatas baik jumlah maupun kapasitasnya;
- Sarana dan prasarana pelabuhan perikanan masih belum memadai;
- Daya jangkau daerah penangkapan nelayan terbatas akibat dari alat tangkap yang sederhana.
- Tantangan akan standarisasi kualitas produk perikanan dan kelautan;

- Penanganan produk-produk perikanan yang masih sederhana sehingga mempengaruhi mutu hasil perikanan;
- Pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang belum optimal;
- Pengembangan potensi mariculture yang belum optimal;

c. Permasalahan Bidang Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :

- Kualitas sumberdaya manusia pariwisata yang masih rendah untuk pengembangan industri pariwisata;
- Sarana dan prasarana penunjang pariwisata masih belum memadai;
- Keterbatasan dukungan dana pengembangan industri pariwisata;
- Aksesibilitas menuju objek dan daya tarik wisata masih kurang mendukung;
- Pengelolaan pariwisata di daerah pesisir belum optimal;
- Sistem pemasaran pariwisata belum dilakukan secara terpadu dan belum terfokus pada pangsa pasar tertentu;
- Peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata masih rendah;

d. Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum

Permasalahan bidang pekerjaan umum sub bidang sumberdaya air dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- Isu abrasi pantai;
- Pendangkalan muara, terutama muara-muara sungai yang dijadikan sebagai alur pelayaran perahu;
- Peningkatan laju sedimentasi;
- Pembangunan kawasan industri;
- Kurangnya pengelolaan sampah, air bersih dan air limbah;
- Sistem drainase belum baik dan merata terutama di daerah pemukiman

e. Permasalahan Bidang Perhubungan

Permasalahan bidang perhubungan pada sub sektor transportasi laut adalah sebagai berikut :

- Penataan wilayah pesisir dan pantai di daerah sejalan dengan pertumbuhan kawasan industri dan perdagangan yang mengarah pada perubahan struktur tata ruang wilayah;
- Sinergitas regulasi di bidang perhubungan laut antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota sesuai dengan kewenangannya;
- Penataan pengelolaan pelabuhan laut;

- Kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah penumpang, penerbangan dan kargo;
- Terhambatnya perkembangan pelabuhan;

f. Permasalahan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bidang lingkungan hidup meliputi :

- Menurunnya kualitas ekosistem dan habitat (antara lain kerusakan hutan mangrove, kondisi terumbu karang yang kurang baik akibat pengaruh negatif dan kegiatan manusia);
- Perubahan lingkungan pesisir akibat perubahan iklim;
- Terjadinya abrasi, sedimentasi dan akresi;
- Pencemaran perairan akibat pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga;
- Terancamnya kehidupan satwa langka (pesut dan ikan dugong);
- Konversi mangrove untuk kegiatan pertambakan, industri dan wilayah pemukiman dan kegiatan lainnya;
- Persepsi masyarakat dan tingkat partisipasi yang masih rendah untuk pengelolaan kawasan konservasi;
- Pembangunan gedung dan pemukiman melampaui batas sempadan pantai;

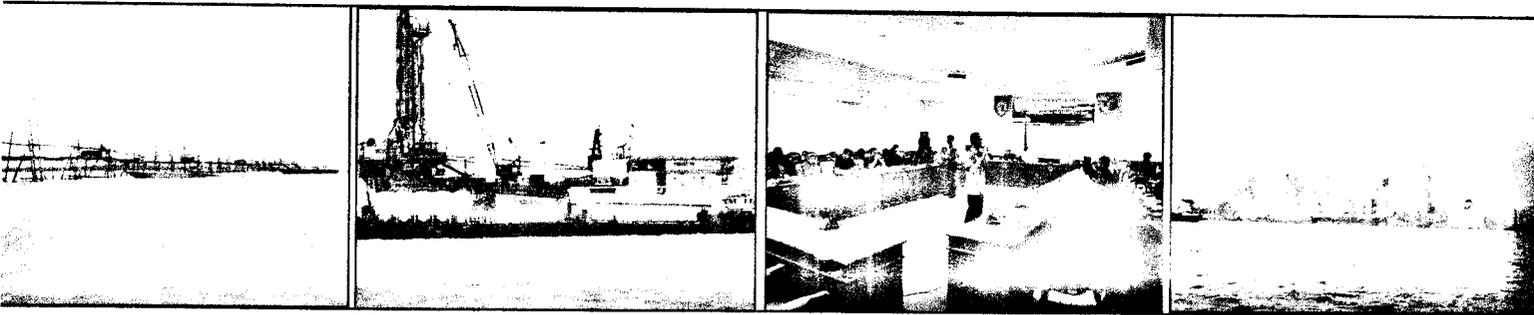
g. Permasalahan Bidang Permukiman dan Perumahan

Permasalahan di bidang permukiman dan perumahan meliputi :

- Ancaman alih fungsi lahan dari kawasan lindung ke kawasan budidaya, alih fungsi dalam kawasan budidaya dari pertanian ke permukiman;
- Ancaman alih mata pencaharian sebagai akibat dari alih fungsi ruang;
- Kondisi infrastruktur permukiman yang belum memadai (cakupan air bersih, drainase dan limbah);
- Aspek legal yang lebih operasional bidang tata ruang dan pesisir;
- Proporsi penggunaan sumur pompa oleh masyarakat semakin meningkat;
- Pelayanan kebersihan di daerah pemukiman dan padat penduduk belum dilakukan dengan baik;
- Kesadaran sebagian besar masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah;
- Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir sampah dikhawatirkan mencemari air baku air untuk air bersih;
- Potensi dan permasalahan permukiman di atas air;

## BAB III

### KERANGKA STRATEGI PENGELOLAAN DAN PEMBANGUNAN



#### 3.1. Visi dan Misi

Dengan memperhatikan kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025, kebijakan nasional serta mempertimbangkan kecenderungan kondisi global, lokal dan regional maka disusun Visi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur. Visi pengelolaan wilayah pesisir ini diturunkan dari Visi Provinsi Kalimantan Timur serta isu-isu pengelolaan wilayah pesisir yang diformulasikan berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Pokja/Tim Teknis.

**Visi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur 2014-2034 adalah:**

***“Terwujudnya pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang adil dan sejahtera.”***

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan beberapa **Misi**, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kalimantan Timur.
2. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia pesisir yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

3. Meningkatkan perekonomian wilayah pesisir yang handal dengan partisipasi masyarakat pesisir yang seluas-luasnya.
4. Mendorong tumbuhnya kesadaran dan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di Kalimantan Timur.
5. Mengembangkan kelembagaan, hukum dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, seimbang dan selaras.
6. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan upaya-upaya rehabilitasi untuk mempertahankan kualitas lingkungan pesisir.
7. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur**

#### **3.2.1. Tujuan Pokok**

Tujuan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 adalah mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpadu dan berkelanjutan menuju masyarakat Kalimantan Timur yang adil dan sejahtera sebagai landasan bagi tahap pengelolaan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **3.2.2. Sasaran Pokok**

Sasaran pokok dari Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 adalah:

1. Terwujudnya kualitas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat Kalimantan Timur.
2. Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia pesisir yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
3. Terwujudnya perekonomian wilayah pesisir yang handal dengan partisipasi masyarakat pesisir yang seluas-luasnya.
4. Terwujudnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu di Kalimantan Timur.
5. Terwujudnya kelembagaan, hukum dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, seimbang dan selaras.

6. Terwujudnya optimalisasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta melakukan upaya-upaya rehabilitasi untuk mempertahankan kualitas lingkungan pesisir.
7. Terwujudnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengendalian dan penanggulangan bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **3.3. Isu-isu Strategis, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur**

Isu-isu strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Isu degradasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Isu masih terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia pesisir.
3. Isu pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil baik dari kegiatan industri, jasa-jasa dan pariwisata.
4. Isu kesadaran (*public awareness*) dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Isu kelembagaan, hukum dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
6. Isu pengawasan dan pengendalian serta rehabilitasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Isu mitigasi bencana dan perubahan iklim.

#### **A.1. Isu Degradasi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

**TUJUAN A-1:** Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**SASARAN A-1 :** Peningkatan Kualitas Sumberdaya Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun

#### **STRATEGI A-1:**

- Melibatkan masyarakat pesisir dalam perlindungan dan konservasi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun
- Menekan sekecil mungkin sumber-sumber pencemaran yang masuk ke perairan pesisir
- Menekan praktek-praktek destruktif pada lokasi-lokasi terumbu karang hidup

- Mengembangkan daerah perlindungan laut/kawasan konservasi laut untuk konservasi mangrove, terumbu karang dan padang lamun

#### **ISU B. ISU MASIH TERBATASNYA KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PESISIR**

**TUJUAN B-1** : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Pesisir

**SASARAN B-1** : Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Masyarakat melalui Pendidikan Formal maupun Non-formal di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil

##### **STRATEGI B-1:**

- Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA unggulan di bidang kelautan/perikanan/maritim dan/atau SMK kelautan/perikanan/maritim
- Mengintegrasikan dan mengimplementasikan materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal pada SMP dan SMA khususnya sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mengembangkan program pendidikan, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mengembangkan pelatihan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi staf pada SKPD/ instansi terkait
- Mendorong peningkatan SDM staf pada SKPD/instansi terkait untuk mengikuti pendidikan tingkat sarjana dan pasca sarjana di bidang yang relevan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

#### **ISU C-1. ISU PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**TUJUAN C-1** : Meningkatkan Efektifitas Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

**SASARAN C-1** : Mengurangi Eksternalitas Negatif Pembangunan Ekonomi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

##### **STRATEGI C-1:**

- Pengaturan kegiatan reklamasi pantai untuk kegiatan industri
- Pengaturan wilayah penangkapan ikan tradisional di wilayah pesisir
- Meningkatkan penegakan hukum yang berlaku mengenai pemanfaatan sumberdaya lauti oleh nelayan
- Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

**TUJUAN C-2** : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

**SASARAN C-2** : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Pembangunan Ekonomi

**STRATEGI C-2** :

- Melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat pesisir untuk peningkatan ekonomi rumah tangga
- Mengembangkan alternatif livelihoods masyarakat pesisir
- Mendukung pengembangan aspek pemasaran produk-produk produktif masyarakat pesisir
- Memfasilitasi kerjasama masyarakat dan pihak swasta dengan prinsip mutual benefit.

**ISU D-1. ISU KESADARAN (*PUBLIC AWARENESS*) DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**TUJUAN D-1:** Meningkatkan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**SASARAN D-1:** Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**D-2:** Peningkatan Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**STRATEGI D-1:**

- Meningkatkan cakupan dan keterjangkauan kegiatan komunikasi
- Meningkatkan pembinaan oleh instansi terkait kepada kelompok

**STRATEGI D-2:**

- Mendorong partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat baik individu, keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil
- Mengaktifkan dan meningkatkan forum-forum komunikasi antar stakeholders di masing-masing kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil
- Menggali dan melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

**ISU E. ISU KELEMBAGAAN, HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**TUJUAN E-1:** Meningkatkan Fungsi Kelembagaan, Hukum dan Kebijakan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**SASARAN E-1:** Peningkatan Kelengkapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan di Daerah mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan P2K

**STRATEGI E-1:**

- Memperkuat koordinasi antar SKPD terkait untuk efektifitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mempercepat penetapan Dokumen Final Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur menjadi PERGUB
- Mengakselerasi penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur
- Menyusun rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- Mendorong komitmen DPRD untuk mengakomodasi proses legislasi pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menetapkan pengaturan pengelolaan batas-batas wilayah laut dengan provinsi lain dan batas negara
- Melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait dalam proses penyusunan peraturan daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**TUJUAN E-2 :** Meningkatkan Efektifitas Penegakan Hukum

**SASARAN E-2:** Peningkatan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**STRATEGI E-2:**

- Mengadakan sosialisasi aturan dalam penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penambahan personil, sarana dan prasarana penegakan hukum
- Memberdayakan peran kelompok pengawasan masyarakat (Pokmaswas) yang ada dalam membantu penegakan hukum
- Memperkuat koordinasi antar SKPD/instansi terkait dalam penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

**ISU F. ISU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA REHABILITASI SUMBERDAYA PESISIR**

**TUJUAN F-1:** Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian serta Rehabilitasi Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

**SASARAN F-1: Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

**STRATEGI F-1:**

- Melibatkan masyarakat dan stakeholders terkait dalam upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mengoptimalkan peran petugas pengawasan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
- Menyusun SOP untuk meningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir

**TUJUAN F-2 : Mengembalikan Fungsi Ekosistem Pesisir**

**SASARAN F-2 : Pengembalian Fungsi Ekosistem Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

**STRATEGI F-2:**

- Mengembalikan fungsi terumbu karang yang rusak melalui pembuatan dan penanaman artificial reefs
- Mencadangkan wilayah pesisir untuk kebutuhan restocking
- Menyusun rencana pengelolaan untuk rehabilitasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

**ISU G. ISU MITIGASI BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM**

**TUJUAN G-1 : Meningkatkan Pengelolaan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim**

**SASARAN G-1 : Peningkatan Kewaspadaan terhadap Bencana**

**STRATEGI G-1:**

- Meningkatkan kapasitas, respon dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana pesisir
- Mengidentifikasi jenis dan daerah rawan bencana pesisir
- Kampanye mitigasi bencana melalui pendidikan formal
- Menyusun pedoman mitigasi bencana

**TUJUAN G-2 : Menurunnya Resiko Bencana Pesisir**

**SASARAN G-2 : Berkurangnya Resiko Kerusakan Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil**

**STRATEGI G-2:**

- Membangun komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana

- Mengembangkan program penyelamatan dini
- Memperkuat kebijakan dan manajemen bencana (disaster management) dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional
- Monitoring dan evaluasi kecakapan lembaga dalam melakukan mitigasi bencana
- Memperkuat kemampuan institusi untuk implementasi kebijakan penanganan bencana
- Membangun komitmen, kesepahaman dan kerjasama yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab institusi di luar lingkungan Pemprov Kaltim dalam mitigasi bencana
- Menyusun perencanaan penanggulangan bencana serta membuat SOP
- Menyusun peraturan daerah yang diperlukan untuk menunjang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif

**TUJUAN G-3** : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana

**SASARAN G-3** : Peningkatan Sarana dan Prasarana Mitigasi Bencana

**STRATEGI G-3:**

- Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mitigasi bencana pesisir dan perubahan iklim.
- Mengidentifikasi dan merencanakan tempat dan jalur evakuasi
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk tempat evakuasi
- Membangun, memasang dan memelihara fasilitas baru untuk mitigasi bencana

Untuk lebih jelasnya maka di bawah ini disusun tabel proses implementasi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 di bawah ini.

Tabel 3.1. Proses Implementasi Renstra Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034

STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB/ INSTANSI TERKAIT	PRIORITAS	TAHUN (Jangka Waktu dan Periode)
<b>A-1. ISU DEGRADASI SUMBERDAYA PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			
<b>SASARAN A-1: Peningkatan Kualitas Sumberdaya Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun</b>			
<b>STRATEGI A-1:</b>			
❖ Melibatkan masyarakat pesisir dalam perlindungan dan konservasi ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun	<b>DKP, BLH, DISHUT, CAMAT, SWASTA</b>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menekan sekecil mungkin sumber-sumber pencemaran yang masuk ke perairan pesisir	<b>DKP, BLH, SWASTA</b>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menekan praktek-praktek destruktif pada lokasi-lokasi terumbu karang hidup	<b>DKP, BLH, SWASTA</b>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengembangkan daerah perlindungan laut/kawasan konservasi laut untuk konservasi mangrove, terumbu karang dan padang lamun	<b>DKP, BLH, DISHUT, CAMAT</b>	1	5 tahun (2014-2034)
<b>ISU B. ISU MASIH TERBATASNYA KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA PESISIR</b>			
<b>SASARAN B-1: Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Pendidikan Formal maupun Non-formal di Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil</b>			
<b>STRATEGI B-1:</b>			
❖ Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan pada SMA unggulan di bidang kelautan/perikanan/maritim dan/atau SMK kelautan/perikanan/maritim	<b>DJSDIK, DKP, SWASTA</b>	2	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengintegrasikan dan mengimplementasikan materi pelajaran tentang pengelolaan wilayah pesisir dalam kurikulum muatan lokal pada SMP dan SMA khususnya sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<b>DJSDIK, DKP, BLH</b>	2	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengembangkan program pendidikan, pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	<b>DKP, DISINDAGKOP DAN UMKM, PERBANKAN, SWASTA</b>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengembangkan pelatihan teknis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi staf pada SKPD/	<b>BKD, DKP, DISHUT, BLH</b>	2	5 tahun (2014-2034)

STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB/ INSTANSI TERKAIT	PRIORITAS	TAHUN (Jangka Waktu dan Periode)
instansi terkait			
❖ Mendorong peningkatan SDM staf pada SKPD/instansi terkait untuk mengikuti pendidikan tingkat sarjana dan pasca sarjana di bidang yang relevan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DISDIK, BKD, PT</u>	2	5 tahun (2014-2034)
<b>ISU C-1. ISU PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			
<b>SASARAN C-1: Mengurangi eksternalitas negatif pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</b>			
<b>C-2: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan ekonomi</b>			
<b>STRATEGI C-1</b>			
❖ Pengaturan kegiatan reklamasi pantai untuk kegiatan industri	<u>BAPPEDA, DKP, BLH</u>		
❖ Pengaturan wilayah penangkapan ikan tradisional di wilayah pesisir	<u>DKP, CAMAT</u>	2	5 tahun (2011-2030)
❖ Meningkatkan penegakan hukum yang berlaku mengenai pemanfaatan sumberdaya lauti oleh nelayan	<u>DKP, POLRES, AL, DISHUBKOMINFO, KEJAKSAAN</u>	1	5 tahun (2010-2030)
❖ Meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian konflik pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP, POLRES, AL, DISHUBKOMINFO</u>	1	5 tahun (2010-2030)
<b>STRATEGI C-2</b>			
❖ Melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan masyarakat pesisir untuk peningkatan ekonomi rumah tangga	<u>DKP, DISINDAGKOP DAN UMKM, PT</u>	1	5 tahun (2010-2030)
❖ Mengembangkan alternatif <i>livelihoods</i> masyarakat pesisir	<u>DKP, DISINDAGKOP DAN UMKM, PT</u>	1	5 tahun (2010-2030)
❖ Mendukung pengembangan aspek pemasaran produk-produk produktif masyarakat pesisir	<u>DKP, DISINDAGKOP DAN UMKM, SWASTA, PERBANKAN, PT</u>	1	5 tahun (2010-2030)
❖ Memfasilitasi kerjasama masyarakat dan pihak swasta dengan prinsip mutual benefit.	<u>DKP, DISINDAGKOP DAN UMKM, PT, SWASTA</u>	1	5 tahun (2010-2030)
<b>ISU D-1. ISU KESADARAN (PUBLIC AWARENESS) DAN KEPEDULIAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			
<b>SASARAN D-1: Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			
<b>D-2: Peningkatan Kepedulian dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			
<b>STRATEGI D-1:</b>			

STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB/ INSTANSI TERKAIT	PRIORITAS	TAHUN (Jangka Waktu dan Periode)
❖ Meningkatkan cakupan dan keterjangkauan kegiatan komunikasi	<u>DISKOMINFO</u> , <u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>DISHUT</u> , <u>CAMAT</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Meningkatkan pembinaan oleh instansi terkait kepada kelompok	<u>DISKOMINFO</u> , <u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>BCAMAT</u>	2	5 tahun (2014-2034)
<b>STRATEGI D-2:</b>			
❖ Mendorong partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat baik individu, keluarga dan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>BKKBN</u> , <u>CAMAT</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengaktifkan dan meningkatkan forum-forum komunikasi antar stakeholder di masing-masing kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>DISHUT</u> , <u>BLH</u> , <u>CAMAT</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menggali dan melestarikan kearifan lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>CAMAT</u> , <u>DISBUDPAR</u>	2	5 tahun (2014-2034)
<b>ISU E. ISU KELEMBAGAAN, HUKUM DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>			
<b>SASARAN E-1 : Peningkatan Kelengkapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan di Daerah mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			
<b>E-2 : Peningkatan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			
<b>STRATEGI E-1:</b>			
❖ Memperkuat koordinasi antar SKPD terkait untuk efektifitas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>BAPPEDA</u> , <u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>DISHUT</u> , <u>DPU</u> , <u>DISBUDPAR</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mempercepat penetapan Dokumen Final Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur menjadi PERGUB	<u>BAPPEDA</u> , <u>DKP</u> , <u>BAGIAN HUKUM SETDA</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengakselerasi penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur	<u>BAPPEDA</u> , <u>DKP</u> , <u>DPRD</u> , <u>BAGIAN HUKUM SETDAPROV</u> ,	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menyusun rancangan peraturan daerah mengenai Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	<u>DKP</u> , <u>BAG. HUKUM</u>	2	5 tahun (2014-2034)
❖ Mendorong komitmen DPRD untuk mengakomodasi	<u>DKP</u> , <u>BAG. HUKUM</u> , <u>DPRD</u>	2	5 tahun (2014-2034)

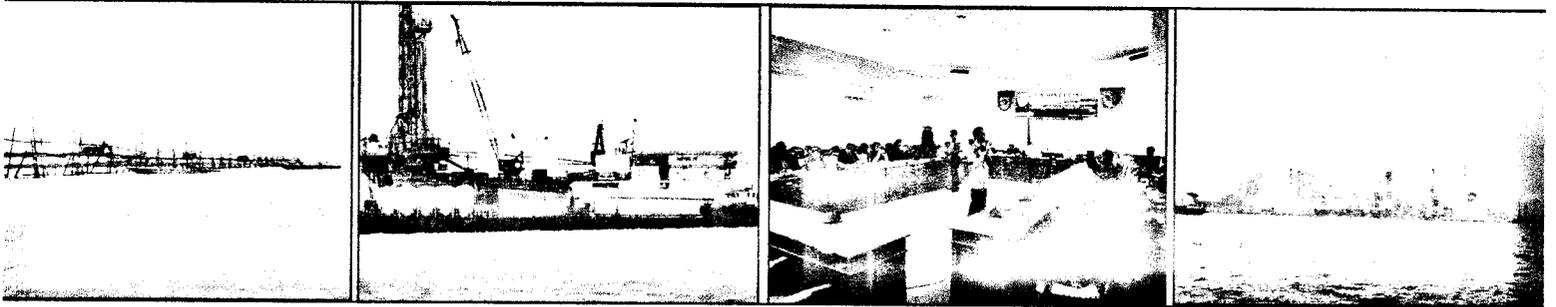
STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB/ INSTANSI TERKAIT	PRIORITAS	TAHUN (Jangka Waktu dan Periode)
<p>proses legislasi pembentukan peraturan daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menetapkan pengendalian pengelolaan batas-batas wilayah laut dengan provinsi lain dan batas negara</li> <li>❖ Melibatkan masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait dalam proses penyusunan peraturan daerah di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ul>			
❖ Mengadakan sosialisasi aturan dalam penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>BAPPEDA</u> , <u>BIRO PERBATASAN</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2010-2030)
❖ Penambahan personil, sarana dan prasarana penegakan hukum	<u>DKP</u> , <u>BAG. HUKUM</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Memberdayakan peran kelompok pengawasan masyarakat (Pokmaswas) yang ada dalam membantu penegakan hukum	<u>DKP</u> , <u>BAG. HUKUM</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Memperkuat koordinasi antar SKPD/instansi terkait dalam penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<u>DKP</u> , <u>BKPP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Meningkatkan peran kelompok pengawasan masyarakat (Pokmaswas) yang ada dalam membantu penegakan hukum	<u>DKP</u> , <u>CAMAT</u> , <u>Pokmaswas</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Memperkuat koordinasi antar SKPD/instansi terkait dalam penegakan hukum dan peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.	<u>BAG. HUKUM</u> , <u>DKP</u> , <u>KANWIL HUKUM DAN HAM</u> , <u>KAJATI</u> , <u>POLDA</u>	1	5 tahun (2014-2034)
<b>ISU F. ISU PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA REHABILITASI SUMBERDAYA PESISIR</b>			
<b>SASARAN F-1 : Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			
<b>F-2 : Pengembalian Fungsi Ekosistem Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</b>			
<b>STRATEGI F-1:</b>			
❖ Melibatkan masyarakat dan <i>stakeholders</i> terkait dalam upaya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>CAMAT</u> , <u>BAG. HUKUM</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>POLDA</u> , <u>TNI AL</u> , <u>DISHUBKOMINFO</u> ,	1	5 tahun (2010-2030)
❖ Mengoptimalkan peran petugas pengawasan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>TNI AL</u> , <u>Pokmaswas</u>	1	5 tahun (2014-2034)

STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB/ INSTANSI TERKAIT	PRIORITAS	TAHUN (Jangka Waktu dan Periode)
❖ Menyusun SOP untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir	<u>DKP</u> , <u>BAG. HUKUM</u>	1	5 tahun (2014-2034)
<b>STRATEGI F-2:</b>			
❖ Mengembalikan fungsi terumbu karang yang rusak melalui pembuatan dan penanaman artificial reefs	<u>DKP</u> , <u>BLH</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mencadangkan wilayah pesisir untuk kebutuhan restocking	<u>DKP</u> , <u>BLH</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menyusun rencana pengelolaan untuk rehabilitasi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil	<u>DKP</u> , <u>BLH</u>	1	5 tahun (2014-2034)
<b>ISU G. ISU MITIGASI BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM</b>			
<b>SASARAN G-1 : Peningkatan Kewaspadaan terhadap Bencana Pesisir</b>			
<b>G-2 : Mengurangi Resiko Kerusakan akibat Bencana Pesisir dan Perubahan Iklim</b>			
<b>G-3 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Mengantisipasi dampak Bencana dan Perubahan Iklim</b>			
<b>STRATEGI G-1:</b>			
❖ Meningkatkan kapasitas, respon dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana pesisir	<u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DINSOS</u> , <u>POLISI</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengidentifikasi jenis dan daerah rawan bencana pesisir	<u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>CAMAT</u> , <u>BAPPEDA</u> , <u>DISHUBKOMINFO</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Kampanye mitigasi bencana melalui pendidikan formal	<u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u> , <u>DISDIK</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menyusun pedoman mitigasi bencana	<u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u> , <u>DINSOS</u>		5 tahun (2014-2034)
<b>STRATEGI G-2:</b>			
❖ Membangun komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan manajemen penanggulangan bencana	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengembangkan program penyelamatan dini	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menguatkan kebijakan dan manajemen bencana ( <i>disaster management</i> ) dengan dukungan sumberdaya manusia yang profesional	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Monitoring dan evaluasi kecakapan lembaga dalam melakukan mitigasi bencana	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)

STRATEGI	PENANGGUNG JAWAB/ INSTANSI TERKAIT	PRIORITAS	TAHUN (jangka Waktu dan Periode)
❖ Menguatkan kemampuan institusi untuk implementasi kebijakan penangananan bencana	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u> , <u>DINKES</u>	2	5 tahun (2014-2034)
❖ Membangun komitmen, kesepahaman dan kerjasama yang kuat mengenai peran dan tanggung jawab institusi di luar lingkungan Pemprov Kaltim dalam mitigasi bencana	<u>BAPPEDA</u>	2	5 tahun (2014-2034)
❖ Menyusun perencanaan penanggulangan bencana serta membuat SOP	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Menyusun peraturan daerah yang diperlukan untuk menunjang upaya mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif	<u>BAPPEDA</u> , <u>KESBANGLINMAS</u> , <u>DKP</u>	2	5 tahun (2014-2034)
<b>STRATEGI G-3:</b>			5 tahun (2014-2034)
❖ Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mitigasi bencana pesisir dan perubahan iklim.	<u>DPU</u> , <u>BLH</u> , <u>DKP</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengidentifikasi dan merencanakan tempat dan jalur evakuasi	<u>DKP</u> , <u>BLH</u> , <u>CAMAT</u> , <u>BAPPEDA</u> , <u>DISHUBKOMINFO</u> , <u>KESBANGLINMAS</u>	1	5 tahun (2014-2034)
❖ Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk tempat evakuasi	<u>DPU</u> , <u>BAPPEDA</u>	2	5 tahun (2014-2034)
❖ Membangun, memasang dan memelihara fasilitas baru untuk mitigasi bencana	<u>DPU</u> , <u>BAPPEDA</u>	2	5 tahun (2014-2034)

## BAB IV

# KAJIDAH PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN



### 4.1. Kaidah Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 mengikuti kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur diselenggarakan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- b) 2). Penyelenggaraan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui mekanisme kepemimpinan, koordinasi, pertanggungjawaban, kemitraan, partisipasi masyarakat dan mobilisasi sumber daya manusia dan finansial serta kontribusi dunia usaha swasta.

#### a. Kepemimpinan

- 1) Pelaksanaan rencana strategis ini memerlukan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh pimpinan SKPD/instansi terkait. Untuk itu perlu komunikasi dan koordinasi intensif antara Gubernur, DPRD dan Pimpinan SKPD/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membangun kesamaan persepsi dan komitmen tentang pentingnya pengelolaan wilayah pesisir yang bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
- 2) Perlu ditetapkan Pejabat yang memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Rencana. Dalam hal ini, Gubernur dapat menunjuk Asisten II (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) sebagai Pejabat yang mempunyai kewenangan

memimpin dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3-K) Provinsi Kalimantan Timur.

- 3) Pimpinan SKPD/instansi terkait, baik sektor pemerintah, masyarakat sipil dan para mitra bertugas memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup kewenangan masing-masing.

**b. Koordinasi Pelaksanaan Rencana Strategis**

Asisten II sebagai Pejabat yang ditunjuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Strategis mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait, masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam hal:

- 1) Perencanaan Program/Kegiatan
  - Koordinasi perencanaan Program/Kegiatan Tahunan yang mengacu kepada Rencana Aksi.
- 2) Koordinasi/Sinkronisasi
  - Koordinasi dilakukan untuk sinkronisasi program kerja instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  - Asisten II memimpin pelaksanaan rapat koordinasi sinkronisasi program.

**c. Pertanggungjawaban**

- 1) Setiap instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan pertanggungjawaban Program/Kegiatan secara rutin tiap tahun kepada Gubernur.
- 2) Gubernur menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban dalam sidang pleno DPRD.

**d. Kemitraan**

- 1) Program/kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan oleh berbagai pihak berdasarkan kemitraan sejajar.
- 2) Kemitraan sejajar dilaksanakan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- 3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara aktif menggalang kerjasama kemitraan di tingkat daerah dengan lembaga-lembaga terkait.

**e. Partisipasi Masyarakat**

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan masyarakat termasuk lembaga-lembaga tradisional pada posisi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pengelolaan wilayah pesisir.

- 2) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan mengembangkan kerjasama serta kemitraan dengan berbagai pihak agar akselerasi pembangunan di wilayah pesisir dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
- 3) Masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah dapat memprakarsai program/kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dengan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah.

**f. Mobilisasi Sumberdaya Manusia**

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan penyiapan sumberdaya manusia, yang terdiri dari perencana, pelaksana program di tingkat lapangan, tenaga monitoring dan evaluasi.
- 2) Penyiapan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pelatihan manajemen dan pelatihan teknis oleh institusi yang sesuai dengan bidang pelayanan dan keahlian yang dibutuhkan.

**g. Mobilisasi Sumberdaya Finansial**

- 1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya memenuhi dan atau mengupayakan agar dana yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Strategis tersedia.
- 2) Dana untuk pelaksanaan Rencana Strategis dapat berupa APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur serta sumber dana lainnya.
- 3) Mobilisasi sumberdaya finansial oleh instansi terkait dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

**h. Kontribusi Dunia Usaha Swasta**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkepentingan mendorong kontribusi dunia usaha swasta untuk menyediakan sumber dana dan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur.

**4.2. Pemantauan, Evaluasi dan Peninjauan Kembali**

**a. Pemantauan**

- 1) Pemantauan merupakan bagian yang sangat penting dan tak terpisahkan dari Rencana Strategis. Pemantauan diharapkan dapat memberikan informasi bahwa strategi dan

kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, yang meliputi aspek masukan, proses dan keluaran.

- 2) Pemantauan dilaksanakan secara terus menerus dengan memanfaatkan sistem informasi dan sejumlah indikator.
- 3) Hasil-hasil kegiatan pemantauan digunakan untuk evaluasi implementasi Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur.

#### **b. Evaluasi**

- 1) Evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui keberhasilan Rencana Strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 2) Hasil-hasil kegiatan evaluasi dipergunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan, mempercepat implementasi, dan mencapai target sesuai dengan indikator sasaran serta peninjauan kembali kebijakan, program dan rencana kerja.
- 3) Evaluasi dilakukan dalam 4 tahap, yaitu: Evaluasi Rutin Tahunan, Evaluasi Pertengahan, Evaluasi Akhir dan Evaluasi Insidentil.
  - Evaluasi Tahunan untuk menilai jalannya program dan kegiatan setiap tahun.
  - Evaluasi Pertengahan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun setelah berjalan 5 tahun dengan tujuan untuk menilai jalannya kegiatan yang telah dilakukan pada 5 tahun pertama dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan, jika perlu, dapat dilakukan kaji ulang/peninjauan kembali dan perubahan pada strategi dan arah kebijakan.
  - Evaluasi akhir dilaksanakan pada tahun 2033, yang bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan strategi secara keseluruhan.
  - Evaluasi pertengahan, evaluasi akhir ataupun evaluasi insidentil dilakukan melalui survei dan pelaporan.

#### **c. Peninjauan Kembali**

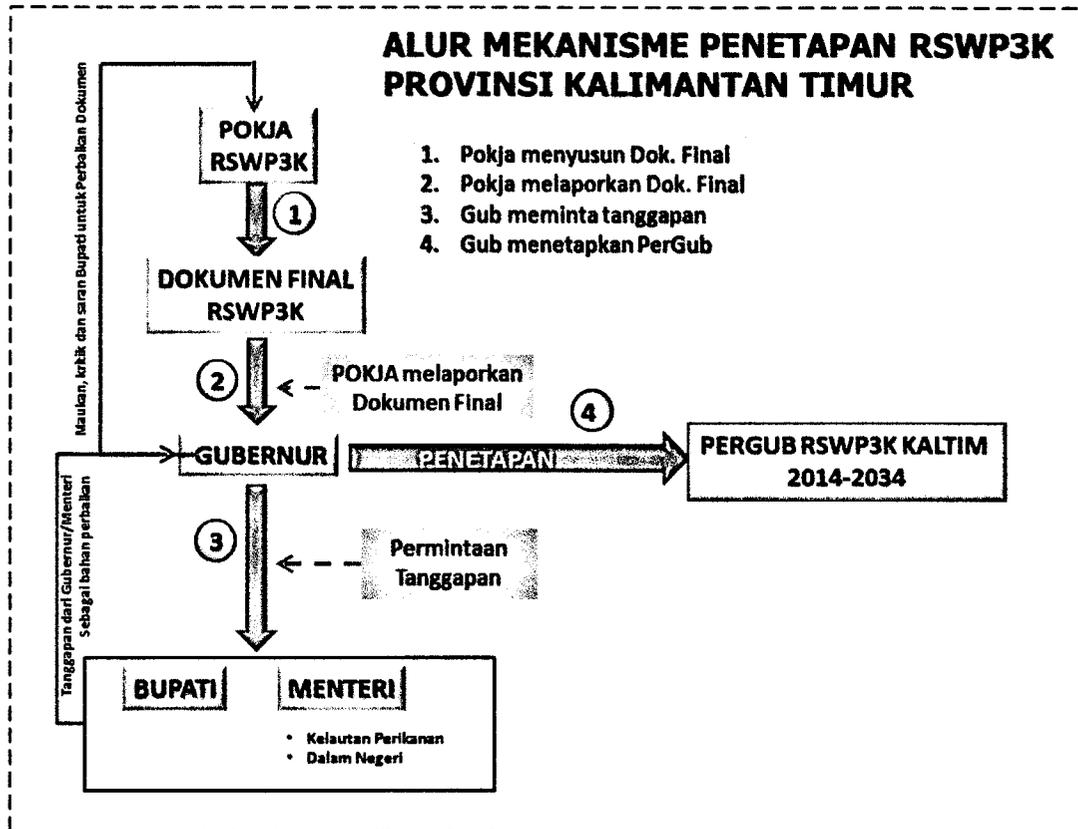
- 1) Pada dasarnya Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur harus menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini perlu disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan serta perkembangan sosial-ekonomi yang terjadi. Agar tetap sesuai dengan gerak dinamika pembangunan daerah dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, maka Rencana Strategis ini perlu ditinjau kembali secara bertahap.

- 2) Peninjauan kembali Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur adalah proses mengkaji ulang dengan memanfaatkan data/informasi dari kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menyempurnakan dan memperbaharui strategi dan kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi dan perubahan-perubahan yang terjadi secara pesat di daerah.
- 3) Penyempurnaan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan jika hasil peninjauan kembali ini menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan yang mendasar antara yang direncanakan dengan realitas yang dijumpai di lapangan serta adanya kebutuhan untuk mengakselerasi pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan, yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam kebijakan pemerintah, perkembangan sosial ekonomi masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini, peninjauan kembali merupakan upaya untuk menjaga fleksibilitas dari rencana strategis agar senantiasa dapat sejalan dengan perkembangan yang terjadi.
- 4) Peninjauan kembali Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP-3-K) Provinsi Kalimantan Timur direncanakan pada tahun kelima dan tahun kesepuluh.
- 5) Kegiatan peninjauan kembali pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dalam pelaksanaannya perlu dikoordinir oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur atau SKPD/instansi lain yang ditunjuk.

#### **4.3. Penetapan Rencana Strategis WP3K Provinsi Kalimantan Timur**

Dokumen RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur yang telah mendapatkan masukan dari Menteri/Bupati disampaikan kembali oleh Gubernur kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) untuk diakomodir dalam dokumen Renstra tersebut. Setelah masukan telah diakomodir maka Ketua Pokja mengirimkan Surat Permohonan Penetapan beserta dokumen RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sesuai kewenangannya.

Selengkapnya mengenai alur mekanisme penetapan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2034 dikemukakan pada Gambar 4.1. di bawah ini.

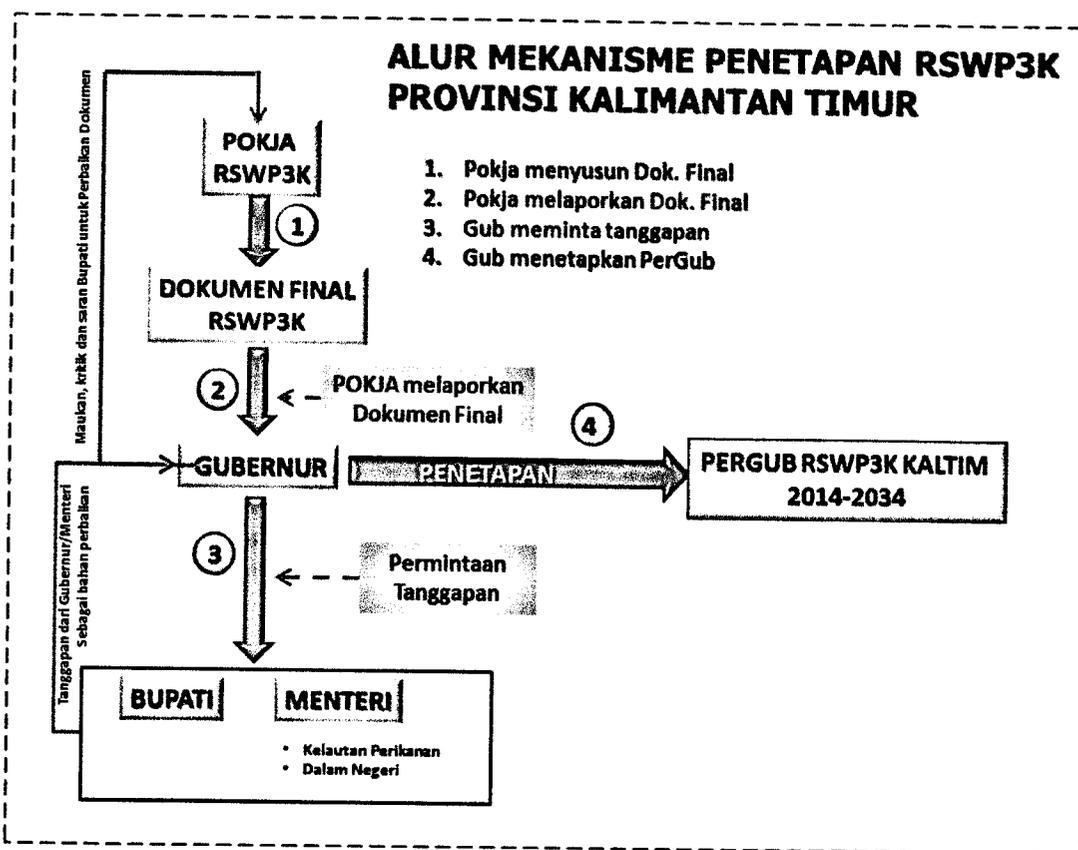


Gambar 4.1. Alur Mekanisme Penetapan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda,

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



Gambar 4.1. Alur Mekanisme Penetapan RSWP-3-K Provinsi Kalimantan Timur

Samarinda, 13 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19620527 198503 1 006